



EKONOMI INTERNASIONAL

EKONOMI INTERNASIONAL

RITA YUNUS
RAHMATIA
HAERUL ANAM

Penerbit Detak Pustaka
Jl. Kandang, Rejoagung, Ngoro
Jombang, Jawa Timur, 61473
Telp : +62 858-5003-8406
E-mail : cs@detakpustaka.com

ISBN 978-623-97833-3-4



Ekonomi Internasional

Rita Yunus

Rahmatia

Haerul Anam



Ekonomi Internasional

Penulis :

Rita Yunus; Rahmatia; Haerul Anam

ISBN : 978-623-97833-3-4

Editor :

Detak Pustaka

Penyunting:

Detak Pustaka

Desain sampul dan Tata letak:

Detak Pustaka

Penerbit:

Detak Pustaka

Redaksi :

Jl. Kandangan, Rejoagung, Ngoro

Jombang, Jawa Timur, 61473

Telp : +62 858-5003-8406

E-mail : cs@detakpustaka.com

Website : www.detakpustaka.com

Cetakan Pertama, Agustus 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Ucapan syukur alhamdulillah merupakan kata yang tepat mengawali pengantar BUKU EKONOMI INTERNASIONAL yang coba kami tulis ini. Sebagai penulis pemula harus penulis akui bahwa apa yang terbentang dalam buku ini tidak merupakan “asli” dari hasil pemikiran penulis, tetapi merupakan kompilasi dan saduran dari berbagai buku yang berkaitan Ekonomi Internasional.

Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 hingga bab 5 mengurai tentang : Sejarah ekonomi Internasional, Gambaran Umum Ekonomi Internasional, Teori Teori Perdagangan Internasional, Kebijakan Ekonomi Internasional, dan Perkembangan Nilai Tukar. Sedang pada Bab VI - Bab X menguntai tentang: Neraca Pembayaran, Neraca Transaksi Berjalan, Sistem Moneter Internasional, Globalisasi Ekonomi, dan Peran Ekonomi Luar Negeri dalam Perekonomian Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku ini, namun sebagai pembelajar tentulah harus senantiasa memotivasi diri untuk menciptakan kesadaran baru

bahwa keterbukaan diri untuk menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak agar derap langkah menuju titik kesempurnaan.

Semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca dan literasi ekonomi.

Makassar, Juli 2021

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL	1
Sejarah Ekonomi Internasional (Jalur Sutra)	1
Sejarah Ilmu Ekonomi	2
Sejarah Merkantilisme	16
Sejarah Kapitalisme	18
Sejarah Liberalisme dan Pasar Bebas	19
Sejarah Neo-Liberalisme	20
Para Tokoh Neo Liberalisme	27
Monopoli, Oligopoli, Monopsoni, Oligopsoni	28
BAB II GAMBARAN UMUM EKONOMI INTERNASIONAL	31
Ekonomi Internasional dan Ilmu Ekonomi	31
Pengertian Ekonomi Internasional	35
Tujuan Ekonomi Internasional	39
Mengapa Suatu Negara Perlu Berdagang dengan Negara Lain?	40

BAB III	TEORI - TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	64
	Teori Klasik, Keunggulan Absolut (<i>Absolut Advantage/Absolut Cost</i> Adam Smith)	45
	Biaya Relatif (<i>Comparative Cost</i> : David Ricardo)	51
	Teori Modern, Keunggulan Komparatif (<i>Comparative Advantage</i> : Model Hechsher & Ohlin)	58
	Ongkos Oportunity (<i>Oportunity Cost</i>)	58
	Keunggulan Kompetitif (<i>Competitive Advantage</i> : Michael E.Porter)	62
	Teori Permainan (Game Theory)	63
BAB IV	KEBIJAKAN EKONOMI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	69
	Pengertian Kebijakan Ekonomi Internasional	69
	Instrumen Kebijakan Ekonomi Internasional	69
	Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional	78
	Macam-Macam Restriksi (Ketetapan) dalam Perdagangan Internasional	79
	Hambatan-Hambatan dalam Perdagangan Internasional	82
	GATT (General Aggrement on Trade and Tariffs)	84
BAB V	PERHITUNGAN NILAI TUKAR	87
	Net Barter Terms of Trade	87
	Income Terms of Trade	89
	Gross Barter Term of Trade	90
	Income/Capacity Terms of Trade	91
	Factorial Terms of Trade	92

Terms of Trade dan Kebijakan Perdagangan	93
BAB VI NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT)	95
Defenisi Neraca Pembayaran	95
Pos-Pos Neraca Pembayaran	99
Masalah dan Analisis Neraca Pembayaran	108
Mekanisme dan Pengaruh Neraca Pembayaran	111
Neraca Pembayaran Indonesia	113
Neraca Perdagangan Indonesia	117
BAB VII NERACA TRANSAKSI BERJALAN	119
Neraca Transaksi Berjalan (Neraca Perdagangan dan Jasa)	119
Kebijakan Devaluasi	122
Kebijakan Valuta Asing/Foreign Currency/ Foreign Exchange	126
Pengawasan Devisa (Exchange Control)	130
BAB VIII SISTEM MONETER INTERNASIONAL	132
Pengertian Sistem Moneter Internasional	132
Perkembangan Sistem Moneter Internasional	134
Sistem Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Mata Uang	140
Kelemahan Sistem Moneter Internasional	148
BAB IX GLOBALISASI EKONOMI	153
Pengertian Globalisasi dan Globalisasi Ekonomi	153
Liberalisasi Perdagangan	158
Dampak Globalisasi Perdagangan	160

	Internasional Bagi Negara Dunia Ketiga	
	Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia	160
BAB X	PERANAN EKONOMI LUAR NEGERI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	168
	Devisa	169
	Ekspor Migas dan Non Migas	174
	Impor dan Substitusi Impor	179
	DAFTAR PUSTAKA	187

BAB I

SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL

Sejarah Ekonomi Internasional (Jalur Sutra)

Jalur Sutra adalah sebuah jalur berseri melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang'an, Tiongkok, dengan Antiokia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pengaruhnya menggaung hingga ke Korea dan Jepang. Pertukaran ini sangat penting tak hanya untuk pengembangan kebudayaan Tiongkok, India dan Roma namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah 'jalur sutra' pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19. Jalur Sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan begitu dia meluas dari pusat perdagangan Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan, rute utara melewati Bulgar-Kypchak ke Eropa Timur

dan Semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venezia; rute selatan melewati Turkestan-Khurasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antiokia di Selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Hubungan jalan rel yang hilang dalam Jalur Sutra diselesaikan pada 1992, ketika jalan rel internasional Almaty - Urumqi dibuka.

Sejarah Ilmu Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata “ekonomi” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani: (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (*nomos*), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat digolongkan dalam beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, *mainstream vs heterodox*, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik,

kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia.

Sistem ekonomi dalam masyarakat di suatu negara pada hakekatnya tercipta sebagai

konsekuensi logis dalam pemenuhan kebutuhan dimensi material yang ada di dalam tiap-tiap diri individu, khususnya kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan material tiap-tiap individu, maka

diciptakan sistem sosial yaitu sistem ekonomi yang berada di bawah regulasi suatu pemerintahan negara. Sistem ekonomi berfungsi memajemen barang dan jasa dengan tujuan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan primer. Manajemen barang lebih terkait dengan sumber daya alam (*natural resources*) baik yang bisa maupun tidak bias diperbaharui, sedangkan manajemen jasa lebih terkait dengan faktor sumber daya manusia (*human resources*) tentang sejauh mana kapabilitas dan intelektualitas manusia (*human power*) dalam memajemen sub-sub sistem ekonomi.

Ada sebuah peningkatan trend untuk mengimplementasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah “pembuatan keputusan” dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

Banyak ahli ekonomi *mainstream* merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?”

The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction.

Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya *Wealth of Nations*, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutama yang tertuang dalam *The Theory of Moral Sentiments*. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya *invisible hand* dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini.

Konsep *invisible hand* ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami keagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling “bertarung” dalam dunia

ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya seperti: new classical, neo klasik, new keynesian, monetarist, dan lain sebagainya. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dkk dan kemudian oleh peraih nobel Douglass C. North. Sering disebut sebagai *The queen of social sciences*, ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri, yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model *General equilibrium* (keseimbangan umum), yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat, dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Di lain pihak, metode kualitatif juga sama berkembangnya terutama didorong oleh keterbatasan metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah.

Sejarah Perkembangan Teori Ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan diantaranya antara yang bersifat "natural" atau "unnatural". Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatas jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi un-natural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan un-natural tak terbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain yaitu pemenuhan kebutuhan. Contoh

dati transaksi ini disebutkan adalah perdagangan moneter dan retail yang dia ejek sebagai “unnatural” dan bahkan tidak bermoral.

Pandangannya ini kelak akan banyak dipuji oleh para penulis Kristen di Abad Pertengahan. Aristotle juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan dapat memberi peluang seseorang untuk melakukan kebajikan dan memberikan derma dan cinta sesama yang merupakan bagian dari “jalan emas” dan “kehidupan yang baik ala Aristotle. Chanakya (c. 350-275 BC) adalah tokoh berikutnya. Dia sering mendapat julukan sebagai Indian Machiavelli. Dia adalah professor ilmu politik pada Takshashila University dari India kuno dan kemudian menjadi Prime Minister dari kerajaan Mauryan yang dipimpin oleh Chandragupta Maurya. Dia menulis karya yang berjudul Arthashastra (Ilmu mendapatkan materi) yang dapat dianggap sebagai pendahulu dari Machiavelli’s *The Prince*. Banyak masalah yang dibahas dalam karya itu masih relevan sampai sekarang, termasuk diskusi tentang bagaimana konsep manajemen yang efisien dan solid, dan juga masalah etika di bidang ekonomi. Chanakya juga berfokus pada isu kesejahteraan seperti redistribusi kekayaan pada kaum papa dan etika kolektif yang dapat mengikat kebersamaan masyarakat.

Tokoh pemikir Islam juga memberikan sumbangsih pada pemahaman di bidang ekonomi. Ibnu Khaldun dari Tunis (1332-1406) menulis masalah teori ekonomi dan politik dalam karyanya *Prolegomena*, menunjukkan bagaimana kepadatan populasi adalah terkait dengan pembagian tenaga kerja yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sebaliknya mengakibatkan pada penambahan populasi dalam sebuah lingkaran. Dia juga memperkenalkan konsep yang biasa disebut dengan Khaldun-Laffer Curve (keterkaitan antara tingkat pajak dan pendapatan pajak dalam kurva berbentuk huruf U). Perintis pemikiran barat di bidang ekonomi terkait dengan debat scholastic theological selama Middle

Ages. Masalah yang penting adalah tentang penentuan harga barang. Penganut Katolik dan Protestan terlibat dalam perdebatan tentang apa itu yang disebut “harga yang adil” di dalam ekonomi pasar. Kaum skolastik Spanyol di abad 16 mengatakan bahwa harga yang adil tak lain adalah harga pasar umum dan mereka umumnya mendukung filsafat *laissez faire*.

Selanjutnya pada era *Reformation* pada 16th century, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh Hugo de Groot atau Grotius. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir *Middle Ages* dan awal *Renaissance* adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feodal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (*guild*) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda.

Niccolò Machiavelli dalam karyanya *The Prince* adalah penulis pertama yang menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia melakukannya dengan menyatakan bahwa para bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu maka negara akan dilihat sebagai “murah hati” karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Selama masa *Early Modern period*, *mercantilists* hampir dapat merumuskan suatu teori ekonomi tersendiri. Perbedaan ini tercermin dari munculnya negara bangsa di kawasan Eropa Barat yang menekankan pada balance of payments. Tahap ini kerap kali

disebut sebagai tahap paling awal dari perkembangan *modern capitalism* yang berlangsung pada periode antara abad 16th dan 18th, kerap disebut sebagai *merchant capitalism* dan *mercantilism*. Babakan ini terkait dengan *geographic discoveries* oleh *merchant overseas traders*, terutama dari *England* dan *Low Countries*; *European colonization of the Americas*; dan pertumbuhan yang cepat dari perdagangan luar negeri. Hal ini memunculkan kelas *bourgeoisie* dan menenggelamkan *feudal system* yang sebelumnya.

Mercantilism adalah sebuah sistem perdagangan untuk profit, meskipun produksi masih dikerjakan dengan *non-capitalist production methods*. Karl Polanyi berpendapat bahwa

capitalism belum muncul sampai berdirinya *free trade* di *Britain* pada 1830s. Di bawah *mercantilism*, *European merchants*, diperkuat oleh sistem control dari negara, *subsidies*, and *monopolies*, menghasilkan kebanyakan profits dari jual-beli bermacam barang. Dibawah *mercantilism*, *guilds* adalah pengatur utama dari ekonomi. Dalam kalimat Francis Bacon, tujuan dari *mercantilism* adalah:

the opening and well-balancing of trade; the cherishing of manufacturers; the banishing of idleness; the repressing of waste and excess by sumptuary laws; the improvement and husbanding of the soil; the regulation of prices..."

Di antara berbagai *mercantilist theory* salah satunya adalah *bullionism*, doktrin yang menekankan pada pentingnya akumulasi *precious metals*. *Mercantilists* berpendapat bahwa negara seharusnya mengekspor barang lebih banyak dibandingkan jumlah yang diimport sehingga luar negeri akan membayar selisihnya dalam bentuk *precious metals*. *Mercantilists* juga berpendapat bahwa bahan mentah yang tidak dapat ditambang dari dalam negeri maka harus diimport, dan mempromosikan subsidi, seperti penjaminan

monopoli *protective tariffs*, untuk meningkatkan produksi dalam negeri dari *manufactured goods*.

Para perintis mercantilism menekankan pentingnya kekuatan negara dan penaklukan luar negeri sebagai kebijakan utama dari economic policy. Jika sebuah negara tidak mempunyai supply dari bahan mentahnya maka mereka harus mendapatkan koloni darimana mereka dapat mengambil bahan mentah yang dibutuhkan. Koloni berperan bukan hanya sebagai penyedia bahan mentah tapi juga sebagai pasar bagi barang jadi. Agar tidak terjadi suatu kompetisi maka koloni harus dicegah untuk melaksanakan produksi dan

berdagang dengan pihak asing lainnya. Selama the Enlightenment, physiocrats Perancis adalah yang pertama kali memahami ekonomi berdiri sendiri. Salah satu tokoh yang terpenting adalah Francois Quesnay. Diagram ciptaannya yang terkenal, *tableau economique*, oleh kawan-kawannya dianggap sebagai salah satu temuan ekonomi terbesar setelah tulisan dan uang.

Diagram zig-zag ini dipuji sebagai rintisan awal bagi pengembangan banyak tabel dalam ekonomi modern, ekonometrik, multiplier Keynes, analisis input-output, diagram aliran sirkular dan model keseimbangan umum Walras. Tokoh lain dalam periode ini adalah Richard Cantillon, Jaques Turgot, dan Etienne Bonnot de Condillac. Richard Cantillon (1680-1734) oleh beberapa sejarawan ekonomi dianggap sebagai bapak ekonomi yang sebenarnya. Bukunya *Essay on the Natur of Commerce* ini General (1755, terbit setelah dia wafat) menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni penawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflasi moneter "pra-Austrian" yang canggih yakni tentang bagaimana inflasi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran.

Jaques Turgot (1727-81) adalah pendukung *laissez faire*, pernah menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Louis XVI dan membubarkan serikat kerja (*guild*), menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Dia terkenal dekat dengan raja meskipun akhirnya dipecat pada 1776. Karyanya *Reflection on the Formation and Distribution of Wealth* menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian. Sebagai seorang *physiocrats*, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Karyanya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan suku bunga, dan peran *entrepreneur-kapitalis* dalam ekonomi kompetitif.

Etienne Bonnot de Condillac (1714-80) adalah orang yang membela Turgot di saat-saat sulit tahun 1775 ketika dia menghadapi kerusuhan pangan saat menjabat sebagai menteri keuangan. Condillac juga merupakan seorang pendukung perdagangan bebas. Karyanya *Commerce and Government* (terbit sebulan sebelum *The Wealth of Nation*, 1776) mencakup gagasan ekonomi yang sangat maju. Dia mengakui manufaktur sebagai sektor produktif, perdagangan sebagai representasi nilai yang tak seimbang dimana kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan, dan mengakui bahwa harga ditentukan oleh nilai guna, bukan nilai kerja. Tokoh lainnya, Anders Chydenius (1729-1803) menulis buku *The National Gain* pada 1765 yang menerangkan ide tentang kemerdekaan dalam perdagangan dan industri dan menyelidiki hubungan antara ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar *liberalism*, sebelas tahun sebelum Adam Smith menulis hal yang sama namun lebih komprehensif dalam *The Wealth of Nations*. Menurut Chydenius, *democracy*, kesetaraan dan penghormatan pada hak asasi manusia adalah jalan satu-satunya untuk kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat.

Mercantilism mulai menurun di Great Britain pada pertengahan 18th, ketika sekelompok *economic theorists*, dipimpin oleh Adam Smith, menantang dasar-dasar mercantilist doctrines yang berkeyakinan bahwa jumlah keseluruhan dari kekayaan dunia ini adalah tetap sehingga suatu negara hanya dapat meningkatkan kekayaannya dari pengeluaran negara lainnya. Meskipun begitu, di negara-negara yang baru berkembang seperti Prussia dan Russia, dengan pertumbuhan manufacturing yang masih baru, mercantilism masih berlanjut sebagai paham utama meskipun negara-negara lain sudah beralih ke paham yang lebih baru. Pemikiran ekonomi modern biasanya dinyatakan dimulai dari terbitnya Adam Smith's *The Wealth of Nations*, pada 1776, walaupun pemikir lainnya yang lebih dulu juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Ide utama yang diajukan oleh Smith adalah kompetisi antara berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa karena hal itu akan mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi dan peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap. Smith's thesis berkeyakinan bahwa sebuah sistem besar akan mengatur dirinya sendiri dengan menjalankan aktivitas-aktivitas masing-masing bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus mendapatkan arahan tertentu. Hal ini yang biasa disebut sebagai "*invisible hand*" dan masih menjadi pusat gagasan dari ekonomi pasar dan capitalism itu sendiri. Smith adalah salah satu tokoh dalam era *Classical Economics* dengan kontributor utama John Stuart Mill and David Ricardo. John Stuart Mill, pada awal hingga pertengahan abad 19th, berfokus pada "wealth" yang didefinisikannya secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar obyek atau yang sekarang disebut dengan price. Pertengahan abad 18th menunjukkan peningkatan pada industrial capitalism, memberi kemungkinan bagi akumulasi modal yang luas di bawah fase perdagangan dan investasi pada mesin-mesin produksi. Industrial capitalism, yang dicatat oleh Marx mulai dari

pertigaan akhir abad 18th, menandai perkembangan dari *the factory system of manufacturing*, dengan ciri utama *complex division of labor* dan *routinization of work tasks*; dan akhirnya memantapkan dominasi global dari capitalist mode of production.

Hasil dari proses tersebut adalah Industrial Revolution, dimana industrialist menggantikan posisi penting dari merchant dalam capitalist system dan mengakibatkan penurunan *traditional handicraft skills* dari *artisans, guilds, dan journeymen*. Juga selama masa ini, capitalism menandai perubahan hubungan antara *British landowning gentry* dan *peasants*, meningkatkan produksi dari cash crops untuk pasar lebih daripada yang digunakan untuk feudal manor. Surplus ini dihasilkan dengan peningkatan commercial agriculture sehingga mendorong peningkatan *mechanization of agriculture*. Peningkatan industrial capitalism juga terkait dengan penurunan mercantilism. Pertengahan hingga akhir abad sembilan belas Britain dianggap sebagai contoh klasik dari *laissez-faire* capitalism. *Laissez-faire* mendapatkan momentum oleh mercantilism di Britain pada 1840s dengan persetujuan *Corn Laws* dan *Navigation Acts*. Sejalan dengan ajaran classical political economists, dipimpin oleh Adam Smith dan David Ricardo, Britain memunculkan liberalism, mendorong kompetisi dan perkembangan market economy.

Pada abad 19th, Karl Marx menggabungkan berbagai aliran pemikiran meliputi distribusi social dari sumber daya, mencakup karya Adam Smith, juga pemikiran socialism dan egalitarianism, dengan menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel untuk menghasilkan *Das Kapital*. Ajarannya banyak dianut oleh mereka yang mengkritik ekonomi pasar selama abad 19th dan 20th. Ekonomi Marxist berlandaskan pada labor theory of value yang dasarnya ditanamkan oleh *classical economists* (termasuk Adam Smith) dan kemudian dikembangkan oleh Marx. Pemikiran Marxist beranggapan bahwa

capitalism adalah berlandaskan pada exploitation kelas pekerja: pendapatan yang diterima mereka selalu lebih rendah dari nilai pekerjaan yang dihasilkannya, dan selisih itu diambil oleh capitalist dalam bentuk profit. Pada akhir abad 19th, kontrol dan arah dari industri skala besar berada di tangan financiers. Masa ini biasa disebut sebagai “*finance capitalism*,” dicirikan dengan subordination proses produksi ke dalam accumulation of money profits dalam financial system. Penampakan utama capitalism pada masa ini mencakup establishment of huge industrial cartels atau monopolies; kepemilikan dan management dari industry oleh financiers berpisah dari *production process*; dan pertumbuhan dari complex system banking, sebuah equity market, dan corporate memegang capital melalui kepemilikan stock. Tampak meningkat juga industri besar dan tanah menjadi *subject of profit dan loss* oleh *financial speculators*. Akhir abad 19th juga muncul “*marginal revolution*” yang meningkatkan dasar pemahaman ekonomi mencakup konsep-konsep seperti *marginalism* dan *opportunity cost*.

Lebih lanjut, Carl Menger menyebarkan gagasan tentang kerangka kerja ekonomi sebagai *opportunity cost* dari keputusan yang dibuat pada *margins of economic activity*. Akhir 19th dan awal 20th capitalism juga disebutkan sebagai era “*monopoly capitalism*,” ditandai oleh pergerakan dari *laissez-faire phase of capitalism* menjadi the concentration of capital hingga mencapai large monopolistic atau *oligopolistic holdings* oleh *banks and financiers*, dan dicirikan oleh pertumbuhan corporations dan pembagian labor terpisah dari *shareholders, owners, dan managers*. Perkembangan selanjutnya ekonomi menjadi lebih bersifat statistical, dan studi tentang econometrics menjadi penting. Statistik memperlakukan price, unemployment, money supply dan variabel lainnya serta perbandingan antar variabel-variabel ini, menjadi sentral dari penulisan ekonomi dan menjadi bahan diskusi utama dalam lapangan ekonomi. Pada quarter terakhir abad 19th, kemunculan

dari *large industrial trusts* mendorong legislation di U.S. untuk mengurangi *monopolistic tendencies* dari masa ini. Secara berangsur-angsur, *U.S. federal government* memainkan peranan yang lebih besar dalam menghasilkan antitrust laws dan regulation of industrial standards untuk *key industries of special public concern*. Pada akhir abad 19th, *economic depressions* dan boom and bust business cycles menjadi masalah yang tak terselesaikan. *Long Depression* dari 1870s dan 1880s dan *Great Depression* dari 1930s berakibat pada nyaris keseluruhan *capitalist world*, dan menghasilkan pembahasan tentang prospek jangka panjang *capitalism*. Selama masa 1930s, *Marxist commentators* seringkali meyakinkan kemungkinan penurunan atau kegagalan *capitalism*, dengan merujuk pada kemampuan *Soviet Union* untuk menghindari akibat dari *global depression*. Macroeconomics mulai dipisahkan dari microeconomics oleh John Maynard Keynes pada 1920s, dan menjadi kesepakatan bersama pada 1930s oleh Keynes dan lainnya, terutama John Hicks. Mereka mendapat ketenaran karena gagasannya dalam mengatasi *Great Depression*. Keynes adalah tokoh penting dalam gagasan pentingnya keberadaan *central banking* dan campur tangan pemerintah dalam hubungan ekonomi. Karyanya "*General Theory of Employment, Interest and Money*" menyampaikan kritik terhadap ekonomi klasik dan juga mengusulkan metode untuk *management of aggregate demand*. Pada masa sesudah global depression pada 1930s, negara memainkan peranan yang penting pada *capitalistic system* di hampir sebagian besar kawasan dunia.

Pada 1929, sebagai contoh, total pengeluaran *U.S. government* (*federal, state, and local*) berjumlah kurang dari sepersepuluh dari GNP; pada 1970s mereka berjumlah mencapai sepertiga. Peningkatan yang sama tampak pada *industrialized capitalist economies*, seperti France misalnya, telah mencapai *ratios of government expenditures* dari GNP yang lebih tinggi dibandingkan *United States*. Sistem *economies* ini seringkali disebut dengan "*mixed economies*."

Selama periode *postwar boom*, penampakan yang luasa dari *new analytical tools* dalam *social sciences* dikembangkan untuk menjelaskan *social* dan *economic trends* dari masa ini, mencakup konsep *post-industrial society* dan *welfare statism*. Fase dari *capitalism* sejak awal masa *postwar* hingga 1970s memiliki sesuatu yang kerap disebut sebagai “*state capitalism*”, terutama oleh *Marxian thinkers*. Banyak *economists* menggunakan kombinasi dari *Neoclassical microeconomics* dan *Keynesian macroeconomics*. Kombinasi ini, yang sering disebut sebagai *Neoclassical synthesis*, dominan pada pengajaran dan kebijakan publik pada masa sesudah *World War II* hingga akhir 1970s. pemikiran *neoclassical* mendapat bantahan dari *monetarism*, dibentuk pada akhir 1940s dan awal 1950s oleh Milton Friedman yang dikaitkan dengan *University of Chicago* dan juga *supply-side economics*.

Pada akhir abad 20th terdapat pergeseran wilayah kajian dari yang semula berbasis *price* menjadi berbasis *risk*, keberadaan pelaku ekonomi yang tidak sempurna dan perlakuan terhadap ekonomi seperti *biological science*, lebih menyerupai norma *evolutionary* dibandingkan pertukaran yang *abstract*. Pemahaman akan *risk* menjadi signifikan dipandang sebagai variasi *price over time* yang ternyata lebih penting dibanding *actual price*. Hal ini berlaku pada *financial economics* dimana *risk-return tradeoffs* menjadi keputusan penting yang harus dibuat. Masa *postwar boom* yang lama berakhir pada 1970s dengan adanya *economic crises experienced* mengikuti 1973 *oil crisis*. “*stagflation*” dari 1970s mendorong banyak *economic commentators politicians* untuk memunculkan *neoliberal policy* diilhami oleh *laissez-faire capitalism* dan *classical liberalism* dari abad 19th, terutama dalam pengaruh Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Terutama, *monetarism*, sebuah *theoretical alternative* dari *Keynesianism* yang lebih *compatible* dengan *laissez-faire*, mendapat dukungan yang meningkat *increasing* dalam *capitalist world*, terutama dibawah kepemimpinan Ronald Reagan di U.S. dan Margaret Thatcher di

UK pada 1980s. Area perkembangan yang paling pesat kemudian adalah studi tentang informasi dan keputusan. Contoh pemikiran ini seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz. Masalah-masalah ketidakseimbangan informasi dan kejahatan moral dibahas disini seperti karena mempengaruhi *modern economic* dan menghasilkan dilema-dilema seperti *executive stock options*, *insurance markets*, dan *Third-World debt relief*.

Sejarah Merkantilisme

Merkantilis periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor (dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar).

Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern (dari abad ke-16 sampai ke-18,

era dimana kesadaran bernegara sudah mulai timbul). Peristiwa ini memicu, untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada jaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan dikalangan negara Eropa dan era imperialism Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Merkantilis periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara.

Merkantilis periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara. Saat ini, semua ahli ekonomi Eropa antara tahun 1500 sampai tahun 1750 dianggap sebagai merkantilis meskipun ketika itu istilah '*merkantilis*' belum dikenal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau pada tahun [1763], dan kemudian dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Pada kenyataannya, Adam Smith menjadi orang pertama kali menyebutkan kontribusi merkantilis terhadap ilmu ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*. Istilah merkantilis sendiri berasal dari bahasa Latin *mercari*, yang berarti "untuk mengadakan pertukaran," yang berakar dari kata *merx*, berarti "komoditas." Kata merkantilis pada awalnya digunakan oleh para kritikus seperti Mirabeau dan Smith saja, namun kemudian kata ini juga digunakan dan diadopsi oleh para sejarawan.

Sejarah Kapitalisme

Kapitalisme tidak memiliki suatu definisi universal yang bisa diterima secara luas, namun secara umum merujuk pada satu atau beberapa hal berikut: (1) sebuah sistem yang mulai terinstitusikan di Eropa pada masa abad ke-16 hingga abad ke-19 - yaitu di masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan di mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas kewajibannya baik eksplisit maupun implisit serta tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan perlindungan yang diberikan oleh kekuasaan feodal; (2) teori yang saling bersaing yang berkembang pada abad ke-19 dalam konteks Revolusi Industri, dan abad ke-20 dalam konteks Perang Dingin, yang berkeinginan untuk membenarkan kepemilikan modal, untuk menjelaskan pengoperasian pasar semacam itu, dan untuk membimbing penggunaan atau penghapusan peraturan pemerintah mengenai hak milik dan pasaran; (3) suatu keyakinan mengenai keuntungan dari menjalankan hal-hal semacam itu.

Pengertian Lain dari Kapitalisme, khususnya dalam ilmu ekonomi berkaitan dengan produksi dan distribusi, dua hal yang membangkitkan munculnya ekonomi internasional. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Ciri-ciri Kapitalisme dalam lingkup ini adalah:

1. Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu.
2. Barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif.
3. modal kapital (baik uang maupun kekayaan lain) diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*).

Sejarah Liberalisme dan Pasar Bebas

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalism mengusahakan suatu masyarakat yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha

pribadi (*private enterprise*) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya hak-hak kaum minoritas dijamin. Dalam masyarakat modern, kaum liberal lebih menyukai demokrasi liberal dengan pemilihan umum yang terbuka dan adil, di mana semua warga negara mempunyai hak yang sederajat oleh hokum dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu “‘Liberalisme’ didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.”.

Selanjutnya, menurut Lord Acton, “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton.

Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (*enlightened*) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas." yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela, dan oleh karena itu tanpa maling. Ekonomi pasar bebas adalah ekonomi di mana pasar relatif bebas. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme.

Sejarah Neo-Liberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi

kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi. Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat prakapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas. Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-orang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan. Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, atautkah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan

hak-hak tsb dengan memperkecil turut campurnya aturan pihak lain, “kita berhak menjalankan kehidupan sendiri” Saat ini, ekonom seperti Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis.

Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih ‘dikuasai’ wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan. Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutusekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas

menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics”. Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”. Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi

berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bias dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional

atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah. Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.

Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen Keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan

liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal

telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penandatanganan *Letter Of Intent* (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah neoliberalisme dihubungkan dengan dukungan untuk perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak dengan tentangan terhadap Keynesianism atau environmentalism. Dalam konteks AS, misalnya, ekonom Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia mendukung Keynesian, income redistribution, dan pengkritik pemerintahan George W. Bush. Dalam penggunaan AS, neoliberalisme (“liberalisme baru”) biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan, walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-

of-left (seperti halnya di Kanada di abad ke-20). Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. *The overlapping of these usages can create considerable confusion*. Dalam penggunaan internasional, presiden Ronald Reagan dan United

States Republican Party dipandang sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, di mana istilah ini biasanya diterapkan pada Democrats seperti Democratic Leadership Council.

Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka. Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi “pembebasan arus modal” tetapi tidak ada pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah “perlombaan menuju dasar” dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

Para Tokoh Neo-Liberalisme

Milton Friedman (31 Juli 1912 – 16 November 2006) adalah ekonom Amerika dan intelektual publik. Ia meninggal di San Francisco (California), karena gagal jantung. Lahir di New York, ia adalah bungsu empat bersaudara dari anak keluarga imigran Yahudi asal Ukraina. Ia telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makro-ekonomi, mikro-ekonomi, sejarah ekonomi, dan

statistik kepengacaraan kapitalisme laissezfaire. Pada 1976, dia mendapat Penghargaan Hadiah Nobel “untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi”. Sebagai ahli ekonomi yang legendaris dan memperjuangkan kebebasan individu, ia telah mempengaruhi kebijakan ekonomi tiga Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan serta Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Dalam buku-bukunya, kolom Majalah *Newsweek*, dan sebuah show televisi publik, ia memperjuangkan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Pejabat-pejabat Amerika Serikat memuji sumbangannya yang telah menyampaikan kepada jutaan orang sebuah pengertian manfaat ekonomi dari pasar bebas yang kompetitif. Ia sempat melihat pembaharuan pasar bebas menyebar ke bekas dunia komunis dan Amerika Latin.

Monopoli, Oligopoli, Monopsoni, Oligopsoni

Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: *monos*, satu + *polein*, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi (pengganti) produk tersebut atau – lebih buruk lagi – mencarinya di pasar gelap (*black market*).

Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan dengan beberapa cara; salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya. Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai satu satunya produsen di pasar.

Pasar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoly umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan

perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat diperoleh dari homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel.

Oligopsoni, adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Monopsoni, adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi Monopsoni sering terjadi didaerah-daerah Perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Perlu diteliti lebih jauh dampak fenomena ini, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Monopsoni sehingga tingkat kesejahteraan petani berpengaruh. Salah satu contoh monopsoni juga adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan Kereta Api di Indonesia hanya ada satu yakni KAI, oleh karena itu, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh KAI.

BAB II

GAMBARAN UMUM EKONOMI INTERNASIONAL

Ekonomi Internasional dan Ilmu Ekonomi

Untuk memulai mempelajari ekonomi internasional sudah semestinya kita awali dengan menelaah terlebih dahulu dengan apa ekonomi internasional dan bagaimana kedudukan ekonomi internasional itu dalam Ilmu Ekonomi. Secara garis besar Ilmu Ekonomi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Ilmu ekonomi deskriptif (*descriptive economics*): ilmu ekonomi yang menerangkan dan menguraikan fenomena-fenomena ekonomi yang ada.
2. Ilmu ekonomi teori (*theory economics*): ilmu ekonomi yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ilmu ekonomi teori ini dipecah menjadi dua, yaitu: Teori Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro.
3. Ilmu ekonomi Terapan (*applied economics*): ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan dasar-dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab-sebab dan pentingnya kejadian dalam ekonomi deskriptif.

Berdasarkan pembagian ilmu ekonomi seperti di atas, maka Ilmu Ekonomi Internasional menurut materi pembahasannya dapat dikatakan meliputi ketiga bagian ilmu ekonomi tersebut di atas.

Artinya dalam pembahasan ilmu ekonomi internasional terdapat pokok-pokok bahasan yang bersifat deskriptif, teori maupun penerapan. Unsur-unsur ekonomi deskriptif akan Anda jumpai pada saat Anda mempelajari bab-bab yang berhubungan dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional dan regional, seperti: *International Monetary Fund*, *World Bank* atau *International Bank for Reconstruction and Development*, *World Trade Organisation*, dan *Association of Southeast Asian Nations*. Unsur-unsur ekonomi teori antara lain dapat Anda jumpai pada teori-teori yang mengemukakan tentang terjadinya perdagangan antarnegara, seperti teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, Teori Keunggulan Komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo maupun John Stuart Mill. Sedangkan ekonomi terapan dapat Anda jumpai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan internasional atau kebijakan ekonomi luar negeri.

Sedangkan Ilmu Ekonomi Internasional adalah suatu bidang studi yang mempelajari implikasi-implikasi perdagangan internasional baik barang maupun jasa dan investasi atau keuangan internasional. Secara garis besar terdapat dua subbidang studi dalam ekonomi internasional, yaitu: perdagangan internasional dan keuangan internasional.

Adapun pengertian dari perdagangan internasional adalah suatu bidang studi yang mengaplikasikan model-model ekonomi mikro untuk membantu pemahaman ekonomi internasional. Di mana dalam perdagangan internasional ini antara lain mencakup alat-alat dan instrumen yang Anda kenal dalam mata kuliah mikro ekonomi yaitu: analisis permintaan dan penawaran, perilaku produsen dan konsumen, persaingan sempurna, oligopoli dan struktur pasar monopolistik serta efek distorsi pasar.

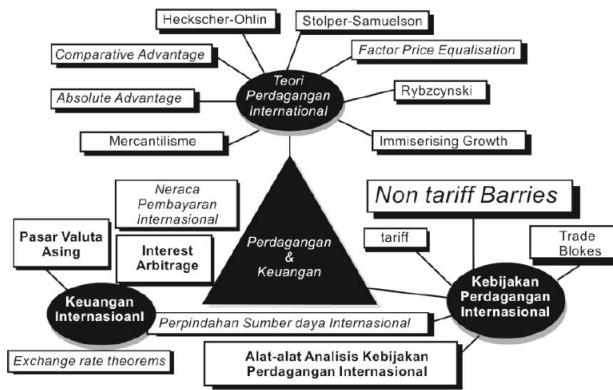
Tujuan dari bidang studi perdagangan internasional ini adalah untuk memahami efek pada perseorangan dan bisnis perdagangan internasional itu sendiri, perubahan dalam kebijakan perdagangan dan perubahan kondisi-kondisi ekonomi. Selain mengelaborasi argumen-argumen yang mendukung kebijakan perdagangan bebas, perdagangan internasional juga membahas argumen-argumen yang mendukung berbagai jenis kebijakan proteksionis. Isu-isu yang banyak dibicarakan dalam perdagangan internasional antara lain adalah:

1. Mengapa negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan apa yang diekspor dan apa yang diimpor oleh masing-masing negara?
3. Keuntungan (atau kerugian) apa yang diperoleh dari perdagangan?
4. Apa peranan kebijakan perdagangan?
5. Apa konsekuensi imigrasi?
6. Apa efek blok perdagangan pada kesejahteraan negara anggota dan dunia?

Sub-bidang studi yang kedua yaitu keuangan internasional (*international finance*) yang mengaplikasikan model-model makro ekonomi untuk membantu memahami variabel-variabel, seperti GDP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, neraca perdagangan, kurs, dan tingkat suku bunga. Subbidang studi ini melebarkan cakupan makro ekonomi hingga mencakup pertukaran internasional. Sedangkan materinya terfokus pada neraca pembayaran internasional, determinan-determinan kurs dan efek kebijakan fiskal dan moneter.

Untuk memberikan gambaran mengenai garis besar cakupan ilmu ekonomi internasional berikut ini disajikan diagram yang menggambarkan secara umum apa saja yang menjadi bagian-bagian dalam pembahasan Ilmu Ekonomi Internasional yang terbagi

kedalam dua subpokok tema, yaitu perdagangan internasional dan keuangan internasional.



Gambar 1.1

Struktur Ilmu Ekonomi Internasional

Setelah mengetahui kedudukan Ilmu Ekonomi Internasional dalam lingkup ilmu ekonomi, sekarang dapatkah Anda memberi alasan mengapa kita perlu mempelajari ekonomi internasional sebagai bidang studi khusus? Jawaban dari pertanyaan tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut: Kita perlu mempelajari ekonomi internasional sebagai suatu bidang studi khusus karena alasan-alasan sebagai berikut.

1. Dunia di mana kita tinggal terdiri dari banyak negara (kurang lebih 187 negara).
2. Batasan politik cenderung memisahkan pasar yang akan menyebabkan perbedaan harga, dan perbedaan harga merupakan insentif adanya perdagangan.
3. Tiap-tiap negara memiliki mata uangnya sendiri-sendiri. Sehubungan dengan hal ini maka masalah-masalah yang

berkenaan dengan neraca pembayaran internasional dan kurs harus ditangani.

4. Faktor-faktor produktif seperti tenaga kerja dan kapital mobilitas antarnegaranya relatif lebih rendah dibandingkan dengan mobilitas barang-barang.
5. Pemerintah suatu negara dapat menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, sementara daerah regional tidak dapat menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu pemerintah suatu negara juga dapat menetapkan pembatas-pembatas perdagangan, seperti tarif dan kuota.
6. Kontrol terhadap perusahaan multinasional

Pengertian Ekonomi Internasional

Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumberdaya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumberdaya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya baik antar dua negara atau antar beberapa negara.

Banyak bentuk hubungan dalam kaitannya dengan ekonomi internasional ini, yang meliputi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi pihak pemerintah, swasta maupun organisasi internasional. Ekonomi internasional mencakup beberapa aspek baik aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional (ekspor-impor), dimana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, juga meliputi

transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral serta neraca pembayaran. Sedangkan aspek makro ekonomi misalnya menyangkut masalah dimana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja.

Beberapa fakta dalam hubungan ekonomi internasional, antara lain adalah hubungan ekspor-impor barang, kurs beberapa mata uang asing (*valuta*) dan beberapa jenis jasa yang timbul sebagai alat dari adanya hubungan internasional. Fakta-fakta tersebut dengan sendirinya menimbulkan persoalan-persoalan penting terhadap negara-negara yang terlibat didalamnya. Persoalan ekonomi internasional dapat dikatakan muncul sesudah perang dunia pertama. Sesudah berakhirnya perang dunia pertama banyak negara yang mengurangi jumlah impornya dengan alasan untuk mengurangi pengangguran dan melindungi industry-industri dalam negeri yang sedang tumbuh setelah perang. Akibat pengurangan impor yang demikian kerasnya, maka volume perdagangan internasional semakin berkurang dibandingkan sebelum terjadinya perang besar tersebut, dan depresi pun meluas. Sesudah tahun 1993 volume perdagangan internasional meningkat lagi, walaupun tidak setinggi jumlah-jumlah yang pernah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan dari kegiatan ekonomi internasional dapat terjadi dalam bentuk kerjasama, bantu membantu antara negara yang satu dengan negara lainnya. Proses bagaimana ekonomi internasional itu dilaksanakan, apakah sebab-sebabnya, apakah keuntungan dan akibat-akibatnya, semua itu dipersoalkan dan seberapa jauh dapat dipecahkan oleh teori-teori dalam ekonomi internasional.

Ilmu ekonomi internasional memiliki dua aspek, yaitu praktis dan aspek ilmiah. Sisi praktisnya ilmu ekonomi internasional

meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh para subjek ekonomi (perorangan atau badan pemerintahan) dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain. Sisi ilmiahnya ilmu ekonomi internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum, atau sebagai cabang dari ilmu ekonomi umum dan merupakan bagian yang menurut sifat-sifatnya dapat dijadikan sebagai suatu objek yang berdiri sendiri.

Ekonomi internasional banyak berhubungan dengan soal-soal *moneter, konjungtur, pendapatan nasional*, sehingga ilmu ekonomi internasional dapat dikategorikan dalam ekonomi makro, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan (*agregate*).

Adapun hubungan ekonomi antar negara ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Hubungan ekonomi yang berupa pertukaran barang atau jasa satu negara dengan negara yang lain. Misalnya, Indonesia mengekspor tekstil, kayu lapis, mebel, menjual jasa turisme kepada orang asing, dan Indonesia mengimpor gandum, beras, mobil, mesin-mesin industri, menggunakan jasa angkutan laut dan udara dari negara lain.
2. Hubungan ekonomi yang berupa pertukaran atau aliran faktor produksi (tenaga kerja, modal, teknologi dan kewirausahaan). Faktor produksi tersebut dapat berpindah dari satu negara ke negara yang lain karena berbagai sebab, misalnya: karena balas jasa yang lebih menguntungkan, ini faktor produksi yang paling mudah berpindah dari satu negara ke negara yang lain adalah faktor produksi modal beserta teknologi dan kewirausahaan yang melekat di dalamnya.
3. Hubungan ekonomi yang dilihat dari segi hubungan posisi utang-piutang. Suatu negara dapat mempunyai utang ataupun

piutang dengan negara lain. Biasanya hubungan utang piutang ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya dua bentuk hubungan ekonomi yang sudah kita bahas, yaitu hubungan perdagangan dan hubungan pertukaran faktor produksi. Misalnya Indonesia mengimpor mesin industri dari Jerman dengan kredit dari penjualnya. Dalam hal ini hubungan perdagangan dengan mengimpor mesin industri sebagai penyebab timbulnya utang Indonesia kepada pengusaha Jerman.

Ekonomi internasional berkembang dan semakin penting sebagai bagian dalam suatu bidang studi karena pesatnya pertumbuhan pasar ekonomi internasional. Pelaku bisnis, pemerintah dan juga konsumen makin hari makin menyadari bahwa nafas kehidupan mereka semakin dipengaruhi tidak hanya oleh apa yang terjadi di tempat di mana mereka tinggal, di kota mereka, di negara mereka, akan tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di seantero dunia.

Konsumen dapat membeli barang dan jasa dari seluruh penjuru dunia di pasar-pasar lokal. Bahkan dengan semakin majunya dunia teknologi, proses transaksi perdagangan ini dapat dilakukan melalui jaringan maya yang salah satu medianya adalah melalui internet. Bentuk perdagangan seperti ini sering disebut dengan istilah *e-commerce*. Dengan hadirnya *e-commerce* ini semakin meningkatkan jaringan perdagangan dunia karena transaksi dalam *e-commerce* ini relatif tidak terhalang oleh batasan ruang geografis. Karena konsumen dapat membeli barang dan jasa dari seluruh pelosok dunia di pasar lokal maupun melalui jaringan *e-commerce* maka pengusaha lokal harus bersaing dengan barang-barang dan jasa-jasa produk luar negeri. Akan tetapi hal ini juga berarti bahwa usaha-usaha yang sejenis mempunyai kesempatan dan peluang baru untuk melebarkan pasar mereka dengan cara menjual ke berbagai negara. Kemajuan teknologi telekomunikasi memberi efek

positif yaitu mengurangi biaya pelayanan internasional dan *World Wide Web* nampaknya dapat mempercepat ekspansi pasar. Proses globalisasi pasar terus berlangsung. Hal ini memberi pesan pada kita akan makin pentingnya untuk memahami implikasi-implikasi pasar *global market place* pada konsumen, bisnis dan pemerintah.

Tujuan Ekonomi Internasional

Apabila kita membicarakan tujuan ekonomi internasional, maka kita dapat membaginya ke dalam dua bagian yang lebih spesifik, yaitu tujuan teori ekonomi dan tujuan kebijakan ekonomi internasional. Secara umum, tujuan teori ekonomi internasional adalah untuk melakukan prediksi, menguraikan dan menjelaskan prediksi-prediksi tersebut. Artinya, teori ekonomi internasional melakukan abstraksi dari hal-hal rinci di sekitar peristiwa ekonomi untuk memisahkan beberapa variabel dan berbagai hubungan yang dianggap paling penting dalam memprediksi dan menjelaskan peristiwa ekonomi. Sejalan dengan hal ini, dalam penjelasannya teori ekonomi internasional selalu mengasumsikan bahwa dunia terdiri dari dua negara, dua komoditi, dan dua jenis faktor produksi. Selain itu ekonomi internasional juga mengasumsikan tidak terdapatnya pembatasan perdagangan, terjadi mobilitas faktor produksi secara sempurna dalam suatu negara, namun tidak ada mobilitas antarnegara, terdapat persaingan sempurna pada pasar semua jenis komoditi dan faktor produksi, serta tidak terdapat biaya transportasi.

Bila ditinjau dari kebijakannya maka secara garis besar terdapat 6 tujuan utama kebijakan ekonomi internasional, yaitu: autarki (*autarky*), kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*), proteksionisme (*proteksinism*), tingkat *employment* yang stabil (*stable*

levels of high employment), neraca pembayaran yang menguntungkan (*favorable balance of payments*), dan pembangunan ekonomi (*economic development*).

Kebijakan ekonomi internasional terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa isu kontemporer utama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional dewasa ini antara lain: pemeliharaan sistem perdagangan multilateral global, kekompertisian internasional (*international competitiveness*), integrasi ekonomi, proteksionisme baru, munculnya negara-negara industri baru (*newly industrializing countries*, NICs), transisi ekonomi terpusat (*centrally planned economies*) ke ekonomi pasar, ketidakstabilan kurs, beban utang negara-negara sedang berkembang, perlindungan lingkungan, kontrol terhadap perusahaan multinasional.

Mengapa Suatu Negara Perlu Berdagang Dengan Negara Lain?

Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual keluar negeri dengan harga yang relative lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara.

Harga biasanya sangat ditentukan oleh biaya produksi, yang terdiri dari upah, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah serta efisiensi dalam proses produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu antara suatu negara dengan negara lain akan berbeda ongkos produksinya, dengan demikian akan berbeda pula harga hasil produksinya. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan

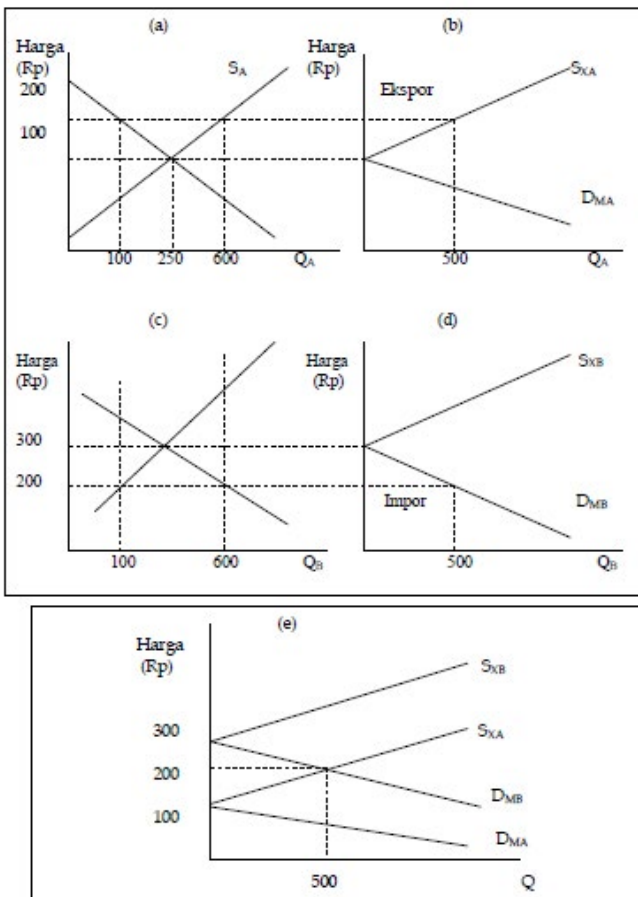
dalam jumlah, jenis, kualitas serta cara-cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut di dalam proses produksi. Perbedaan harga inilah yang menjadi penyebab timbulnya perdagangan antar negara.

Perbedaan harga bukan hanya ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ongkos produksi, tetapi juga karena adanya perbedaan dalam pendapatan serta selera. Permintaan akan sesuatu barang sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Selera dapat memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan akan suatu barang antar berbagai negara. Apabila persediaan suatu barang di satu negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan, negara tersebut dapat mengimpor dari negara lain. Untuk suatu barang tertentu, factor selera dapat memegang peranan penting. Misalnya, mobil, rokok, pakaian, meskipun suatu negara tertentu telah dapat menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena faktor selera, dimana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain.

Selain selera, permintaan akan sesuatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa hubungan antara pendapatan suatu negara dengan pembelian barang luar negeri (impor). Jika pendapatan naik, maka pembelian barang-barang dan jasa (dari dalam negeri maupun impor) dapat mengalami kenaikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah pada prinsipnya ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.

Gambar 1 memperlihatkan contoh satu model sederhana yang menjelaskan terjadinya perdagangan internasional. Anggap saja ada 2 negara, yaitu negara A dan negara B dengan 1 macam barang.

Oleh karena itu analisa ini sifatnya parsial. Harga keseimbangan di Negara A terjadi pada Rp 100,00 per unit. Pada harga dibawah Rp 100,00 akan terjadi kelebihan jumlah yang diminta dimana kelebihan ini merupakan impor Negara A (DMA, Gambar 1b). Pada harga di atas 100,00 per unit akan terjadi kelebihan jumlah yang ditawarkan, dimana kelebihan jumlah yang ditawarkan ini merupakan ekspor Negara A (SXA, gambar 1b). Untuk setiap harga tertentu $S_{XA} = D_A - S_A$ dan $D_{MA} = D_A - S_A$. Pada harga Rp 100,00 $S_A = D_A$.



Gambar 1.
Analisa Parsial Perdagangan Internasional

Untuk negara B, harga keseimbangan terjadi pada harga Rp 300,00 per unit. Kurva permintaan impor dan penawaran ekspor seperti terlihat pada gambar 1.1d, yaitu DMB dan SXB.

Karena harga keseimbangan yang terjadi di negara A berbeda (lebih rendah) dengan negara B maka perbedaan ini membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan internasional. Barang akan mengalir (ekspor) dari negara A ke negara B. Harga barang tersebut di negara A akan naik (karena jumlahnya makin kecil) dan harga di negara B akan turun (karena jumlahnya makin besar), sampai harga akan sama di kedua negara (harga keseimbangan), yakni pada harga Rp 200,00 per unit. Ekspor negara A sama dengan impor negara B, sejumlah 500 unit. Perdagangan tidak terhenti pada harga Rp 200,00 per unit, tetapi terus berlangsung pada volume 500 unit setiap periode dimana pada volume perdagangan ini harga di kedua negara itu sama. Tinggi rendahnya volume perdagangan ini sangat tergantung elastisitas permintaan impor dan penawaran ekspor di kedua negara, yang dapat ditunjukkan dengan lereng kurva SX dan DM.

Perdagangan internasional bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara (fungsi utama), memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi atau belum mampu diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta transfer teknologi modern.

BAB III

TEORI-TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Teori perdagangan internasional yang sampai saat ini masih berkembang secara umumnya dapat dibagi 3 bagian, yaitu; 1. Teori Klasik, 2. Teori Modern dan 3. Teori Keunggulan Kompetitif Secara Umum. Dan sebelumnya teori-teori tersebut ada, sudah berkembang paham kaum merkantilisme terutama di negara-negara Eropa pada abad enam belas dan tujuh belas. Para penganjurnya antara lain, Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin. Mereka beranggapan bahwa:

1. Logam Mulia (*specie*) adalah ukuran kemakmuran suatu negara, semakin banyak memiliki logam mulia maka negara tersebut semakin kaya. Logam mulia diperoleh dari surplus ekspor dari impor. Apabila ekspor lebih besar dari impor maka logam mulia akan mengalir ke dalam negeri lebih banyak.
2. Peranan pemerintah sangat penting dalam perdagangan internasional, dengan kebijaksanaan (*policy*) pemerintah maka akan diperoleh ekspor lebih besar dari impor misalnya tarif kuota dan subsidi dan sebagainya, dipihak lain impor dapat ditekan.

Teori klasik ini mulai berkembang pada abad ke-18. Para pelopornya antara lain: Adam Smith, David Hume dan John Locke dan lain sebagainya, sangat menentang teori tersebut. Logam mulia tak mungkin ditumpuk dengan surplus ekspor karena penumpukan tersebut akan sia-sia. Logam mulia akan mengalir dengan sendirinya

melalui perdagangan internasional (*price specie flow mechanism*). Ekspor naik berarti logam mulia masuk ke dalam negeri akibatnya uang yang beredar bertambah, penambahan tersebut menyebabkan harga dalam negeri naik dan akhirnya logam mulia akan kembali lagi keluar sebagai akibat masuknya barang impor. Adam Smith menginginkan perdagangan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah. Perdagangan bebas akan membuat orang berkerjakeras untuk kepentingan negaranya sendiri dan sekaligus menciptakan spesialisasi. Doktrin *laissez-faire* (campur tangan pemerintah yang minim dan perdagangan bebas dengan negara lain). Jadi dengan adanya spesialisasi, maka negara akan menghasilkan suatu produk yang mempunyai keuntungan mutlak (*absolute advantage*) atau keuntungan komperatif (*comperative advantage*).

Kita akan membahas sedikit tentang pembagian tersebut.

Teori Klasik Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage/ Absolute Cost*: Adam Smith)

Pandangan Teori Klasik berkembang pada abad ke-18. Pelopor teori ini di antaranya adalah Adam Smith. Pandangan ini berpendapat bahwa logam mulia tidak mungkin ditumpuk dengan surplus ekspor karena logam mulia akan mengalir dengan sendirinya melalui perdagangan internasional (*price specie flow mechanism*). Adam Smith menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas, karena perdagangan bebas akan membuat orang bekerja keras untuk kepentingan negaranya sendiri dan sekaligus mendorong terciptanya spesialisasi. Dengan terciptanya spesialisasi maka negara akan menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*).

Dalam pandangan kritisnya, Adam Smith mengemukakan teori *absolute advantage* (keunggulan mutlak) tersebut, di mana negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional (*gain from*

trade) karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara ini memiliki keunggulan mutlak tersebut dan akan mengimpor barang bila tidak memiliki ketidakunggulan mutlak. Walaupun negara yang satu dengan negara lainnya (misalnya Amerika Serikat dengan Kanada) samasama dapat menghasilkan dua jenis barang yang berbeda, tetapi salah satu dari kedua jenis barang tersebut harus dipilih oleh Amerika Serikat atau Kanada, barang mana yang lebih menguntungkan baginya untuk menghasilkan sendiri yang didasarkan atas keuntungan mutlak (*absolute advantage*). Mungkin Amerika mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan barang B, sehingga apabila mereka berdagang akan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan kooperatif harus dilihat dari *output* dan jumlah jam kerja.

Contohnya, kalau Amerika Serikat dapat menghasilkan produk A 1000 unit dalam sehari, sedangkan Kanada hanya 800 unit, maka dikatakan Amerika Serikat mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan produk A. dilihat dari jam kerja kalau untuk barang B, Kanada dapat menghasilkan 20 unit dalam 1 jam sedangkan Amerika Serikat hanya 15 unit, maka Kanada mempunyai keuntungan mutlak dalam produksi produk B.

Tabel 1

Keuntungan Mutlak (jam kerja persatuan output).

Negara	Pakaian (Yard)	Anggur (Barrel)	DTD
Portugis	30	120	1 brl = 4 yard
Inggris	100	20	1 brl = 1/5 yard

Portugis dapat menghasilkan 1 yard kain pakaian dalam 30 jam,

sedangkan Inggris hanya mampu dalam 100 jam menghasilkan 1 yard kain pakaian. Di pihak lain Portugis menghasilkan 120 jam untuk menghasilkan 1 barrel anggur sedangkan Inggris hanya 20 jam. Berarti Portugis mempunyai *absolute advantage* dalam menghasilkan kain pakaian dan Inggris

dalam menghasilkan anggur. Dengan dasar tukar Internasional 1:1 sebagai yang dikemukakan oleh Adam Smith, maka kedua negara akan memperoleh keuntungan apabila dilakukan perdagangan karena, Pertama bagi Portugis, dengan menyerahkan 1 yard pakaian telah dapat dimiliki 1 barrel anggur sedangkan dalam negeri 4 yard kain baru didapat 1 barrel anggur. Demikian pula dengan Inggris dengan mengekspor 1 barrel anggur ke Portugis telah didapat 1 yard kain pakaian. Kalau dalam negeri 1 barrel anggur didapat $\frac{1}{2}$ yard.

Contoh 2,

Tabel 2
Keuntungan Mutlak (output per jam kerja)

Negara	Pupuk	Jagung	DTD
Amerika	2	20	1 unit pupuk = 10 unit jagung
Kanada	5	4	1 unit pupuk = $\frac{4}{5}$ unit jagung

Amerika dapat menghasilkan pupuk 2 unit per jam, sedangkan Kanada dapat menghasilkan 5 unit dalam satu jam. Kemudian dalam menghasilkan jagung, Amerika mampu menghasilkannya sebesar 20 unit per jam sedangkan Kanada hanya 4 unit per jam, berarti Kanada mempunyai *absolute advantage* dalam menghasilkan

pupuk, sedangkan Amerika dalam menghasilkan jagung. Jika dasar tukar internasional 1:1, maka dalam perdagangan internasional kedua negara akan mendapat keuntungan. Bagi Kanada dengan mengekspor 1 unit pupuk telah dapat diganti dengan 1 unit jagung, sedangkan dalam negeri 1 unit impor pupuk sama dengan $\frac{4}{5}$ unit jagung. Demikian pula dengan Amerika dengan mengekspor 1 unit jagung baru akan didapat 1 unit pupuk.

Secara matematis, teori absolute advantage dari Adam Smith dapat diilustrasikan dengan gampang lagi, yaitu:

Data Hipotesa Teori Absolut Advantage dari Adam Smith

Produk Per Satuan Tenaga Kerja per hari	Teh	Sutra	DTDN
Indonesia	12 kg	3 m	4 kg = 1 meter 1 kg = $\frac{3}{4}$ m
China	4 kg	8 m	$\frac{1}{2}$ kg = 1 meter 1 kg = 2 m

Teori Keunggulan Mutlak didasarkan pada asumsi pokok antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja.
2. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama.
3. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang.
4. Biaya transportasi diabaikan.

Berdasarkan DTDN (Dasar Tukar Dalam Negeri) dapat kita lihat, sebagai berikut:

1. Harga 1 kg teh di Indonesia lebih murah (hanya $\frac{1}{4}$ sutra) dibandingkan dengan China yang lebih mahal (yaitu 2 m sutra).

2. Sebaliknya, harga 1 m sutra di China lebih murah(hanya $\frac{1}{2}$ kg the) dibandingkan dengan di Indonesia yang lebih mahal (yaitu 4 kg teh).

Sehinga kita dapat menyimpulkan bahwa, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi the sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan ekspor the ke China. Sebaliknya Indonesia akan mengimpor sutra dari China. Bagi China memiliki keunggulan absolute dalam produksi sutra, sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan ekspor sutra ke Indoensia, dan sudah pasti sebaliknya juga, China akan mengimpor the dari Indonesia. Manfaat langsung yang dirasakan dari spesialisasi produksi (*gain from trade*) ialah:

1. Dengan spesialisasi dan menekspor 1 kg the ke China, Indonesia akan mendapat 2 m sutra, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan $\frac{1}{4}$ m sutra. Dengan demikian melalui spesialisasi produksi dan perdagangan Internasional Indonesia akan mendapat keuntungan (*gain from trade*) sebesar $2m - 1/4m = 1.3/4m$ sutra.
2. Sebaliknya, dengan spesialisasi dan mengekspor 1 m sutra ke Indonesia, China akan mendapat 4 kg teh, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan $\frac{1}{2}$ kg teh. Dengan demikian melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, China akan mendapat keuntungan (*gain from trade*) sebesar $4 \text{ kg} - 1/2\text{kg} = 3.1/2 \text{ kg}$ teh.

Dari hipotesa untuk *gain from trade* berdasarkan teori *absolute advantage* dari Adam Smith.

Produk Per Satuan Tenaga Kerja per hari	Teh		Sutra	
	TS	DS	TS	DS
Indonesia	12 kg	24 kg	3 m	0 m
China	4 kg	0 kg	8 m	16 m
Produk Dua Negara	16 kg	24 kg	11 m	16 m

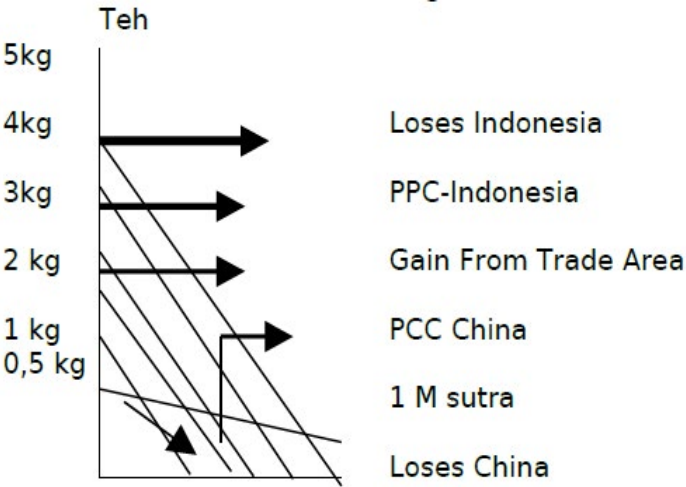
Keterangan : TS = Tanpa Spesialisasi

DS = Dengan Spesialisasi

Melalui grafik teori *absolute advantage* dari Adam Smith dapat dianalisis dengan menggunakan kurva PPC (Production Possibility Curve) sebagai berikut.

Grafik

Teori Absolute Advantage dari Adam Smith



Berdasarkan analisis matematika dan grafik di atas dapat diketahui bahwa DTI atau Dasar Tukar Internasional akan memberikan manfaat perdagangan internasional atau *gain from trade*

bagi kedua negara. Dengan kata lain, akan menguntungkan satu negara tanpa merugikan negara lain dengan perhitungan sebagai berikut:

-Untuk teh: $1/4m < DTI \text{ the} < 2m$

-Untuk sutra: $1/2 \text{ kg} < DTI \text{ sutra} < 4 \text{ kg}$.

Dari gambaran di atas, bahwa teori Adam Smith ini juga memiliki kelemahannya juga, dikarenakan dalam perdagangan internasional akan terjadi keunggulan absolute yang berbeda, dimana hanya ada satu negara yang memiliki keunggulan absolute untuk kedua jenis produk (the dan sutra), maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Inilah kelemahan teori *absolute advantage* Adam Smith. Namun, teori ini kemudian diperbaiki dan disempurkan lagi oleh David Ricardo dengan teori *comperative advantage* (keunggulan komperatif) maupun *production comperative (labor productivity)*.

Biaya Relatif (*Comparative Cost: David Ricardo*)

Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja atau *theory of labor value* yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu *cost comparative* produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut teori *cost comparative advantage (labor efficiency)*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efisien. Berdasarkan contoh hipotetis di bawah ini maka dapat dikatakan bahwa teori *comparative advantage* dari David Ricardo adalah *cost comparative advantage*.

Teori ini dikemukakan oleh Ricardo. Konsep perdagangan yang semakin disukai masyarakat Internasional, pertama sekali dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823) ini dikenal juga dengan teori “*comperative cost*” atau “*comperative advantage*”. Dalam teori ini, setiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa hambatan, maka akan tercapainya efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan pada gilirannya produksi dunia secara keseluruhannya akan mencapai maksimum, sehingga makin tinggi kemakmurannya.

Teori David Ricardo ini didasarkan pada nilai kerja atau *teory of labor value*, yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksikannya. Menurut teori *cost comperative advantage (labor efficiency)*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari peragangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisiensi serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efektif.

Di bawah ini contoh hipotesis teori *comperative advantage* dari David Ricardo, adalah *cost comperative advantage*.

Data Hipotesis *Cost Comperative*.

Negara	Produksi	
	1 kg gula	1 m kain
Indonesia	3 hari kerja	4 hari kerja
China	6 hari kerja	5 hari kerja

Berdasarkan contoh hipotesis di atas, jika ditinjau dari keunggulan mutlak atau *absolute advantage* Adam Smith maka Indonesia unggul mutlak karena *labor cost*-nya lebih efisien

dibandingkan dengan Cina, baik dalam produksi 1 kg gula maupun 1 m kain. Dengan demikian tentu tidak akan terjadi perdagangan antara kedua negara jika didasarkan pada teori Adam Smith. Akan tetapi, berdasarkan teori David Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolute dibandingkan China, untuk kedua produk di atas, maka akan tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki *cost comparative advantage* atau *labor efficiency*.

Tabel.

Data Perhitungan *Cost Comparative (Labor Efficiency)*.

Perhitungan Cost Comparative Advantage (Labor Efficiency)		
Perbandingan Cost	1 kg gula	1 m kain
Indonesia	$\frac{3}{4}$ HK	$\frac{4}{5}$ HK
China		
China	$\frac{6}{3}$ HK	$\frac{5}{4}$ HK
Indonesia		

Berdasarkan perbandingan *cost comparative advantage* atau *labor efficiency* di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Cina dalam reproduksi 1 kg gula ($\frac{3}{6}$ atau $\frac{1}{2}$ hari kerja Cina dalam produksi 1 meter kain ($\frac{4}{5}$ hari kerja). Hal ini akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan ekspor gula. Sebaliknya, tenaga kerja China ternyata lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam produksi 1 meter kain ($\frac{5}{4}$ hari kerja) daripada produksi 1 kg gula ($\frac{6}{3}$ atau $\frac{2}{1}$ hari kerja). Hal ini mendorong China melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain.

Manfaat Perdagangan Internasional (*Gain From Trade*)

Berdasarkan matrik di atas, dapat disusun perbandingan kemampuan produksi setiap tenaga kerja per hari kerja pada masing-masing negara sebagai berikut,

Tabel

Data Hipotesa Gain From Trade Berdasarkan Teori Comperative Advantage

dari David Ricardo.

Perbandingan Produksi/TK/HK			Dasar Tukar Dalam Neg- eri (DTDN)
Negara	Gula	Kain	
Indonesia	1/3 kg	¼ m	4 kg = 3 m < 1 kg = 3/4 m ¾ kg = 1 m
China	1/6 kg	1/5 m	5 kg = 6 m < 1 kg = 6/5 m 5/6 kg = 1 m

Berdasarkan tabel di atas, suatu negara adakalanya dapat menghasilkan dua jenis produk dan mempunyai keuntungan mutlak untuk kedua barang tersebut. Kalau menurut teori *absolute advantage* maka perdagangan tak mungkin akan terjadi, tetapi secara *comperative advantage* perdagangan tersebut dapat terjadi. Yang dilihat di sini adalah keuntungan komperatif yang diperoleh oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.

Tabel

Keuntungan Komperatif (*output* per jam kerja)

Negara	Gandum	Jagung	DTD
Indonesia	10	20	1 unit gandum = 2 ton jagung
Singapura	8	12	1 ton gandum = 1,5 ton jagung

Kalau secara teori *absolute advantage*, maka perdagangan tak akan mungkin terjadi antara Indonesia dan Singapura karena Indonesia mutlak unggul dalam menghasilkan jagung dan gandum dibandingkan dengan Singapura. Indonesia dapat menghasilkan gandum 10 ton per jam, sedangkan Singapura hanya 8 ton per jam demikian juga dengan jagung Indonesia dapat menghasilkan 20 ton per jam sedangkan Singapura hanya 12 ton per jam. Tetapi secara *comperative advantage* perdagangan antara Indonesia dengan Singapura dapat terjadi. Dengan dasar tukar internasional yang berada pada ruang gerak masing-masing negara tersebut (salah satu perbedaan Adam Smith) : 1,5 ton <DTI<2 ton. Di sini jelas Indonesia mempunyai keuntungan komperatif dalam menghasilkan jagung dan Singapura mempunyai *comperative advantage* dalam menghasilkan gandum.

Teori perdagangan bebas ini kemudian berkembang menjadi 3 aliran, yaitu:

1). Merkantilisme

Aliran Merkantilisme ialah kebijakan perdagangan ditujukan pada peningkatan ekspor sebanyak-banyaknya dan penekanan impor sekecil-kecilnya.

2). Liberalisme

Liberalisme ialah setiap negara bebas untuk menetapkan kebijakan perdagangannya sesuai dengan keunggulan komperatif yang dimilikinya.

3). Neomerkantilisme

Aliran yang menutamakan perekonomian nasional daripada perdagangan internasional, bahkan kalau perlu dengan membatasi dan mengorbankannya.

Akibat langsung dari diterapkannya ketiga aliran ini adalah negara-negara industri berusaha untuk meningkatkan ekspornya secara besar-besaran dan mengurangi impornya melalui proteksionisme yang tinggi, seperti halnya negara Amerika sekarang yang menerapkan proteksionisme yang tinggi dengan menaikkan tarif impor sebesar 53 persen, yang pada intinya juga diikuti oleh negara-negara lain. Pada akhirnya terjadilah perang tarif berkepanjangan, yang inilah akhirnya menjadikan salah satu penyebab utama meletusnya perang Dunia ke-2. Apakah suatu negara mempunyai keuntungan komperatif dibandingkan dengan negara lain dilihat dari segi ongkos tenaga kerja (*wage of labor*).

Apabila ongkos tenaga kerja rendah, maka harga *output* akan rendah pula. Suatu negara akan memproduksi suatu produk yang harga relatif lebih rendah dari negara lain. Ini berarti mereka mendapat keuntungan komperatif dalam produksi produknya.

Tabel

Ongkos Komparatif

Negara	Input of Labor	Output	
		Mesin	Pakaian
Amerika	1 hari	5	20
India	1 hari	1	10

Secara *absolute advantage*, Amerika mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan kedua jenis produk mesin dan pakaian.

Dalam 1 hari, tenaga kerja dapat menghasilkan 5 unit mesin di Amerika sedangkan di India hanya 1 unit mesin. Untuk pakaian dalam 1 hari, tenaga kerja di Amerika dapat menghasilkan 20 unit pakaian sedangkan di India hanya 10 unit. Jika ini yang terjadi maka perdagangan tidak akan terjadi antara Amerika dengan India. Tapi kalau dilihat secara *comparative advantage* maka perdagangan tetap terjadi karena Amerika secara komperatif akan lebih menguntungkan kalau menspesialisasikan dalam produksi mesin, sedangkan India dalam memproduksi pakaian (dasar tukar internasional) berada di antara dasar tukar dalam negeri kedua negara tersebut). Keadaan ini belum menggambarkan *comparative cost*.

Untuk menentukan harga *output* yang paling murah kita anggap upah tenaga kerja per hari untuk menghasilkan mesin dan pakaian di Amerika \$20. Sedangkan di India \$5, maka akan terlihat:

Tabel
Comparatif Cost

Negara	Input of Labor	Wage Rate	Mesin		Kain	
			Output	Price	Output	Price
Amerika	1 hari	\$20	5	\$4,00	20	\$1,00
India	1 hari	\$5	1	\$5,00	10	\$0,50

Dengan tingkat upah per hari \$20 di Amerika, maka harga mesin \$4,00 dan kain \$1,00. Tapi di India dengan tingkat upah \$5,00 per hari maka harga kain dalam negeri \$0,50 sedangkan mesin \$5,00. berarti harga mesin relatif lebih rendah di Amerika dibandingkan dengan India, dan sebaliknya kain lebih murah di India daripada di Amerika. Untuk itu akan menguntungkan apabila Amerika mengeksport mesin ke India dan mengimpor kain dari India, demikian pula sebaliknya India akan lebih menguntungkan mengeksport kain dan mengimpor mesin dari Amerika. Perdagangan antara Amerika dengan India akan saling menguntungkan.

Teori Modern Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*: dari Model Hechsher & Ohlin);

Banyak para ahli menganggap teori ini hanya merupakan kelanjutan dari Teori Klasik, karena essensinya sama yaitu melihat kenapa terjadinya perdagangan antar-dua negara. Berbagai pendekatan yang digunakan, kalau teori klasik melihat dari *supply* saja, tetapi teori modern melihat dari *supply* dan *demand*.

1. Teori Haberler

2. Teori Hecksher-Ohlin (H-O)

Ada beberapa perbedaan penting antara teori lasik dengan Heberler. Kalau Klasik melihat perbedaan *cost of production* untuk barang yang sama di dua negara hanya disebabkan oleh pemakaian tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja dipergunakan, maka akan semakin banyak upah yang diberikan, sehingga ongkos produksi (*cost of production*) meningkat dan setrusnya harga barang di pasar akan meningkat pula, tetapi Heberler mengatakan bahwa harga barang di pasar bukan hanya disebabkan pemakaian tenaga kerja, tetapi merupakan kombinasi pemakaian factor produksi (tanah, *labor*, dan *capital*). Untuk itu Haberler memakai konsep *opportunity cost* atau ongkos alternatif, yang dapat dijelaskan dengan kurve *possibility curve* dan digabungkan dengan kurve *indeference curve* untuk melihat terjadinya perdagangan antar-dua negara, dan sekaligus dapat memperlihatkan keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

Ongkos Oppurtunity (*opportunity cost*)

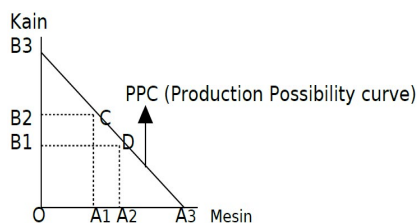
Opportunity cost adalah ongkos yang dikorbankan dari memproduksi satu barang untuk memproduksi barang lain atau dapat juga dikatakan berapa pergorbanan faktor produksi yang dapat

dipergunakan untuk memproduksi satu barang, dialihkan kepada barang lain yang dianggap mempunyai keuntungan komperative. Secara kurve dapat digambarkan dengan kurve *possibility curve*. *Production possibility curve* adalah kurva yang memperlihatkan berbagai kombinasi barang yang dapat kita hasilkan dan sekaligus menggambarkan produksi atau kombinasi yang paling baik.

Apabila semua *input* digunakan untuk menghasilkan kain, maka dihasilkan 100 unit, mesin = nol, tapi sebaliknya semua faktor produksi digunakan untuk menghasilkan mesin, maka didapat mesin 100 unit, kain = nol. Atau kedua-duanya, maka faktor produksi harus diatur sedemikian rupa. Misalnya pada titik produksi mesin 60 unit, kain 70 unit. Kemudian bila ingin menambah produksi mesin menjadi 80 unit maka kain harus dikurangi menjadi 60 unit, jadi di sini ada faktor produksi yang harus dikorbankan dari produksi kain dialihkan ke produksi mesin, inilah yang sering disebut *opportunity cost* atau ongkos alternatif. Bentuk kurve PPC ini cekung ke origin yang berarti *increasing cost*, kalau *constant cost*, maka PPC akan berbentuk garis lurus. Esensinya sama saja dengan *increasing cost*, dimana apabila persen dengan sejumlah faktor produksi kain sama dengan nol. Tapi sebaliknya kalau ingin menghasilkan kain OB3, maka produksi mesin nol. Kombinasi di titik C dan D menggambarkan keadaan yang sama, demikian dengan titik lainnya sepanjang kurve *production curve* yang sama.

Gambar

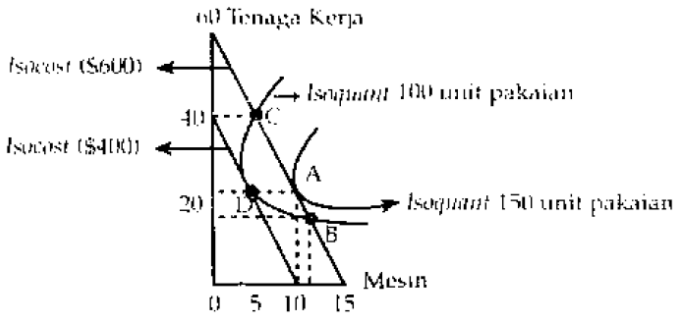
Kurve PPC dengan Ongkos Tetap



Menurut teori Heckscher - Ohin atau teori H - O, perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Perbedaan *opportunity cost* tersebut dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak/murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka/mahal dalam memproduksinya.

Dalam analisisnya, teori modern H - O menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva "*Isocost*", yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama dan kurva "*Isoquant*", yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva *Isocost* akan bersinggungan dengan kurva *Isoquant* pada suatu titik optimal. Jadi; dengan biaya/cost tertentu akan diperoleh produk yang maksimal; atau dengan biaya/cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu.

Grafik Teori Heckscher - Ohlin



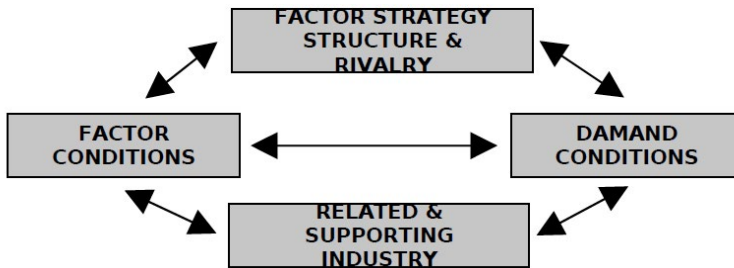
Pada grafik terlihat sebagai berikut. Titik A, B, dan C berada pada *Isocost* yang sama, yaitu \$600 dengan kombinasi input/faktor produksi yang berbeda, yaitu A (25 TK, 10 M), B (15 TK, 12 M), dan C (40 TK, 5 M), sedangkan titik D (20 TK, 5 M) berada pada *Isocost* \$400. Titik-titik B, C, dan D berada pada *Isoquant* yang menunjukkan jumlah produksi yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Sesuai teori mikro ekonomi, titik singgung antara *Isocost* dan *Isoquant* merupakan posisi optimal. Jadi, dengan kombinasi biaya faktor produksi minimal akan dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan *Isocost* \$400 dapat memproduksi 100 unit pakaian. Adapun titik B dan C, untuk memproduksi 100 unit pakaian (*Isocjuant* yang sama) diperlukan biaya yang lebih mahal, yaitu *Isocost* \$600.

Sebaliknya, titik A dapat memproduksi 150 unit pakaian, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, yaitu *Isocost* \$600. Sesuai konsep titik singgung antara *Isocost* dan *Isoquant* ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang tertentu dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur/proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Selanjutnya, teori H - O menggunakan asumsi $2 \times 2 \times 2$ dalam arti sebagai berikut. Perdagangan internasional terjadi antara dua negara (misalnya antara Indonesia dan Jepang). "Masing masing negara memproduksi dua macam barang yang sama (misalnya 100 unit pakaian dan 20 unit radio). 3. Masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan mesin, tetapi dengan jumlah/ proporsi yang berbeda. Secara grafis perbedaan proporsi/ jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut.

Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*: Michael E. Porter);

Menurut **M. Porter**, dalam era persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu (W. J. Keegan & M. C Green, 1997; 268) yang digambarkan sebagai suatu *diamond* berikut Competitive Advantage Of Nation.

Gambar Skema M. Porter - Diamond



Factor conditions adalah sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh suatu negara yang terdiri atas lima kategori berikut ini:

1. *Human resources* (SDM)
2. *Physical resources* (SDA)
3. *Knowledge resources* (IPTEK) atau (SDT)
4. *Capital resources* (Permodalan) atau (SDC)
5. *Infrastructure resources* (Prasarana) atau (SDI)

Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya saing atau *competitive advantage* suatu bangsa / perusahaan produk atau jasa yang dihasilkannya. Adapun yang dimaksud dengan "*demand conditions*" tersebut terdiri atas:

1. *Composition of home demand*
2. *Size and pattern of growth of home demand*
3. *Rapid home market growth*
4. *Trend of international demand*

Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kontak dan koordinasi dengan pemasok (*supplier*), terutama dalam menjaga dan memelihara *value chain*. Strategi perusahaan, struktur organisasi dan modal perusahaan, serta kondisi persaingan di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi *competitive advantage* perusahaan. *Rivalry* yang berat di dalam negeri biasanya justru akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektifitas, serta peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

Teori Permainan (*Game Theory*)

Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen, di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki *payoff* yang berbeda bagi tiap agen. Pertama kali dikembangkan sebagai cabang tersendiri dari ilmu matematika oleh Oskar Morgenstern dan John von Neumann, cabang ilmu ini telah berkembang sedemikian pesat hingga melahirkan banyak tokoh peraih nobel, seperti John Nash (AS), Reinhard Selten (Jerman), dan John Harsanyi (AS) pada tahun 1999 dan Thomas Schelling (AS) dan Robert J. Aumann (Israel) pada tahun 2005.

Analisis Fundamental adalah metode analisis yang menggunakan data ekonomi, seperti data produksi, konsumsi dan pendapatan rumah tanggamasing-masing negara untuk meramalkan pergerakan harga. Setiap berita yang baik yang berhubungan

langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor fundamental yang penting untuk dicermati. Berita-berita tersebut dapat berupa berita yang menyangkut perubahan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, pemilihan presiden, bencana alam dan lain-lain.

Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, yaitu : dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini, seorang trader juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor komputer, misalnya melalui Dow Jones Telerate, Reuters, Knight Rider maupun Bloomberg. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam Analisis Fundamental, yaitu :

1. Gross Domestic Product

Gross Domestic Product adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu / periode tertentu.

2. Inflasi

Seorang Trader akan selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Kebijakan peningkatan tingkat suku bunga ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi. Penggunaan tingkat inflasi

sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat GDP dan GNP ke dalam nilai sebenarnya. Nilai GDP dan GNP ini merupakan indikator sangat penting bagi seorang Trader dalam membandingkan peluang dan resiko investasinya di mancanegara. Umumnya seorang Trader akan menggunakan indikator-indikator inflasi sebagai berikut:

a) *Producer Price Index (PPI)* PPI adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Data PPI dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi terutama dari sektor manufaktur, pertambangan dan pertanian.

b) *Consumer Price Index (CPI)* CPI digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga eceran dan sekelompok barang dan jasa tertentu. Kedua indeks tersebut, CPI dan PPI, digunakan oleh seorang Trader sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Seorang Trader tidak dapat berharap bahwa Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga setiap salah satu indikator memberikan sinyal kuat tentang adanya inflasi maupun menurunkan suku bunga untuk keadaan sebaliknya. Contoh : dampak Perang Teluk (1991) adalah naiknya harga minyak bumi dan ini membuat indeks CPI di Amerika Serikat juga naik. Namun karena peningkatan indeks CPI itu tidak berlangsung lama, maka Bank Sentral Amerika Serikat tidak mengambil tindakan apa pun.

3. *Balance of Payment*

Balance of Payment adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. *Balance of Payment* ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi ekspor

dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral dan lain-lain. Indikator umum yang sering digunakan adalah neraca perdagangan / current account

Faktor lain yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah adanya aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk *Foreign Direct Investment* maupun *Portofolio Investment*. Contoh : surplus neraca perdagangan Jepang terhadap Amerika Serikat pada tahun 1998 memberikan gambaran / indikasi yang jelas terhadap meningkatnya volume permintaan Yen dalam aktifitas perdagangan. Akibatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS menguat.

4. *Employment* Employment adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil berbagai sektor ekonomi. Indikator mengenai tingkat kesempatan kerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis sehat / tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam keadaan *full capacity*/ kapasitas penuh maka akan tercapai full employment . Jika keadaan sebaliknya, maka tingkat pengangguran pun akan meningkat. Tingkat employment adalah indikator ekonomi yang sangat penting bagi pasar keuangan pada umumnya dan pasar valuta asing khususnya.

Faktor Politik, sebagai salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing / waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Contoh : gejolak politik yang terjadi di Indonesia pada pasca pergantian kepemimpinan nasional dari masa pemerintah Orde Baru (1966 - 1998) sampai ke Orde Reformasi menimbulkan gejolak fluktuasi nilai

tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat signifikan. Namun ada kalanya isu politik tidak mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, seperti dalam kasus Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dan Monica Lewinsky pada tahun 1998 yang tidak serta merta membawa dampak terhadap perubahan nilai tukar Dollar AS. Peranan Faktor Keuangan sangat penting dalam melakukan Analisis Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi.

Perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Para pengamat pasar valuta asing menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah penentu utama nilai tukar suatu mata uang, selain indikator keuangan lainnya, seperti jumlah uang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga ini adalah semakin tinggi tingkat suku bunga semakin kuat nilai tukar suatu mata uang. Tingkat suku bunga disini dimaksudkan adalah tingkat suku bunga riil bukan yang nominal. Seorang Trader akan bereaksi terhadap perubahan selisih tingkat suku bunga, bukan pada perubahan tingkat suku bunga secara individual.

Faktor Eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak regional bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era alokasi global asset, arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Para Fund Manager, Investor dan Hedge Fund yang melakukan investasi secara global, sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan/ regional tertentu.

Robert J Auman (Israel)

Israel Robert John Aumann (lahir pada 8 Juni 1930 di Frankfurt, Jerman) adalah seorang matematikawan Israel. Beserta keluarganya, ia lari ke Amerika Serikat pada tahun 1938 untuk menghindari kekejaman Nazi. Ia adalah doctor matematika murni dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1955. Pada tahun 2005, ia dianugerahi Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel bersama dengan Thomas Schelling karena “telah meningkatkan pengetahuan kita mengenai konflik dan kerjasama melalui analisis game-theory.”

BAB IV

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pengertian Kebijaksanaan Ekonomi Internasional

Kebijakan ekonomi internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ ke negara tersebut. Dalam implementasinya, perdagangan antara dua Negara sering merugikan Negara yang lemah (*less developing countries*). Negara maju (*developing countries*) mendominasi perdagangan internasional.

Tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh Negara maju, hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Negara berkembang relative lebih besar kepada Negara maju daripada sebaliknya.

Instrumen Kebijaksanaan Ekonomi Internasional

Instrumen kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut:

A. Kebijakan Ekspor di dalam Negeri

1. Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor/PET untuk barang-barang ekspor tertentu. Contoh: Pajak ekspor atas CPO.
2. Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu.
3. Penetapan prosedur/tata laksana ekspor yang relatif mudah.
4. Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.
5. Pembentukan asosiasi eksportir.
6. Pembentukan kelembagaan seperti *bounded warehouse* (Kawasan Berikat Nusantara), *bounded island* Batam, *export processing zone*, dan lain-lain.
7. Larangan/pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) oleh Menperindag.

B. Kebijakan Ekspor di luar Negeri

1. Pembentukan *International Trade Promotion Centre* (ITPC) di berbagai negara, seperti di Jepang (Tokyo), Eropa, AS, dan lain-lain.
2. Pemanfaatan *General System of Preferency* atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*).
3. Menjadi anggota *Commodity Association of Producer*, seperti OPEC dan lain-lain.

4. Menjadi anggota *Commodity Agreement between Producer and Consumer*, seperti ICO (*International Coffee Organization*), MFA (*Multifibre Agreement*), dan lain-lain.

Instrumen kebijakan perdagangan internasional di bidang impor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi/mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut:

A. Kebijakan Tarif Barrier

Kebijakan *Tariff Barrier* atau TB dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut.

1. Pembebasan bea masuk/tariff rendah adalah antara 0% s/d 5%: dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer/pertahanan/keamanan, dan lain-lain.
2. Tarif sedang antara > 5% s.d. 20%: dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.
3. Tarif tinggi di atas 20%: dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

1. Kebijakan Tariff dan Efek-efek Tariff

Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, sistem/cara pemungutan tarif bea masuk ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bea Harga (*Ad Valorem Tariff*)

Besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat prosentase tarif dikalikan harga CIF dari barang tersebut ($BM = \% \text{ tarif} \times \text{Harga CIF}$). Misalnya, harga CIF suatu barang $X = \$100$ dan tarif bea masuknya 10% , sedangkan kurs atau nilai tukar = $\text{Rp}5.000,00/\text{USD}$. Maka pungutan bea masuknya = $10\% \times \$100 \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}50.000,00$.

b. Bea Spesifik (*Specific Tariff*)

Pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Di Indonesia sistem tarif ini digunakan sebelum tahun 1991.

c. Bea Campuran (*Compound Tariff*)

Pungutan bea masuk ini merupakan kombinasi antara sistem a, dan sistem b.

Sifat dan Keuntungan/ Kelemahan masing-masing Sistem Tarif

a. Bea harga (*Ad Valorem Tariff*) bersifat proporsional.

Keuntungannya:

- 1) Dapat mengikuti perkembangan tingkat harga/inflasi.
- 2) Terdapat diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya.

Kerugiannya:

- 1) Memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintahan, khususnya bea cukai karena memerlukan data dan perincian harga barang yang lengkap.
- 2) Sering menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga untuk perhitungan bea masuk antara importir dan bea cukai, sehingga dapat menimbulkan stagnasi/kemacetan arus barang di pelabuhan.

b. Bea Spesifik (*Specific Tariff*) bersifat regresif.

Keuntungannya:

- 1) Mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya.
- 2) Dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri.

Kerugiannya:

- 1) Pengenaan tarif dirasakan kurang/tidak adil karena tidak membedakan harga/kualitas barang.
- 2) Hanya dapat digunakan sebagai alat control proteksi yang bersifat statis.

Tujuan dan Fungsi Tarif Bea Masuk

1. Menurut tujuannya, kebijakan tarif bea masuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
 - a. Tarif *Proteksi*, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu.

- b. Tarif *Revenue*, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.
2. Berdasarkan tujuan tersebut maka fungsi tarif bea masuk adalah sebagai berikut.
- Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi/industri dalam negeri.
 - Fungsi *budgeter*, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
 - Fungsi demokrasi, yaitu penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR.
 - Fungsi pemerataan, yaitu untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah.

2. Tarif Nominal dan Tarif Proteksi Efektif

a. Tarif Nominal

Tarif nominal adalah besarnya prosentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang digunakan saat ini adalah buku tarif berdasarkan ketentuan *harmonized system* atau HS yang menggunakan penggolongan barang dengan sistem 9 digit. Penggolongan barang dengan sistem digit ini akan mempermudah dan memperlancar arus perdagangan internasional karena adanya kesatuan kode barang untuk seluruh negara, terutama yang telah menjadi anggota *World Customs Organization* (WCO) yang bermarkas di Brussel.

b. Tarif Proteksi Efektif

Tarif proteksi efektif ini disebut juga sebagai *Effective Rate of Protection* (ERP), yaitu kenaikan *Value Added Manufacturing* (VAM) yang terjadi karena perbedaan antara prosentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU (*Completely Built-up*) dengan tarif nominal untuk bahan baku/komponen input impornya atau CKD (*Completely Knock Down*).

3. *Infant Industry Argument*

Pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia banyak berlandaskan pada *infant industry argument*. *Infant industry argument* adalah suatu kebijaksanaan untuk melindungi industri industri dalam negeri yang baru lahir/tumbuh dengan “proteksiedukatif”, sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

4. *Proteksidukatif*

Agar tujuan *infant industry argument* tersebut dapat dicapai, maka perlu dijalankan suatu kebijakan “proteksidukatif”/ yaitu kebijakan untuk melindungi *infant industry*.

B. Kebijakan Nontariff Barrier

1. *Instrumen Kebijakan Nontariff*

Kebijakan *Nontariff Barrier* (NTB) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar NTB dapat dikelompokkan sebagai berikut (A.M. Rugman & R.J.M. Hodgetts, 1995; 165).

a. Pembatasan spesifik (*specific limitation*):

- 1) Larangan impor secara mutlak.
- 2) Pembatasan impor atau *quota system*.
3. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu.
- 4) Peraturan kesehatan/karantina.
- 5) Peraturan pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Peraturan kebudayaan.
- 7) Perizinan impor *import licenses*.
- 8) Embargo.
- 9) Hambatan pemasaran/marketing seperti:
 - * VER (*Voluntary Export Restraint*), yaitu pembatasan ekspor secara sukarela oleh negara eksportir.
 - * OMA (*Orderly Marketing Agreement*), yaitu pembatasan pemasaran produk tertentu atas permintaan negara importir.

b. Peraturan bea cukai (*customs administration rules*)

- 1) Tatalaksana impor tertentu (*procedure*).
- 2) Penetapan harga pabean (*customs value*).
- 3) Penetapan *forex rate* (kurs valas) dan pengawasan devisa (*forex control*).
- 4) *Consulat formalities*.
- 5) *Packiging/labelling regulation*.

- 6) *Documentation needed.*
- 7) *Quality and testing standards.*
- 8) *Pungutan administrasi (fees).*
- 9) *Tariff classification.*

c. Government participation

- 1) *Kebijakan pengadaan pemerintah.*
- 2) *Subsidi dan insentif ekspor.*
- 3) *Countervailing duties.*
- 4) *Domestic assistance programs.*
- 5) *Trade-diverting.*

d. Import charges

- 1) *Import-deposits*
- 2) *Supplementary duties*
- 3) *Variable taxes*

2. Sistem Kuota dan Efek-Efek Kuota

Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Menurut ketentuan GATT/WTO, sistem kuota ini hanya dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi hasil pertanian.
- b. Untuk menjaga keseimbangan *balance of payment*.
- c. Untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.

3. *Subsidi*

Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk iniiberi&an perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain yang bertujuan sebagai berikut

- a. Menambah produksi dalam negeri.
- b. Mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri.
- c. Menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor.

Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan.
2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri.
3. Melindungi lapangan kerja (*employment*).
4. Menjaga keseimbangan dan stabilitas *balance of payment* (BOP) atau neraca pembayaran internasional.
5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

stabil.

6. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas.

Macam-Macam Restriksi (Ketetapan) dalam Perdagangan Internasional

Organisasi multilateral internasional adalah organisasi kerja sama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Contohnya GATT-WTO, UNCTAD, WCO/CCC, dan lain-lain. GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) adalah organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan *Havana Charter* pada tahun 1948. Tujuannya adalah meningkatkan arus perdagangan internasional dengan prinsip-prinsip pokok/dasar yang disebut *GATT Clause*. Prinsip-prinsip pokok dalam *GATT Clause* adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip *free trade*, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik yang bersifat *Tariff Barrier* (TB) maupun *Nontariff Barrier* (NTB).
- b. Prinsip *resiprositas* (timbang balik) dan *nondiskriminasi* yang dikenal sebagai *Most Favorised Nation Clause* (MFNC), yaitu prinsip multilateralisasi (ekstensifikasi/institusionalisasi) dalam perlakuan (*treatment*) hubungan ekonomi/keuangan/ perdagangan internasional dengan pengecualian sebagai berikut.
 - Hubungan *preferential history*, seperti *Commonwealth* dan *France Union*.
 - Kesatuan ekonomi regional, seperti *Free Trade Area* dan *Customs Union*.

- c. Prinsip nondiskriminasi atau dikenal sebagai *Nation Treatment Clause* (NTC), yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Misalnya dengan mengenakan tarif PPN yang sama terhadap produk impor maupun produk lokal. Beberapa perundingan yang telah dilakukan GATT untuk mengurangi/menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik TB maupun NTB, di antaranya adalah:

1. Jenewa, Swiss tahun 1947.
2. Annecy, Prancis tahun 1949.
3. Torquay. Inggris tahun 1950.
4. Jenewa, tahun 1956.
5. Putaran Dillon, Jenewa tahun 1960 -1961.
6. Putaran Kennedy, Jenewa tahun 1962 - 1967.
7. Putaran Tokyo, tahun 1973 - 1979.
8. Putaran Uruguay, tahun 1986 -1993.

Putaran Uruguay adalah perundingan multilateral yang dimulai dari Punta de l'Este di Uruguay pada tahun 1986-1993. Tujuannya adalah memperlancar arus perdagangan dan investasi internasional dengan menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan TB dan NTB. Hasil substansi dari putaran Uruguay (H.S. Kartadjoemena, 1997 : 37) adalah sebagai berikut:

1. Masalah akses pasar (*market access*), yaitu bidang yang selama ini ditangani secara tradisional oleh GATT, seperti:

- a. *Tariff Barrier (TB)*.
 - b. *NontariffBarrier (NTB)*.
 - c. *Perdagangan tropical product*.
 - d. *Perdagangan natural resource-based products*.
 - e. *Perdagangan textiles and clothing*.
 - f. *Perdagangan agriculture product*.
2. Masalah penyempurnaan aturan main GATT yang berlaku, sehingga sesuai dengan kepentingan yang berbeda, yaitu:
- a. *Penyempurnaan GATT articles*.
 - b. *Peraturan tentang safeguards*.
 - c. *Penyempurnaan MTN agreements and arrangements*.
 - d. *Penyempurnaan peraturan tentang subsidies and countervailing measures*.
 - e. *Penyempurnaan peraturan dispute settlement*.
- Contohnya penyelesaian masalah tuntutan Jepang, AS dan Uni Eropa tentang peraturan/ketentuan MOBNAS di Indonesia.
3. *Penyempurnaan kelembagaan GATT dengan penyempurnaan the functioning of the GATT system* dengan membentuk *World Trade Organization (WTO)* yang mulai berfungsi sejak 1 Januari 1995.
4. Masalah-masalah baru (*New Issues*) yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh GATT, berkat desakan negara maju telah menjadi bagian dari perundingan di Uruguay, yaitu:

- a. Masalah penetapan ketentuan *Trade Related Intellectual Property Right* (TRIP'S) atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI), yaitu ketentuan perdagangan yang berhubungan dengan perlindungan atas kekayaan intelektual berupa pembayaran *royaltiffee*.
- b. Masalah penetapan ketentuan *Trade Related Investment Measures* (TRIM'S) yaitu ketentuan perdagangan yang berhubungan dengan peraturan-peraturan tentang investasi.
- c. Masalah penetapan ketentuan *General Agreement on Trade Service* (GATS), yaitu ketentuan tentang perdagangan produk jasa.

Hambatan-Hambatan dalam Perdagangan Internasional

Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain:

· Tarif atau bea cukai.

Tarif adalah pajak produk impor.

· Kuota.

Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.

· Subsidi.

Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal.

Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.

· Muatan lokal.

- Peraturan administrasi.
- Peraturan antidumping.

Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Argumen untuk hambatan perdagangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdagangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika. Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.

Para penentang globalisasi acap kali mengacu pada persoalan moral tatkala mereka meyerang perdagangan bebas. Julian Morris justru menunjukkan bahwa tak ada sesuatu yang sangat salah daripada: suatu pembatasan terhadap perdagangan adalah sesuatu yang sangat tidak bermoral, karena tindakan ini akan merusak keberlangsungan pembangunan akibat meningkatnya biaya barang-barang, menyengsarakan kaum miskin, dan menjadi penghalang terhadap lapangan pekerjaan dan kewirausahaan. Pada sisi yang lain, pertukaran sukarela yang terjadi diantara masing-masing individu adalah sesuatu yang pada dasarnya sebuah tindakan yang baik. Setiap perdagangan secara langsung semakin memperkokoh tingkat kemakmuran yang dimiliki setiap pelaku.

Secara kumulatif, perdagangan yang terjadi dengan cara itu akan mendorong proses kewirausahaan yang akan semakin baik dan tersedianya barang-barang yang lebih murah, serta mendorong produktivitas.

Kombinasi dari kesemuanya akan berujung pada pembangunan yang berkelanjutan, dan perbaikan yang terus menerus terhadap kesejahteraan masyarakat. Julian Morris menghitung bahwa dengan melakukan penghapusan terhadap berbagai tariff dan kuota, yang diberlakukan dalam perdagangan barang dan jasa, akan mendorong pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) Dunia hingga lebih dari satu triliun Dollar US setiap tahun dan para kaum miskin di Afrika dan Asia lah yang akan mendapat keuntungan dari kebijakan seperti itu, jika dilakukan.

GATT (General Agreement on Trade and Tariffs)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau “Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan” yang ditandatangani pada 1947 adalah suatu kesepakatan multilateral yang mewajibkan negara anggotanya untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. GATT menuntut anggotanya untuk mengorganisasikan perdagangan luar negeri mereka sesuai dengan prinsip perlakuan bangsa yang paling menguntungkan (*most-favoured nation treatment*). Yaitu, yang bertujuan untuk membuat perdagangan luar negeri sebebas mungkin melalui penurunan tingkat tarif dan penghapusan hambatan kuota impor, dan untuk memberikan pengarahannya tertentu terhadap kebijakan perdagangan luar negeri negara-negara tersebut.

Dalam pembukaan GATT dinyatakan bahwa perdagangan dan hubungan ekonomi internasional harus bertujuan untuk meningkatkan standar standar kehidupan global, yang mengusahakan tercapainya suatu tingkat penyerapan tenaga kerja

sepenuhnya (*full-employment*), menjamin pertumbuhan pendapatan riil yang tinggi dan terus menerus, mengamankan permintaan efektif, mengeksplorasi sepenuhnya sumber-sumber daya dunia, meningkatkan produksi, dan menukarkan komoditas-komoditas dan barang-barang, dan berhasrat untuk mendukung pelaksanaan tujuan-tujuan ini sebagai akibat dari penandatanganan persetujuan yang bertujuan untuk menghilangkan tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya di dalam perdagangan internasional.

Daya Saing Sumber Daya Indonesia di Tingkat Internasional

Bersamaan dengan era otonomi daerah yang sedang digairahkan, pemerinth kini memiliki visi yang menginginkan agar Indonesia menjadi Negara industri baru yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia - Pasifik. Sementara misi yang diemban sektor industri dan perdagangan adalah sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan perdagangan di luar negeri dengan mematuhi aturan main (*rule of game*) tata perdagangan dunia di bawah koordinasi WTO (*World Trade Organization*), serta mengamankan kebijakan industri dan perdagangan nasional melalui penataan ulang strategi pemasaran internasional dan diplomasi perdagangan yang unggul. Ditinjau dari indeks peringkat daya saing dunia, Indonesia secara terus menerus mengalami penurunan hingga peringkat 41 di tahun 1998 versi *World Competitiveness Year Book*. Padahal, menurut *World Economic Forum - Genewa*, dalam *Global Competitiveness Report* Mei 1997, Indonesia menduduki peringkat 15.58.

Secara umum sejak tahun 2000 kinerja ekspor dan impor Indonesia selalu meningkat. Namun laju pertumbuhan ekspor non migas berjalan cukup lambat. Pertumbuhan ekspor non migas pada dua kuartal tahun 2003. Pertumbuhan ini hanya selisih sedikit

dengan pertumbuhan impor non migas yang mencapai 4,34% (YoY) pada pada periode yang sama. Apabila dikaji lebih mendalam, pertumbuhan sektor pertanian justru negatif, sektor industri tumbuh 3,66%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah pertambangan yang mencapai angka 16,71%.

BAB V

PERHITUNGAN NILAI TUKAR

Term of trade adalah besaran statistik yang mencerminkan daya tukar suatu barang lain antar dua negara baik dalam bentuk harga maupun volume. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai elastisitas suatu barang dengan barang lainnya. Definisi lain, *Term of Trade* atau TOT adalah perbandingan kuantitatif (jumlah atau nilai) antara ekspor dan impor yang mencerminkan perkembangan posisi perdagangan suatu negara untuk periode waktu tertentu.

Konsep TOT atau *term of trade* secara matematis dapat kita rumuskan dalam beberapa konsep, yaitu:

Net Barter Terms of Trade

Net Barter Terms of Trade adalah perbandingan antara indeks harga rata-rata barang ekspor dengan barang impor.

$$N = \frac{P_{xi} : P_{m1}}{P_{x0} : P_{m0}}$$

N = Net Barter Term of Trade

P_{x1} = Harga rata-rata satuan ekspor waktu sekarang

P_{x0} = Harga rata-rata satuan ekspor waktu tahun dasar

P_{m1} = Harga rata-rata satuan impor waktu sekarang

P_{m0} = Harga rata-rata satuan waktu tahun dasar

Harga rata-rata satuan ekspor dan impor selalu dinyatakan persentase. Oleh karenanya perumusan di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$N = \frac{P_{xi} : P_{m1}}{P_{x0} : P_{m0}} \qquad N = \frac{P_{xi}}{P_{m1}}$$

..... 3

Konsep Barter term of trade dapat juga disebut dengan konsep “Elastisitas Harga”.

Contoh: Jika pada tahun 2005 harga indeks ekspor Indonesia 100 dan tahun 2007 naik 10 persen atau 110. kemudian harga indeks impor turun 2001), 10 persen dari tahun dasar atau menjadi 95, maka kita dapat menghitung term of trade Indonesia.

$$\begin{aligned} \text{TOT} &= \frac{P_{xi}}{P_{m1}} \cdot 100 \\ &= \frac{110}{95} \cdot 100 = 15,8\% \end{aligned}$$

Ini berarti term of trade negara Indonesia naik 15,8 persen, naik dari tahun 2005. Atau dapat dicontoh lainnya sebagai berikut:

$$N = \frac{P_x}{P_m} \times 100$$

P_x = Indeks harga ekspor

P_m = Indeks harga impor

100 = Indeks tahun dasar

Bila N lebih besar dari 100 atau kenaikan *net barter* TOT berarti terjadi perkembangan perdagangan luar negeri yang positif/ baik karena dengan nilai ekspor tertentu diperoleh nilai impor yang lebih besar.

Contoh:

N -1950 = 100 (tahun dasar) P_x 1990 = 95 (angka indeks) P_m 1990 = 110 (angka indeks) Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung:

$$N-1990 = \frac{N \times Q_x}{P_x} = 86,36\%$$

Berarti untuk periode 1950 / 90 harga atau nilai ekspor (P_x) turun sebanyak 13,64 % dibandingkan nilai impornya (P_m).

Income Terms of Trade

$$I = \frac{N \times Q_x}{P_x} = \frac{P_x}{P_m} \times \frac{Q_x}{Q_m}$$

Konsep *income* TOT ini lebih penting bagi negara yang sedang berkembang (NSB), karena mencerminkan kemampuan NSB untuk mengimpor barang-barang modal pembangunan dari hasil ekspornya.

Contoh:

$$Q_x 1990 = 120$$

$$P_x 1990 = 95$$

$$P_m 1990 = 110$$

$$1 = \frac{P_m}{P_m} \times Q_x = \frac{95}{110} \times 120 = 103,63$$

Berarti untuk periode 1950/1990, kemampuan mengimpor didasarkan pada penerimaan ekspor naik sebesar 3,63%, meskipun P_x - menurun. Perubahan *income TOT* ini penting bagi NSB karena berkaitan dengan kemampuannya untuk mengimpor barang-barang modal pembangunan.

Gross Barter Terms of Trade

Gross Barter Terms of Trade yaitu perbandingan angka indeks volume ekspor dengan angka indeks volume impor.

$$G = Q_{x1} : Q_{m1}$$

atau dapat disederhanakan menjadi;

$$Q_{x0} Q_{m0}$$

$$G = Q_{x1} \dots\dots\dots 2$$

$$Q_{x0}$$

Q = gross barter term of trade

Q_{x1} = didapat dari nilai ekspor (jumlah dikalikan dengan harga) dibagi dengan harga rata-rata satuan ekspor.

Q_{m1} = didapat dari nilai impor (jumlah dikalikan dengan harga) dibagi dengan harga rata-rata satuan impor.

Contoh:

Bila $Q_{x1} = 150$ dan $Q_{m1} = 125$, maka kita dapat hitung

$$G = \left(\frac{150}{100} : \frac{125}{100} \right) \cdot 100 = 120\%$$

Atau contoh sederhana lainnya adalah:

$$G = \frac{QX}{Qm} \times 100$$

QX = Indeks kuantitas ekspor

Qm = Indeks kuantitas impor

100 = Indeks tahun dasar

Bila G lebih besar dari 100 atau terjadi kenaikan *gross barter* TOT, berarti perkembangan posisi perdagangan luar negeri negara tersebut kurang baik atau kurang menguntungkan karena diperlukan ekspor yang lebih besar untuk mendapatkan sejumlah impor tertentu.

Income/Capacity Terms of Trade

Capacity Terms of Trade, yaitu perbandingan antara indeks harga rata-rata ekspor dengan impor yang dikalikan dengan volume ekspor.

$$S = \frac{P_x \cdot Q_x}{P_m} = N \cdot Q_x$$

Konsep ini sering disebut dengan "elastisitas Income".

Factorial Terms of Trade

Factorial Terms of Trade yaitu perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan indeks harga rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktifitas.

a. Single Factorial Term of Trade

$$S = \frac{P_x}{P_m} \cdot Z_x$$

Z_x = Produktifitas barang ekspor

S = Single Factorial Term of Trade

b. Double Factorial Terms of Trade

$$D = \frac{P_x}{P_m} \cdot \frac{Z_x}{Z_m} \dots\dots\dots 4$$

Z_m = Produktifitas barang-barang impor

D = Double Factorial Term of Trade

P_x = Rata-rata indeks harga barang impor dan ekspor

P_m

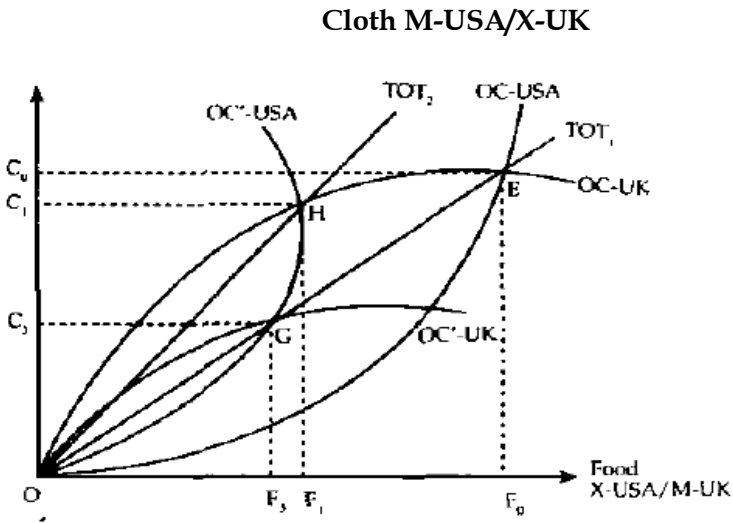
Pada rumus 3, kita hanya mengaitkan rasio dari ekspor dan impor dengan produktifitas ekspor atau produktifitas domestik, tanpa melihat produktifitas sektor luar negeri. Kemudian pada rumus 4, telah dimasukkan produktifitas impor atau sektor luar negeri di

samping sektor domestik. Konsep *factorial of trade* ini sering juga disebut dengan “*elastisitas produk*”.

Term of Trade dan Kebijakan Perdagangan

Analisis Grafik Pengaruh Kebijakan Proteksi terhadap TOT dan Perkembangan Perdagangan Internasional.

Grafik Analisis TOT



USA = United States of America

UK = United Kingdom

Keterangan

- Sumbu X menunjukkan ekspor *food* oleh USA atau impor *food* oleh UK.
- Sumbu Y menunjukkan ekspor *cloth* oleh UK atau impor *cloth* oleh USA.
- Pada keadaan awal, *offer-curve* USA (OC - USA) berpotongan

dengan *offer-curve* UK (OC - UK) pada titik E, sehingga terbentuk garis TOT.

- d. Bila UK melakukan kebijakan pembatasan impor pakaian dari USA, maka OC akan bergeser menjadi OC' - USA dan memotong OC - UK pada titik H.
- e. Pada pertukaran di titik H dengan TOT terjadi: * Penurunan ekspor *food* USA (X - USA) besarnya sama dengan penurunan impor *food* UK (M - UK), yaitu dari OFg menjadi OF1. * Penurunan ekspor *cloth* UK (X - UK) besarnya akan sama dengan penurunan impor *cloth* USA (M - USA), yaitu dari OCg menjadi OC.
- f. Pada titik H atau TOT2, karena penurunan ekspor *food* USA atau impor *food* UK lebih besar daripada penurunan ekspor *cloth* UK atau impor *cloth* USA UK atau impor *cloth* USA. $FoF1 > C0C1$ ini berarti TOT- USA menjadi memburuk, sedangkan TOT - UK membaik.
- g. Jika USA melakukan pembalasan dengan mengadakan kebijakan pembatasan impor *cloth* dari UK sehingga ekspor *cloth* dari UK menurun, maka pertukaran akan terjadi pada titik G dengan TOT1 tetapi dengan volume perdagangan yang lebih kecil.
- h. Dengan tindakan pembalasan ini, TOT-USA akan membaik dan TOT-UK akan memburuk. Akan tetapi, kebijakan proteksi yang dijalankan oleh USA dan UK ini bukan hanya berpengaruh terhadap TOT masing-masing negara. Lebih penting lagi adalah dampak negatifnya terhadap perkembangan/pertumbuhan perdagangan internasional yang semakin menurun.

BAB VI

NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT)

Neraca pembayaran merupakan refleksi yang sangat kuat untuk mengetahui sistem perekonomian suatu negara, apakah negara tersebut mengalami kemajuan atau penurunan. Semuanya dapat diprediksi melalui sistem neraca yang dapat memberikan informasi seputar keuangan suatu negara. Oleh karena itu, neraca pembayaran memiliki dimensi waktu yang sama dengan akuntansi pendapatan nasional.

Kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Di bidang perdagangan, kebijaksanaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan ekspor nonmigas, memelihara kestabilan harga dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri serta menunjang iklim usaha yang makin menarik bagi penanaman modal.

Definisi Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran (*balance of payment atau balance of international payments*) suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu.

Pada umumnya transaksi-transaksi ekonomi internasional berupa pemindahtanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk negara lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara yang bersangkutan. Catatan semacam ini sangat berguna untuk berbagai macam tujuan.

Tujuan utama neraca pembayaran ini adalah untuk memberikan informasi kepada pejabat atau penguasa pemerintah tentang posisi keuangan mengenai hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan khusus, di antaranya:

1. Untuk mengetahui struktur, posisi dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara.
2. Sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya.
3. Untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan.
5. Merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara.
6. Sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam menetapkan keputusan di bidang moneter dan fiskal

Sementara itu secara umum kegunaan neraca pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara.
2. Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara.

3. Untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri.
4. Membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, dan politik.
5. Sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan.
6. Merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara.
7. Sebagai alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional

Ada dua hal penting tentang neraca pembayaran ini, yaitu:

1. Pengertian penduduk dalam suatu neraca pembayaran Internasional meliputi orang perorangan/individu, badan hukum, dan pemerintah. Orang perorangan atau individu, artinya sebagai rakyat biasa tidak mewakili pemerintah yang memperoleh penghasilan tetap atau bekerja pada suatu tempat (sebagai *center of interest*). Badan hukum dimaksudkan atau dianggap sebagai penduduk dari negara yang memperoleh status sebagai badan hukum. Badan- badan pemerintah, yaitu sebagai penduduk dari negara yang diwakilinya.
2. Yang termasuk dalam neraca pembayaran internasional hanyalah transaksi ekonomi internasional saja. Transaksi bantuan militer misalnya, tidak termasuk dalam neraca pembayaran. Dalam transaksi internasional terdapat suatu transaksi yang harus dicatat pada sisi debit dan dicatat pada sisi kredit. Pos-pos yang di debit dan pos-pos yang di kredit dalam neraca pembayaran yang perinciannya dapat dilihat pada Tabel 10.1. Dalam tabel tersebut dapat kita simpulkan:
 - a. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk di negara lain.

- b. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain.

Tabel 1. Pos-Pos Transaksi Debit dan Transaksi Kredit

Transaksi Debit	Transaksi Kredit
1. Neraca barang • Impor barang dari negara lain	1. Neraca barang • Ekspor barang ke negara lain
2. Neraca jasa • Pembayaran jasa ke penduduk luar negeri • Pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri	2. Neraca jasa • Penerimaan jasa dari penduduk luar negeri • Penerimaan pariwisata dari luar negeri
3. Neraca hasil modal • Pembayaran bunga dan dividen	3. Neraca hasil modal • Penerimaan bunga dan dividen
4. Neraca modal • Kredit yang diberikan ke luar negeri dan pembayaran cicilan utang	4. Neraca modal • Kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerimaan cicilan utang
5. Neraca utang piutang jangka panjang • Pembelian obligasi dari luar negeri	5. Neraca utang piutang jangka panjang • Penjualan obligasi ke luar negeri

Perbedaan lain dari transaksi ekonomi adalah:

1. Transaksi yang sedang berjalan (*current account*) yang meliputi barang-barang dan jasa-jasa.
2. Transaksi kapital adalah transaksi yang menyangkut modal dan emas.

3. Hadiah (*gift*), bantuan (*aid*), dan transaksi satu arah yang lain (*unilateral transfer*) dapat digolongkan ke dalam transaksi sedang berjalan atau sebagai transaksi sendiri, yaitu transaksi satu arah.

Pos-Pos Dasar Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran ini dapat dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Transaksi barang dan jasa (*current account*).

Transaksi barang dan jasa atau transaksi dagang adalah semua transaksi yang meliputi ekspor (X) dan impor (M) barang dan jasa, disebut juga sebagai bagian dari transaksi sedang berjalan (*current account*). Transaksi dagang dibagi menjadi transaksi barang (*visible trade*) yang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan, dan transaksi jasa (*invisible trade*) yang merupakan transaksi ekspor dan impor jasa. Hal yang berkaitan dengan pendapatan nasional (Y) sebagaimana dapat dilihat dari persamaan di bawah ini:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

di mana: C = konsumsi, I = investasi swasta, G = pengeluaran pemerintah, dan (X - M) = neraca perdagangan (netto).

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi kredit, sedangkan impor barang dan jasa merupakan transaksi debit. Transaksi sedang berjalan mempunyai arti khusus. Surplus transaksi berjalan mengandung pengertian nilai ekspor lebih besar dari nilai impor ($X > M$) atau $(X - M) > 0$, yang implikasinya bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga memperbesar volume dan nilai ekspor. Defisit transaksi berjalan menggambarkan nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor ($X < M$) atau $(X - M) < 0$, artinya pengeluaran negara lebih besar

daripada yang dihasilkan. Dalam transaksi yang mengalami surplus berarti terjadi akumulasi kekayaan valuta asing, sehingga ada saldo positif dalam investasi luar negeri. Sebaliknya bila terjadi defisit berarti pengurangan investasi luar negeri.

2. Transaksi pendapatan modal (*income on investment*)/finansial.

Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang'-berasal dari penanaman modal (investasi) yang dicatat pada pos pendapatan modal yang meliputi:

- a. Penerimaan pendapatan dari penanaman modal kita di luar negeri.
- b. Penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain karena penanaman modal asing di negara kita.

Pendapatan itu berupa keuntungan, dividen, dan bunga yang diterima oleh:

- a. Penduduk kita yang dalam neraca pembayaran terdapat dalam pos *income on investment* sebagai transaksi kredit.
- b. Penduduk negara lain karena perusahaan, saham, obligasi, atau memberi pinjamannya dalam negara kita dan dalam neraca pembayaran terdapat dalam pos transaksi debit.

Transaksi finansial mencakup semua transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri suatu ekonomi dalam suatu periode. Komponen-komponen dalam transaksi finansial dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori fungsional atau tipe investasi, aset dan kewajiban, instrumen investasi, sektor, atau jangka waktu (berdasarkan *original maturity*) instrumen finansial. Transaksi finansial diklasifikasikan berdasarkan tipe investasinya, yaitu investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa. Investasi langsung merupakan investasi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara (pemegang *saham/direct investor*) pada suatu perusahaan investasi

langsung (*direct investment enterprise*) di negara lain untuk kepentingan jangka panjang.

3. Transaksi satu arah (*unilateral transaction*).

Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah, artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Tergolong dalam transaksi unilateral adalah hadiah (*gift*), bantuan (*aid*), dan transfer unilateral. Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk dalam transaksi kredit.

Bila negara lain memberi hadiah atau bantuan kepada negara kita maka ini masuk dalam transaksi kredit dalam neraca pembayaran Indonesia. Hadiah pampasan perang mungkin dapat dimasukkan dalam pos ini. Contohnya untuk di Indonesia seperti Wisma Yoso, Tugu Monas, dan Jembatan Ampera merupakan hadiah dari negara Jepang sebagai ganti rugi dari PD II. Sebaliknya bila kita memberi hadiah atau bantuan kepada negara lain – bantuan obat, pakaian, dan makanan ke Rusia dan Filipina karena bencana alam – akan masuk pada transaksi debit dalam neraca pembayaran kita.

4. Selisih perhitungan (*errors and omissions*).

Rekening ini merupakan rekening penyeimbang (*balance*) bila nilai transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Dengan kata lain, selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila terdapat ketidaksamaan antara nilai transaksi kredit dengan nilai transaksi debit. Dengan demikian, maka jumlah total nilai transaksi kredit dari suatu neraca pembayaran akan selalu sama dengan transaksi debitnya.

5. Transaksi penanaman modal langsung (*direct investment*).

Dalam neraca pembayaran untuk investasi langsung

dimaksudkan sebagai transaksi jual beli saham dan perusahaan, yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Pos ini masuk dalam transaksi kredit, bila penduduk satu negara menjual sahamnya kepada penduduk negara lain atau bila penduduk asing mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaan suatu negara. Apabila terjadi penduduk suatu negara melakukan pembelian saham dari tangan penduduk negara lain atau mendirikan perusahaan di kawasan negara lain, maka pos *direct investment* berada pada posisi debit.

6. Utang piutang jangka panjang (*long-term loan*).

Transaksi di sini meliputi kredit jangka panjang yang umumnya mempunyai jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Jual beli surat-surat obligasi atau saham antara penduduk satu negara dengan negara lain juga termasuk dalam kategori ini. Pos ini akan masuk dalam *kredit* pada neraca pembayaran bila:

- a. Penduduk negara yang bersangkutan menjual obligasi (baik yang diterbitkan oleh penduduk negara itu ataupun negara lain).
- b. Penduduk negara yang bersangkutan menerima pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain.
- c. Penduduk negara yang bersangkutan mendapatkan pinjaman jangka panjang dari penduduk negara lain.

Sebaliknya akan masuk sebagai *debit*, jika berlawanan dengan transaksi kredit pada butir a, b, dan c di atas. Pos ini dibedakan antara jangka panjang utang-piutang pemerintah dan swasta.

7. Utang piutang jangka pendek (*short-term loan*).

Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. Pos ini pada dasarnya sama dengan utang piutang jangka panjang (*long term loan*). Perbedaannya hanya dalam jangka waktu pendek

(*short term capital*). Transaksi-transaksi di sini umumnya terdiri dari transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel.

Utang piutang jangka pendek dapat dibedakan antara transaksi utang piutang jangka pendek pemerintah dan swasta. Transaksi jangka pendek swasta paling sukar ditaksir angkanya dan sukar diawasi oleh pemerintah. Hal ini akan memberi kontribusi pada angka yang besar dalam pos selisih yang tidak diperhitungkan.

8. Transaksi lalu lintas sektor moneter (*monetary accomodating*).

Transaksi lalu lintas sektor moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada *current account* (transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral) dan *investment account* (transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang). Sektor moneter terdiri dari:

a. Bank sentral, yaitu yang berkenaan dengan:

- 1) Hubungan dengan dana Moneter Internasional (International Moneter Fund - IMF).
- 2) Kewajiban jangka pendek.
- 3) Mutasi cadangan devisa.
- 4) Mutasi cadangan emas moneter.

b. Bank-bank devisa, yaitu berhubungan dengan:

- 1) Kewajiban jangka pendek.
- 2) Mutasi cadangan devisa.

Bila pengeluaran (*current account + investment account*) lebih besar dari penerimaan (*current account + investment account*) merupakan deficit yang harus ditutupi dengan saldo kredit pada *monetary sector account*. Pos hubungan dengan IMF akan terisi apabila cadangan pada IMF dan saldo SDR (*special drawing right*) mengalami perubahan.

Kerjasama antar bank sentral dari berbagai negara memungkinkan mereka dalam batas-batas tertentu saling membantu mengatasi kesulitan likuiditas luar negeri negara-negara anggotanya yang sangat mendesak dan berlangsung tidak lama dengan fasilitas yang disebut swap. Transaksi swap ini akan tercatat pada pos kewajiban-kewajiban jangka pendek.

Mutasi cadangan devisa merupakan pos yang dicatat dalam transaksi penerimaan dan pemakaian valuta asing. Penerimaan valuta asing dari luar negeri merupakan transaksi debit, sedangkan pemakaian valuta asing untuk ke luar negeri merupakan transaksi kredit. Dalam pos mutasi cadangan emas moneter akan dicatat sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada besarnya cadangan emas moneter. Aliran emas moneter ke luar negeri disebut *gold outflow* pada kredit, sedangkan emas moneter dalam negeri yang disebut *gold inflow* pada debit.

Pengelompokan pos-pos dasar neraca pembayaran berdasarkan sistem akuntansi menghasilkan pengelompokan yang lebih bersifat umum yaitu terdiri dari tiga kelompok, sebagai berikut:

Pertama, neraca transaksi berjalan (*current account*).

Neraca transaksi berjalan adalah ringkasan arus dana antara satu negara tertentu dan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa, atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Neraca transaksi berjalan terdiri dari transaksi impor dan ekspor barang dan jasa. Pada *current account*, ekspor dicatat sebagai kredit karena menghasilkan devisa bagi negara, sedangkan impor dicatat sebagai debit karena memakai atau menggunakan devisa dari negara. Selain ekspor dan impor, transaksi lain yang termasuk dalam *current account* adalah pembayaran faktor (*factor payment*) dan *unilateral transfers*.

Neraca transaksi berjalan (*current account*) terdiri dari:

- a. Transaksi perdagangan barang dan jasa (*balance of trade*), yaitu selisih nilai ekspor dan impor barang dan jasa. Jika nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor berarti terjadi defisit neraca perdagangan dan sebaliknya jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, artinya terjadi surplus neraca perdagangan.
- b. Pendapatan modal (*factor income*), yaitu pendapatan dari investasi asing.
- c. Transaksi unilateral yaitu berupa bantuan, hibah, dan hadiah dari satu negara untuk negara lain.

Kedua, neraca transaksi modal (*capital account*)/*financial account*.

Neraca transaksi modal (*capital account*) atau yang sekarang dikenal dengan *financial account*, adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara lain selama suatu periode tertentu. *Financial account* yaitu mencatat transaksi aset finansial, transfer-pembayaran, piutang maupun utang internasional. Ini mencakup pencatatan akan FDI (*foreign direct investment*) atau penanaman modal asing (PMA), pembayaran dividen, cicilan utang, bunga atau utang, pembelian surat berharga, saham, dan lain-lain. *Financial account* mengukur devisa masuk dan ke luar seperti pada *current account*, berupa transaksi yang menghasilkan devisa dan dicatat sebagai kredit (*capital inflow*). Sebaliknya, transaksi yang mengakibatkan devisa ke luar dari suatu negara dicatat sebagai debit (*capital outflow*).

Neraca transaksi modal mencakup:

- a. Penanaman modal langsung atau investasi asing langsung (*direct foreign investment*) yaitu: investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha, contohnya pembangunan pabrik baru.
- b. Utang piutang jangka panjang atau investasi portofolio yaitu transaksi terkait aset keuangan jangka panjang (seperti saham

dan obligasi) antarnegara yang tidak memengaruhi adanya transfer pengendalian, contohnya pembelian saham perusahaan negara lain.

- c. Utang piutang jangka pendek atau investasi modal lain yaitu transaksi yang melibatkan asset keuangan jangka.
- d. Sektor moneter.

Transaksi yang menghasilkan devisa (kredit) dan transaksi yang mengurangi devisa (debit) pada *financial* account adalah melalui dua fitur sebagai berikut:

- a. *Capital inflow*. Dana/modal yang masuk ke dalam suatu negara (dicatat sebagai kredit), misalnya melalui investasi asing (FDI), pembelian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. *Capital inflow* yang berkontribusi baik bagi perekonomian adalah yang dalam jangka panjang yaitu, misalnya melalui investasi modal riil (FDI) berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin baru, dan lain-lain. Untuk *capital inflow* jangka pendek sering juga disebut “hot money”, merupakan dana yang hanya singgah sebentar di suatu negara dan tidak berkontribusi langsung ke peningkatan output (GDP). *Hot money* biasanya hanya mencari keuntungan jangka pendek, misalnya dari pembelian saham.
- b. *Capital outflow*. Dana/modal yang ke luar dari suatu negara (dicatat sebagai debit), misalnya ada swasta/masyarakat yang melakukan investasi (baik FDI maupun pembelian saham dan surat berharga lainnya) di luar negeri, pembayaran cicilan utang luar negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, dan lain-lain.

Ketiga, selisih yang belum diperhitungkan (*error and omissions* atau *statistical discrepancy*).

Selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih

perhitungan ini, maka jumlah total nilai transaksi kredit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama dengan transaksi debitnya. Pengelompokan yang diuraikan di atas berdasarkan ada tidaknya hubungan langsung antara pos-pos yang bersangkutan dengan pos-pos yang ada dalam neraca utang-piutang luar negeri (*balance of indebtedness*). Jika sebuah pos dasar atau sebuah transaksi secara langsung tidak mengakibatkan berubahnya nilai pos pada neraca utang-piutang luar negeri, maka pos atau transaksi tersebut kita masukkan dalam *current account*, dan demikian untuk sebaliknya, maka kita masukkan ke dalam *capital account*.

Secara teoretis, pembukuan berpasangan seharusnya menyebabkan total kredit menjadi sama dengan total debit, atau neraca pembayaran harus seimbang. Dalam teorinya, persamaan berikut harus terpenuhi:

$$\text{Transaksi berjalan} + \text{Transaksi modal} + \text{Cadangan resmi} = 0$$

Akan tetapi, dalam praktik persamaan ini tidak pernah tercapai karena adanya kekeliruan pencatatan akibat dari kesulitan pencatatan yang meliputi transaksi oleh penduduk negara yang jumlah dan kegiatannya sangat besar, sehingga kesamaan ini tidak selalu bisa diperoleh. Dengan demikian, ada pos khusus yang dinamakan selisih perhitungan atau selisih statistik (*statistical discrepancy*) yang diperlukan untuk membuat neraca tersebut seimbang.

Selisih statistik dalam neraca pembayaran dapat terjadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Tidak terlaporkannya sebagian transaksi perkiraan modal, yang diakibatkan karena cepatnya perdagangan valas dalam jangka waktu 24 jam, pertukaran (*swap*) dan nilai lindung (*hedge*) moneter yang canggih, dan pertumbuhan yang cepat dana investasi jangka pendek yang mengalir antarnegara sebagai upaya mencari suku bunga tertinggi, yang sering kali menyulitkan para ahli statistik pemerintah.

- b. Adanya tindakan yang melanggar hukum, misalnya pencucian uang, dan penyelundupan obat-obatan terlarang, yang melibatkan jumlah uang yang besar dan transaksinya tidak tercatat.
- c. Terjadinya pelarian modal (*capital flight*) oleh penduduk suatu negara ke negara-negara yang dianggap lebih stabil dibanding negara asal mereka, untuk mengamankan aset-aset yang dimilikinya dengan cara menghindari pengendalian mata uang dan investasi di negara asal dan menghindari pengakuan resmi di negara tujuan akibat sifat pelarian modal ini bertentangan dengan undang-undang.
- d. Penggunaan mata uang asing yang lebih kuat untuk transaksi bisnis atau tabungan oleh penduduk yang tidak mempercayai stabilitas nilai mata uang negaranya.
- e. Kekurangakuratan data untuk ekspor barang, karena banyak negara yang tidak mengenakan pajak atau bea untuk barang ekspor, sehingga bea cukai di banyak negara lebih teliti memeriksa barang impor dan kurang teliti memeriksa barang ekspor.
- f. Statistik perdagangan jasa sering kali tidak akurat, karena banyak data statistik diperoleh dengan cara survei. Contohnya, di Amerika Serikat data terkait turisme diukur dengan menyurvei turis asing tentang berapa lama mereka tinggal di Amerika Serikat dan berapa dollar pengeluaran mereka per hari. Permasalahannya, banyak turis yang menjawab survei tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Masalah Dalam Analisis Neraca Pembayaran

Tujuan analisis neraca pembayaran sangat berbeda-beda dan perbedaan ini menentukan pola analisisnya. Kesukaran timbul dalam penentuan secara umum pola analisis tersebut. Beberapa masalah atau kekeliruan yang sering timbul dalam analisis neraca pembayaran, antara lain:

1. Sering kali mengabaikan hubungan antara transaksi-transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Misalnya, Investasi di luar negeri, sepintas lalu merupakan defisit karena aliran modal ke luar negeri. Sebenarnya ini akan mendatangkan keuntungan karena ada ekspor bahan mentah atau barang kebutuhan yang diperlukan oleh investasi itu di luar negeri dari negara yang menanamkan investasinya ke luar negeri itu. Contohnya untuk keperluan bahan baku dalam proses produksi atau peralatan untuk perlengkapan mendirikan pabriknya. Contoh lain berupa bantuan yang diberikan kepada negara lain yang seolah-olah defisit. Tetapi kebanyakan tidak demikian, misalnya bantuan yang mengikat (tenaga ahli, atau barang-barang harus dari negara yang memberi bantuan) yang pada dasarnya akan menguntungkan.
2. Surplus dalam transaksi berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak-selalu benar. Contohnya Amerika Serikat, penerimaan keuntungan dari investasi luar negerinya lebih besar dari investasinya sendiri. Untuk mengimbangi aliran keuntungan yang masuk ini, transaksi berjalan harus defisit. Dalam hal ini jelas defisit tidak selalu jelek. Secara teoretis, jika *current account* mengalami defisit, yang berarti nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka negara harus mencari devisa atau *capital inflow* untuk menutupi kekurangan tersebut. Seperti penjelasan di atas, *capital inflow* ini dapat diperoleh melalui FDI, penjualan saham/obligasi, maupun penjualan aset lainnya ke luar negeri. Dengan demikian, negara dapat memperoleh devisa untuk membayar impornya yang melebihi ekspor. Ini akan menambah (kredit) pada *financial account*, sehingga terjadi surplus sejumlah defisit pada *current account*. Hasilnya (secara teoretis), neraca pembayaran

akan tetap nol atau seimbang (ekuilibrium). Sebaliknya, ketika *current account surplus*, negara memiliki kelebihan devisa. Devisa ini dapat dijadikan cadangan devisa (untuk membayar defisit di masa depan), diinvestasikan ataupun dipinjamkan ke negara lain. Secara teoretis, ini akan mengurangi (debit) pada *financial account*, sehingga terjadi defisit sejumlah surplus pada *current account*, sehingga neraca pembayaran akan tetap seimbang (ekuilibrium).

3. Keputusan untuk member bantuan (*aid*) seharusnya didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan (misalnya diukur dari income/kapita) bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Misalnya neraca pembayaran Indonesia surplus, tidak berarti Indonesia harus bantu Inggris yang neraca pembayarannya defisit.

Perlu diketahui bahwa, di neraca pembayaran yang diterbitkan oleh berbagai penerbitan resmi tersebut, susunan dan angka-angkanya tidak selalu sesuai. Perbedaan tersebut mungkin akibat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan dasar waktu yang berbeda. Ada yang menggunakan dasar waktu tahun kalender, ada juga tahun anggaran.
2. Penggunaan sistematika yang berbeda. Perbedaan ini meliputi perincian pos-posnya, pengelompokan pos-pos, urutan penempatan pos-pos dalam neraca pembayaran, dan sebagainya.
3. Perbedaan sumber statistik yang dipakai. Misalnya perbedaan waktu pencatatan, sehingga tentu nilainya berbeda seperti ekspor, impor. Apa yang dicatat di pabean dan bank-bank ada perbedaan.
4. Perbedaan karena instansi yang satu mencatat masih berupa angka sementara, sedangkan instansi yang lain sudah dalam angka yang diperbaiki.

Mekanisme dan Pengaruh Neraca Pembayaran

Terdapat tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu:

1. Mekanisme harga atau penyesuaian melalui perubahan harga-harga (*price effects*). Mekanisme Hume adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran keposisi keseimbangan. Mekanisme ini pada hakikatnya adalah dengan sistem standar emas penuh.
2. Mekanisme pendapatan atau penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional (*income effects*). Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional, yang singkatnya disebut “mekanisme pendapatan” menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas teori ekonomi makro oleh Keynes, khususnya diilhami oleh proses penggandaan (*multiplier*) dalam teori tersebut.
3. Penyesuaian melalui perubahan stok uang (*real balance effects*). Mekanisme *hume* sesungguhnya tidak murni mekanisme harga sebab sebelum suatu harga naik atau turun, terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau ke luar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Sebaliknya jika terjadi defisit maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga uang dalam negeri menurun.

Dalam menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca pembayaran internasional, terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor ($X < M$), sedangkan apabila jumlah nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor ($X > M$) posisi neraca pembayaran

menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional (cadangan devisa) tidak berubah dan tidak ada aliran modal/pinjaman akomodatif. Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara disebabkan oleh komponen berikut:

1. Stok nasional. Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus.
2. Pinjaman Akomodatif. Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri (pinjaman otonom) tidak memengaruhi defisit.
3. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif.
4. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif.

Sebagaimana diketahui, bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan negara lain. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian negara, yaitu:

1. Perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka kurs valuta asing menjadi naik dan kurs rupiah menurun. Dan sebaliknya bila terjadi surplus, mengakibatkan kurs valuta asing akan menurun dan kurs rupiah mengalami kenaikan.
2. Perubahan harga. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, sehingga harga barang dalam negeri menjadi meningkat.
3. Perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional.

4. Perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi mengalami penurunan, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi.

Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari beberapa penerbitan resmi, antara lain:

1. Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Keuangan RI.
2. Bank Indonesia: Laporan tahunan pembukuan yang diterbitkan setahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran.
3. Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan dua bulan sekali oleh Bank Indonesia.
4. Statistik Indonesia: *Statistical Year Book of Indonesia* yang diterbitkan oleh BPS.
5. Indikator ekonomi, yang diterbitkan oleh BPS sebulan sekali.

Dari segi bentuk susunan, maka neraca pembayaran yang termuat dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia adalah yang sesuai dengan bentuk yang disarankan oleh IMF. Sebagai contoh pada Tabel 2 digambarkan kondisi Neraca Pembayaran Indonesia untuk beberapa tahun.

Pada Tabel 2, jelas menunjukkan bahwa, Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang 2016, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) surplus USD 12.089 juta. Angka ini melesat jauh dibandingkan NPI tahun 2015. Untuk tahun 2017 agak sedikit menurun hanya mencapai angka USD 11.586 juta. Tahun 2015 keseluruhan NPI kita minus USD 1.098,05 juta. Kinerja NPI 2016 dan 2017 yang membaik ini ditopang

oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan kenaikan surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan mengalami penurunan dari USD 17.518,74 juta atau 2,03 % dari PDB pada 2015 menjadi USD 16.952 juta atau sebesar 1,85 % dari PDB di tahun 2016 dan USD 16.196 juta pada 2017. Hal ini didukung oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa.

Surplus neraca perdagangan meningkat karena penurunan impor yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor. Meskipun demikian, laju penurunan impor di tahun 2016 dan 2017 tidak sedalam pada tahun 2015, ini sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik. Demikian pula halnya dengan laju penurunan ekspor yang tidak sedalam tahun sebelumnya karena didukung meningkatnya harga komoditas global. Defisit neraca perdagangan jasa juga menurun mengikuti impor barang.

Tabel 2.
Neraca Pembayaran Indonesia Periode 2014-2018 (juta USD)

KETERANGAN	2014	2018	2016	2017*>	2018">
I. Transaksi Berjalan	-27509.87	-17518.74	16952	-16196	-31060
A. Barang ¹⁾	6982.57	14048.57	15318	18814	-431
- Ekspor, fob	175292.79	149124.48	144470	168883	180747
- Impor, fob	-168310.22	-135075.91	-129152	-150069	-181178
B. Jasa - Jasa	-10009.69	-8696.67	-7084	-7379	-7101
- Ekspor	23530.93	22220.88	23324	25328	27932
- Impor	-33540.62	-30917.55	-30407	-32707	-35034
C. Pendapatan Primer	-29702.61	-28379.13	-29647	-32131	-30420
- Penerimaan	2129.61	28217	4048	5575	9162
- Pembayaran	31832.22	-31200.83	-33695	-37707	-39582
D. Pendapatan Sekunder	5219.87	5508.49	4460	4500	6892
- Penerimaan	9373.54	1036158	9832	9967	12217
- Pembayaran	-4153.67	-4853.09	-5371	-5467	-5325
II. Transaksi Modal	26.57	16.63	41	46	93
- Penerimaan	26.57	18.63	41	46	93
- Pembayaran	0	0	0	0	0

III. Transaksi Finansial ²⁾	44916.08	16843.1	29306	28686	25108
1. Investasi Langsung	14733.2	10704.48	16136	18502	13841
2. Investasi Portofolio	26066.63	16182.68	18996	21059	9342
3. Derivatif Finansial	-155.55	19.96	-9	-128	-74
4. Investasi Lainnya	42718	-10064.02	-5817	-10747	-1999
IV. Total (1 + II + III)	17432.79	-659.01	12394	12536	-5859
V. Selisih Perhitungan Bersih	-2184.2	-439.04	-305	950	-1272
VI. Neraca Keseluruhan (IV+V)	15248.59	-1098.05	12089	11586	-7131
VII. Cad.Devisa dan yg terkait ³⁾	-15248.59	1098.05	-12089	-11586	-7131
Memorandum:					
- Posisi Cadangan Devisa	1.118616	10593102	116362	130196	120654
Bln Impor/Bayar Utang LN P	5.45	7.39	8.40	8.30	6.5
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-3.09	2.03	-181	-160	-2.98
- Rasio Pembayaran Utang (%)		-	-	-	-

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia - Bank Indonesia, 2018

Catatan : ¹⁾ Dalam Free on Board (FOB)

²⁾ Tidak termasuk Cadangan Devisa dan yang terkait

" Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

*) Angka-angka sementara

**) Angka-angka sangat sementara

Di lain pihak, surplus transaksi modal dan finansial 2016 meningkat signifikan menjadi USD 28.368,60 juta, dari sebelumnya USD 16.859,73 juta pada 2015. Untuk tahun 2017 sampai pada kuartal III juga mengalami peningkatan yang hampir sama dengan tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Penurunan defisit investasi lainnya sejalan dengan masih baiknya persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian domestik dan implementasi program pengampunan pajak yang berjalan dengan

baik. Selanjutnya posisi cadangan devisa 2015 telah mencapai USD 105.931,02 juta, setara dengan 7,39 bulan impor dan pembayaran/cicilan utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa pada 2016 juga meningkat menjadi US\$ 116.361,53 juta atau setara 8,42 bulan impor dan pembayaran/cicilan utang luar negeri pemerintah dan tampaknya diperkirakan hingga akhir 2017 angka ini akan jauh melesat. Sampai dengan kuartal III tahun 2017 angka ini mencapai USD 374.302 juta.

Ke depan, BI akan terus mewaspadaikan perkembangan global, khususnya risiko terkait arah kebijakan Amerika Serikat dan Tiongkok serta meningkatnya harga minyak dunia, yang dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan. Menurut pandangan Bank Indonesia bahwa, kinerja NPI akan semakin baik didukung bauran kebijakan moneter dan makro prudensial, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah, khususnya mendorong percepatan reformasi struktural.

Perekonomian global yang kurang menguntungkan, telah berdampak pada NPI, baik melalui jalur perdagangan maupun jalur finansial. Tekanan terjadi sejak awal tahun dan semakin kuat pada triwulan II dan III 2018. Dalam periode ini, defisit transaksi berjalan melebar didorong pertumbuhan impor yang tinggi akibat permintaan domestik yang kuat serta ekspor yang menurun akibat ekonomi dunia yang juga melambat. Aliran masuk modal asing juga menurun dipicu kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, NPI tahun 2018 tercatat defisit sebesar USD 7.131 juta.

Defisit transaksi berjalan yang tinggi pada 2018 sebesar US\$31,060 juta (sekitar 3% dari PDB), ini banyak dipengaruhi penurunan ekspor akibat pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas yang semakin melambat, sedangkan impor pada periode ini mengalami peningkatan dibandingkan pada 2017. Aliran masuk

modal asing meningkat pada 2018, sehingga dapat menutupi defisit transaksi berjalan yang masih tinggi.

Di tengah tantangan yang mengemuka, perkembangan berbagai indikator ketahanan eksternal tetap baik, meskipun secara keseluruhan tahun 2018, NPI mencatat defisit. Posisi cadangan devisa akhir 2018 juga tercatat tetap tinggi sebesar USD 120,65 miliar, cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar kecukupan internasional yakni sekitar 3 bulan impor. Ketahanan eksternal juga turut didukung *second line of defense* dalam bentuk jaring pengaman keuangan internasional (JPKI) yang memadai.

Neraca Perdagangan Indonesia

Catatan sistematis atas nilai transaksi barang suatu negara, biasanya untuk kurun waktu satu tahun, disebut neraca perdagangan (*trade balance*). Ada pencatatan tentang nilai ekspor barang-barang yang dijual ke luar negeri serta pencatatan tentang nilai impor dari barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan nilainya secara bersamaan disebut ekspor bersih (*netto*), yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Pengertian barang di sini mengacu kepada komoditas yang diperjualbelikan antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia. *System of National Account* (SNA) mendefinisikan barang sebagai objek fisik, yaitu terdapat adanya permintaan (*demand*) terhadap objek tersebut, dapat timbul hak kepemilikan atas barang tersebut, dan kepemilikannya dapat ditransfer dari satu unit institusional ke unit lainnya melalui transaksi di pasar.

Catatan ekspor di Indonesia biasa dipilah menjadi komoditas migas dan nonmigas. Ekspor nonmigas dirinci menjadi tiga kelompok jenis komoditas, yakni pertanian, mineral (pertambangan) dan manufaktur (industri). Perincian semacam ini berguna untuk

menganalisis struktur ekspor Indonesia. Sebagai contoh dikatakan bahwa kontribusi ekspor nonmigas dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat jauh melampaui ekspor migas, suatu keadaan yang berkebalikan daripada era 1970 dan 1980-an. Dianggap sebagai indikasi adanya perubahan mendasar dalam perekonomian akibat kecenderungan peningkatan proporsi dari komoditas sektor manufaktur.

Terlepas dari itu semua, neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus, yang berarti nilai ekspor barang melebihi nilai impornya. Surplus tersebut dalam beberapa tahun terakhir adalah: USD 5.833,23 juta (2013), USD 6.982,57 juta (2014), USD 14.048,57 juta (2015), USD 15.318 miliar (2016). Untuk tahun 2017 surplusnya sudah mencapai USD 18.814 juta. Yang perlu dicatat bahwa, surplus tahun 2013 hingga 2017 diperoleh di saat ekspor Indonesia senantiasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, serta diimbangi oleh penurunan impor pada tahun-tahun yang sama. Namun demikian pada 2018 impor meningkat, akibat tingginya permintaan barang-barang impor, sehingga neraca perdagangan tertekan hingga minus USD 431 juta.

BAB VII

NERACA TRANSAKSI BERJALAN

Neraca Transaksi Berjalan (Neraca Perdagangan dan Jasa)

Pada posisi BOP (*Balance of Payment*) yang ideal untuk suatu negara adalah bila berada pada posisi *surplus* atau *equilibrium* yang nilai valasnya relatif tinggi, sedangkan posisi yang dianggap kurang baik dan selalu diusahakan untuk perbaikan melalui mekanisme *adjustment* BOP adalah posisi BOP yang defisit dan nilai valas yang relatif rendah. Mekanisme *adjustment* atau penyesuaian BOP yang defisit dapat dilakukan melalui beberapa cara yang secara teoritis akan tergantung pada sistem kurs valas yang digunakan oleh masing-masing negara.

Dengan sistem kurs tetap, nilai suatu mata uang ditentukan berdasarkan *gold exchange standard* sesuai dengan Bretton Wood System. Dalam hal ini, mekanisme *adjustment* posisi BOP dapat terjadi melalui mekanisme otomatis berdasarkan teori David Hume⁶⁶ tentang '*pricespecie-flow*' mechanism sebagai berikut;

1. Bila BOP defisit berarti $x < M$ atau $M > X$.
2. Karena masih berlaku nilai kurs tetap atau gold exchange standard, maka akibatnya jumlah emas atau logam mulia (LM) akan makin menurun karena banyak dikirim ke luar negeri.
3. Karena emas masih digunakan sebagai likuiditas atau alat pembayaran, sedangkan jumlahnya makin menurun (emas/LM),

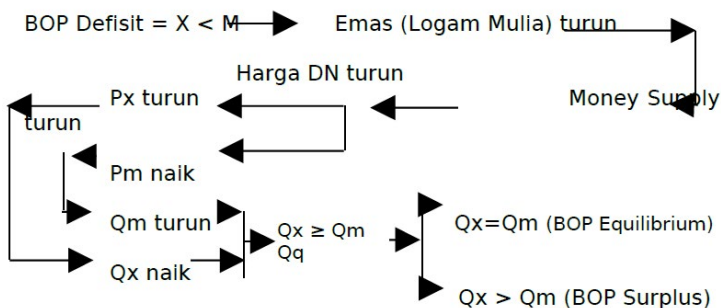
maka money supply (M_s) di dalam negeri makin berkurang.

4. Karena Money supply makin berkurang, maka harga-harga di dalam negeri akan menurun pula.
5. Menurunnya harga (price) di dalam negeri, khususnya terhadap harga barang ekspor (P_x), akan menyebabkan jumlah ekspor (P_x) akan menyebabkan jumlah ekspor (Q_x) akan naik).
6. Di lain pihak, berkurangnya money supply di dalam negeri akan menyebabkan harga barang impor (P_m) di mata konsumen dalam negeri akan menjadi lebih mahal sehingga jumlah impor (Q_m) akan turun.
7. Karena jumlah ekspor (Q_x) naik dan di lain pihak jumlah impor (Q_m) turun, maka melalui mekanisme ini akhirnya jumlah ekspor (Q_x) akan menjadi sama atau bahkan lebih besar daripada jumlah impor (Q_m) atau $Q_x \geq Q_m$.

Secara skematis, mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar

Mekanisme Adjustment BOP dengan Sistem Kurs Tetap



Akan tetapi, mekanisme otomatis untuk penyeimbangan (*adjustment*) BOP ini tidak dapat terjadi lagi karena pada umumnya sistem kurs tetap yang menggunakan standar emas ini tidak berlaku lagi sejak Dekrit Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971. Proses penyeimbangan *disequilibrium* atau *defisit/surplus BOP*, khususnya BOT di negara yang menganut sistem kurs mengambang dengan pengendalian pemerintah (*managed float*), dapat

dilakukan dengan menjalankan kebijakan perubahan kurs yang disebut devaluasi atau revaluasi.

Devaluasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uangnya (*domestik currency*) terhadap nilai mata uang asing (*foreign currency*) yang bertujuan (dalam jangka waktu relatif pendek) untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong ekspor dan membatasi impor sehingga diharapkan dapat memperbaiki posisi BOP atau BOT menjadi equilibrium atau mendekati equilibrium.
2. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri.
3. Dengan BOP yang equilibrium, diharapkan kurs valas diharapkan dapat menjadi relatif stabil.

Revaluasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah untuk menaikkan nilai mata uangnya (*domestik currency*) terhadap nilai mata uang asing (*foreign currency*) yang dilakukan karena perekonomiannya sudah mencapai atau mendekati full employed atau terjadi kecenderungan inflasi. Kebijakan ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi agregat demand dan inflasi. Selama berlakunya Bretton Woods System, kebijakan devaluasi dan revaluasi ini sangat jarang dilakukan oleh negara anggota IMF karena merupakan tindakan yang tidak populer. Di satu pihak, negara yang defisit biasanya menolak melakukan devaluasi karena

akan menunjukkan kelemahannya, sedangkan di lain pihak, negara yang surplus ingin terus mengakumulasi internasional reservenya.

Oleh karena itu, selama berlakunya Bretton Woods System (1950 - 1971) hanya tercatat beberapa negara industri yang melakukannya, yaitu sebagai berikut.

1. Devaluasi

- a. Inggris, tahun 1967
- b. Prancis, tahun 1957 dan 1969

2. Revaluasi

- a. Jerman (Barat), tahun 1961 dan 1969

Masalah neraca pembayaran dari negara-negara dunia ketiga sering mengekalkan diri sendiri karena mereka mengembangkan suatu struktur ekonomi dalam negeri yang tergantung pada peningkatan impor untuk kelanjutan pertumbuhan. Jadi ada bahaya bahwa ekspor barang primer yang mandek, ketidakmampuan untuk mengekspor barang-barang jadi dan beban pelunasan hutang yang berat akan menggagalkan usaha pembangunan dalam negeri mereka. Pemerintah Negara-negara berkembang ini akan tergoda untuk menerima lebih banyak bantuan, pinjaman dan arus modal swasta

Kebijakan Devaluasi

Pada umumnya kebijakan devaluasi relatif lebih banyak digunakan oleh negara-negara sedang berkembang dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari IMF. Salah satu contohnya adalah devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebanyak empat kali yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel

Tingkat Devaluasi Rupiah terhadap USD

Tgl/Tahun	Kurs Lama	Kurs Baru	Tingkat Devaluasi
23/8/1971	Rp. 378/USD	Rp. 415/USD	10%
15/11/1978	Rp. 415/USD	Rp. 625/USD	50%
30/3/1983	Rp. 720,50/USD	Rp. 970/USD	35%
12/9/1986	Rp. 1.134/USD	Rp. 1.644/USD	45%

IMF biasanya akan memberikan persetujuan kepada negara anggotanya yang mengalami defisit BOP yang berat untuk melakukan kebijakan devaluasi guna memperbaiki posisi BOP dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya. Secara teoritis, efektifitas kebijakan devaluasi akan tergantung kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Elastisitas permintaan barang ekspor (ED)
2. Elastisitas permintaan barang impor (ES).

Menurut Marshall-Lerner condition, suatu kebijakan devaluasi akan dapat memperbaiki posisi BOP bila dipenuhi syarat sebagai berikut:

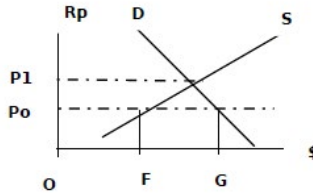
1. Devaluasi akan dapat memperbaiki BOP bila $E_d + E_s > 1$.
2. Devaluasi tidak akan dapat memperbaiki BOP bila $E_d + E_s = 1$
3. Devaluasi justru akan memperburuk posisi BOP bila $E_d + E_s < 1$.

Kebijakan devaluasi akan sangat tergantung pada elastisitas permintaan barang ekspor dan impor. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik, sebagai berikut:

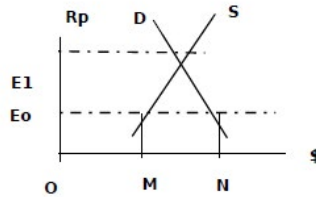
Grafik

Efektifitas Devaluasi

Grafik A



Grafik B



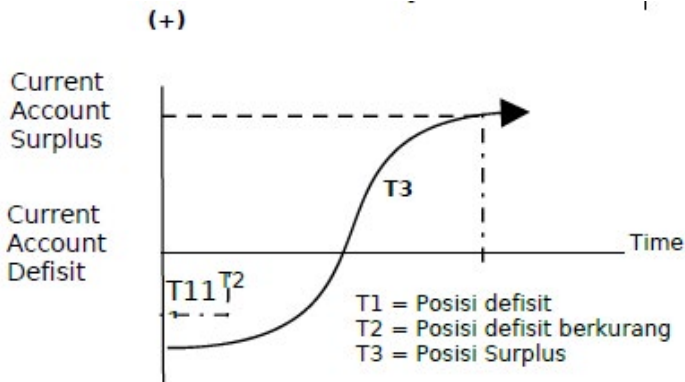
Keterangan:

Posisi defisit pada grafik A dan Grafik B adalah sama, yakni sebesar $FG = MN$. Pada grafik A di mana kurva *demand* dan *supply* bersifat elastis, ternyata posisi defisit sebesar FG dapat ditutup dengan devaluasi sebesar PO_1 . Pada grafik B di mana kurva *demand* dan *supply* inelastis, ternyata posisi defisit sebesar M dapat ditutup dengan devaluasi sebesar E_oE_1 . Sebagaimana kesimpulan dari kedua grafik di atas dapat dikemukakan catatan berikut:

- Sejalan dengan Marshall-Lerner condition, ternyata devaluasi akan efektif bila permintaan ekspor dan impor bersifat elastis.
- Dengan kata lain, pada grafik A yang elastis, ternyata hanya diperlukan devaluasi pada grafik B yang inelastis, ternyata diperlukan devaluasi yang lebih besar, yaitu E_oE_1 .

Grafik

Efek Kurva J dari Devaluasi



Keterangan:

1. Kebijakan devaluasi biasanya dalam jangka pendek justru akan lebih memperberat defisit *current account*.
2. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kuantitas ekspor dan impor sebagai akibat perubahan harga yang disebabkan oleh devaluasi memerlukan waktu untuk penyesuaian.
3. Biasanya dalam waktu singkat justru penerimaan devisa ekspor relatif akan lebih cepat menurun karena adanya penyesuaian-penyusuaian harga barang ekspor di dalam negeri sehingga ekspor menjadi tertunda dan diperlukan kontrak baru, sedangkan pengeluaran devisa untuk impor menurun lebih lambat karena harga barang impor di luar negeri dalam valas tidak akan berubah.
4. Biasanya setelah periode tertentu (satu hingga tiga bulan penyesuaian harga ekspor dan impor), kurva J

Kebijakan Valuta Asing/ Foreign Currency/Foreign Exchange

Krisis ekonomi Asia yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ketingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Misalnya IMF, dalam World Economic Outlook edisi Mei 1998, merevisi kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sekitar 3 persen dari perkiraan 3,5 persen pada bulan Desember 1998 dan 4,25 persen pada bulan Oktober 1998. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan terjadi pada negara-negara yang tahun ini masih mengalami krisis ekonomi, yaitu Indonesia, Korea, dan Thailand. Negara-negara ini akan mengalami penurunan yang tajam pada sisi permintaan domestik dan impornya. Pada skala yang lebih kecil, penurunan pertumbuhan juga akan terjadi pada Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Di antara negara maju, prospek jangka pendek Jepang nampak memburuk. Terkait dengan berbagai kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara-negara Asia yang merupakan mitra dagang utamanya, pemulihan ekonomi Jepang terhambat karena berbagai persoalan ekonomi domestik, seperti sektor keuangan yang lemah dan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang yang macet, keterlambatan penerapan reformasi struktural, serta berkurangnya rangsangan fiskal dalam tahun 1997 seperti peningkatan pajak konsumsi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat tetap pada tingkat yang terjaga. Kondisi permintaan domestic yang kuat di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris serta beberapa negara Eropa Barat lainnya diharapkan dapat mendorong perbaikan posisi neraca pembayaran yang diperlukan negara-negara Asia sehubungan dengan menurunnya aliran modal asing masuk ke kawasan tersebut. Negara-negara Asia yang sedang mengalami proses restrukturisasi berpeluang untuk meningkatkan ekspor ke negara negara maju tersebut. Meskipun

sejauh ini krisis negara-negara Asia masih terbatas pengaruhnya pada pertumbuhan dunia, namun demikian kondisi krisis ini bersama-sama dengan penurunan harga minyak bumi dapat menyebabkan perubahan yang cukup luas terhadap perkembangan perdagangan dunia. Beberapa negara mungkin mengalami akibat yang menyakitkan. Negara-negara tersebut diharapkan tidak mengadakan hambatan perdagangan ataupun depresiasi nilai tukar yang berlebihan untuk meningkatkan daya saingnya. Reaksi defensif ini akan berakibat 'counterproduktif', memperlambat proses keluar dari krisis, dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi dunia. Krisis ekonomi di beberapa negara Asia (Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand) memberikan efek pada pasar komoditi dunia melalui beberapa salurannya, yaitu:

Pertama, harga-harga komoditi ekspor kelima negara yang mengalami krisis akan turun dalam dollar AS karena adanya devaluasi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditi impor yang naik akan mengurangi permintaan akan impor.

Ketiga, dua efek terdahulu akan memberikan pengaruh pula pada pertumbuhan ekonomi negara lain dengan besaran yang berbeda-beda.

Keempat, harga komoditi yang turun pada pasaran dunia akan mengurangi pula pendapatan ekspor negara-negara lain. Komoditi pertanian merupakan komoditi yang banyak terpengaruh krisis ekonomi seperti karet alam, kayu tropis, dan padi. Indonesia, Thailand, Malaysia merupakan negara penghasil dan eksportir sebagian besar komoditi tersebut. Sebagai contoh adalah meningkatnya ekspor beras Thailand sekitar 100 persen dalam bulan Januari 1998 dibanding bulan yang sama pada tahun 1997 sebagai

akibat dari menurunnya harga beras ekspor sekitar 18 persen. Peningkatan ekspor beras Thailand ini mungkin akan mengurangi peluang pasar ekspor Pakistan dan India.

Konstelasi moneter dunia sangat dipengaruhi oleh nilai valas (*foreign exchange* atau *forex*) yang diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional, yang biasanya melalui kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut sebagai *hard currency*, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang

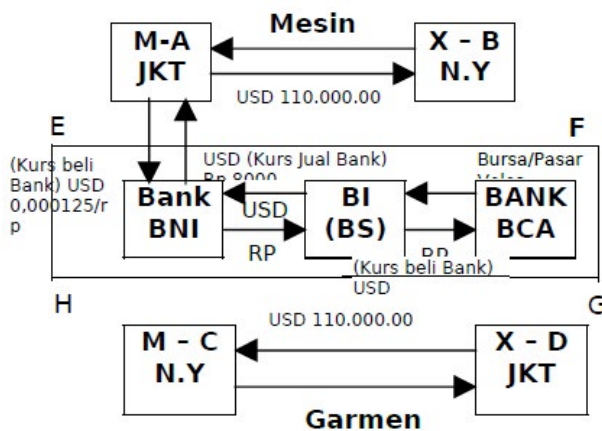
lainnya. *Hard currency* pada umumnya berasal dari negara-negara industri maju, seperti USD, JPY, DEM, GBP, FRF, AUD dan SFR.

Sedangkan *soft currency* adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran, biasanya seperti negara berkembang, seperti rupiah-Indonesia, peso-Filiphina, bath-Thailand dan rupee-India. Total valas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara disebut juga sebagai cadangan devisa, yang diketahui dari *balance of payment* (BOP) atau sering disebut juga neraca pembayaran internasional. Dimana makin banyak devisa yang dimiliki pemerintah atau penduduk suatu negara, makin berarti besar kemampuan negara tersebut dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan sudah pasti makin kuat juga nilai mata uang negara tersebut. Cadangan devisa suatu negara biasanya dikelompokkan atas:

1. Cadangan devisa resmi (*official forex reserve*) atau cadangan devisa negara yang dikelola, dikuasai, diurus dan ditatausahakan oleh Bank Sentral Indonesia.

2. Cadangan devisa nasional (*country forex reserve*) yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional (termasuk milik bank umum nasional). Bursa atau pasar valas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem dimana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atas valas (*forex*).

Siklus Mekanisme Bursa Valas



Keterangan:

M - A = Importir mesin di Jakarta.

X - B = Eksportir mesin di New York.

M - C = Importir garmen di New York

X - D = Eksportir garmen di Jakarta

B.I = Bank Indonesia.

B.S = Bank Sentral

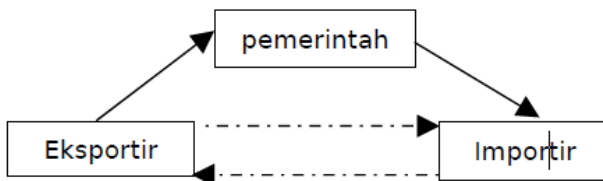
EFGH = Bursa/Pasar valas.

Tiga prinsip pokok dalam bursa valas adalah sebagai berikut:

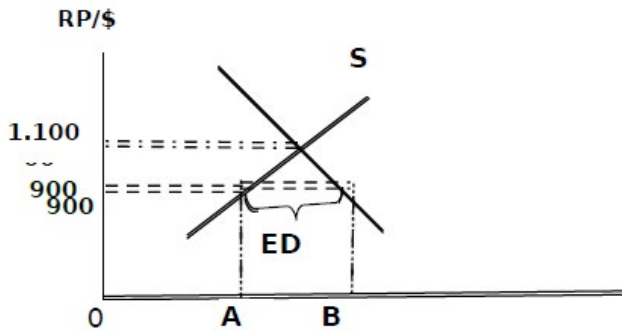
1. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau *money changer* atau pedagang valas.
2. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual.
3. Kurs jual/beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli/jual dari mata uang (valas) lawannya. Dengan kata lain, kurs jual/beli USD adalah sama dengan kurs beli/jual IDR.

Pengawasan Devisa (Exchange Control)

Exchange control adalah bentuk pengawasan atau pengontrolan aliran asing masuk ke dalam negeri dengan jalan membuat semua transaksi ekspor dan impor harus melalui pemerintah.



Transaksi antara eksportir dengan importir harus melalui pemerintah terlebih dahulu, tdk boleh melakukan hubungan dagang langsung. Ada juga sistem lain yang dipakai pemerintah atau negara apabila *supply* valuta asing dalam negerinya relatif sedikit dibandingkan dengan permintaannya.



Penawaran sebesar OA, sedangkan permintaan OB, berarti terjadinya *excess demand* sebesar AB. Dalam hal ini pemerintah tak mampu untuk memenuhi permintaan akan valuta asing tersebut. Maka untuk mengatur pemakaian valuta asing yang tersedia relatif sedikit tersebut, pemerintah melakukan dua sistem, *sistem prioritas* dan *sistem distribusi*, yaitu:

1. *Sistem prioritas* adalah pemerintah akan menyeleksi permintaan dan penawaran valuta asing dari importir dan eksportir, mana yang harus diprioritas terlebih dahulu, dan mana pula yang harus ditunda buat sementara serta yang benar-benar tidak diizinkan.
2. *Sistem distribusi* adalah pemerintah membagi-bagikan valuta asing yang tersedia kepada eksportir dan importir secara adil, sesuai dengan kebutuhannya.

Pada sistem *exchange control*, kurs selalu berada di bawah kurs normal (kurs di pasar). Pada gambar di atas terlihat bahwa kurs normal adalah \$1 = Rp.1.100,00. tetapi kenyataannya kurs yang berlaku adalah \$1 = 900. akibatnya sering terjadi pasar gelap (*black market*), dengan kata lain transaksi jual-beli valuta asing terjadi tanpa sepengetahuan pemerintah dengan sistem kurs yang berada antara kurs normal dengan kurs yang berlaku.

BAB VIII

SISTEM MONETER INTERNASIONAL

Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang dilakukan oleh semua negara di seluruh dunia yang mengkaji pembayaran tentang transaksi lintas negara. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, maka akan memberi kemudahan dalam memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan dapat mempermudah penyesuaian terhadap perubahan-perubahan perekonomian. Pembahasan utama dalam sistem moneter internasional adalah menentukan pengaturan sistem nilai tukar.

Sejak berlakunya sistem standar emas sampai dengan abad ke-20, sistem moneter internasional telah banyak mengalami pasang surut. Perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi yang terjadi, dan sampai saat ini sistem moneter internasional ini masih menyita perhatian semua negara untuk menjadikannya lebih berfungsi secara optimal.

Pengertian Sistem Moneter Internasional

Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Atau dengan kata lain sistem moneter internasional merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara, yang berperan besar dalam lalu lintas finansial internasional. Sistem devisa yang digunakan oleh satu negara dengan negara yang lain dapat berbeda-beda. Sistem ini

menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat memengaruhi kurs (nilai) tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan.

Sejak dimulainya sistem standar emas hingga abad ke-20, sistem moneter internasional telah mengalami pasang surut. Perubahan dari sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi pada saat itu. Sampai saat itu pun sistem moneter internasional masih menjadi perhatian semua negara dan masih ingin mengubah sistemnya menjadi lebih berfungsi optimal. Setelah kurs dibiarkan mengambang, fluktuasi kurs mata uang dunia menjadi semakin tinggi dan makin sulit diprediksi.

Kejadian penting utama setelah Bretton Woods berakhir adalah embargo minyak negara OPEC yang cukup sukses (Oktober, 1973). Pada 1974 harga minyak cenderung melakukan kebijakan sangat tajam. Kurs dollar Amerika Serikat dan juga kurs mata uang lainnya, di masa mendatang akan berfluktuasi sama seperti sekitar 20 tahun terakhir ini. Selama tidak ada patokan yang pasti, kurs mata uang di masa mendatang akan mengalami fluktuasi yang tidak bisa diprediksi.

Beberapa ekonom mulai menganjurkan kembali ke sistem kurs tetap. Tetapi sampai saat ini belum ada model ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini, yang bisa menjamin stabilitas kurs. Sistem yang ideal mencakup dua hal, yaitu: (1) sistem harus kredibel atau yang layak dipercaya, dan (2) sistem harus mempunyai mekanisme stabilitas harga yang otomatis (*build in*). Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund, IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca pembayaran tiap negara. Salah satu tujuannya adalah membantu negara-negara yang

mengalami kesulitan ekonomi serius, dan konsekuensinya adalah negara yang bersangkutan wajib melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Setelah melalui pertimbangan panjang dan hati-hati, sebuah sistem moneter disepakati di Bretton Woods. Negara-negara anggota sepakat untuk mengontrol batas kurs mereka dengan cara yang sudah ditentukan.

Perkembangan Sistem Moneter Internasional

Sistem moneter internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: standar emas, periode perang 1918-1939, standar barang bukan emas (*Bretton Woods*), dan setelah tahun 1973.

1. Standar Emas (1876-1913)

Penentuan mata mata uang ke emas dan penjaminan konvertibilitas dikenal sebagai standar emas (*gold standard*). Sebagian besar negara-negara dalam perdagangan utama dunia, seperti Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat telah mengadopsi standar emas. Sistem standar emas internasional dimulai pada 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai poundsterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris dan berkembangnya perdagangan dunia pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini makin diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Atas dasar itu, telah menjadikan sistem standar emas digunakan banyak negara sejak 1870-an hingga Perang Dunia Pertama. Sebagai contoh, di bawah standar emas, satu dollar Amerika Serikat didefinisikan sebagai setara dengan 23,22 butir emas murni (US\$ 1,0 = 23,22 butir emas). Dalam 1 (satu) ons emas setara dengan 480 butir atau sama dengan US\$ 20,67, sedangkan 1 ons emas bernilai 4,25 poundsterling. Dengan demikian, dapat dihitung nilai tukar untuk konversi poundsterling ke dollar AS yaitu £ 1,0 = \$ 4,87.

Perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Pemerintah atau negara yang bersangkutan harus menjaga persediaan emas yang cukup untuk menjamin jual-beli emas. Jika pemerintah di negara lain juga menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan emas, maka kurs antar dua mata uang bisa ditentukan. Nilai emas terhadap barang lain tidak banyak berubah dalam jangka panjang, stabilitas nilai uang dan kurs mata uang juga tidak banyak berfluktuasi dalam jangka panjang.

Standar emas berbeda dengan mata uang fiat (*fiat money*). Dalam mata uang fiat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemauan pemerintah dalam rangka menjaga integritas mata uang tersebut. Sering kali kepercayaan itu disalahgunakan. Pemerintah kadang tergoda menerbitkan uang baru, karena biaya produksi penerbitan tersebut adalah 0 rupiah. Dengan menggunakan standar emas, pemerintah tidak bisa secara leluasa menambah jumlah uang yang beredar, karena suplai uang dibatasi oleh suplai emas. Dengan proses tersebut kurs mata uang bisa terjaga selama negara-negara di dunia memakai emas sebagai standar mata uangnya. Inflasi yang berkepanjangan tidak akan terjadi di dalam situasi semacam itu.

Adanya Perang Dunia I (1919-1923) bersamaan dengan depresi dunia (1931-1934), negara-negara di Eropa dilanda inflasi dan ketidakstabilan politik. Sistem moneter Internasional menjadi kacau, sehingga menimbulkan kurang percayanya dunia terhadap poundsterling yang masih dikaitkan dengan emas. Poundsterling makin lama makin lemah posisinya, dan adanya keharusan Inggris untuk memberi bantuan kepada Jerman. Akhirnya pada 1931 Inggris menanggalkan standar emas dan karena itu nilai poundsterling jatuh, untuk selanjutnya diikuti pula oleh dollar Amerika Serikat.

2. Periode Antara Perang (1918-1939)

Standar emas cukup baik dari 1870 sampai awal Perang Dunia I pada 1914, setelah periode itu ia ditinggalkan. Selama perang, beberapa pemerintahan membiayai pengeluaran yang besar untuk militer mereka dengan mencetak uang. Hal ini mengakibatkan terjadi inflasi dan pada akhir 1918 tingkat harga menjadi lebih tinggi yang terjadi di mana-mana. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada 1919, Britania Raya pada 1925, dan Perancis pada 1928.

Britania Raya kembali ke standar emas dengan mematok pound untuk emas pada tingkat pasar £ 4,25 per ons, meskipun inflasi cukup besar antara 1914 dan 1925. Barang-barang Inggris ke luar dari pasar luar negeri, sehingga mendorong negara itu ke dalam depresi berat. Ketika pemegang pound asing kehilangan kepercayaan dalam komitmen Inggris untuk mempertahankan nilai mata uangnya, mereka mulai mengubah kepemilikan pound mereka menjadi emas. Pemerintah Inggris melihat bahwa tidak bisa memenuhi permintaan emas tanpa habisnya cadangan emas, sehingga ditanggihkan konvertibilitas pada 1931.

Amerika Serikat mengikuti dan meninggalkan standar emas pada 1933, namun kembali pada 1934, menaikkan harga dollar terhadap emas dari senilai \$ 20,67 per ons menjadi \$ 35 per ons. Karena lebih banyak dollar yang dibutuhkan untuk membeli satu ons emas dari sebelumnya, implikasinya adalah bahwa nilai dollar berkurang. Terjadilah devaluasi dollar terhadap mata uang lainnya. Jadi sebelum devaluasi, nilai tukar pound per dollar adalah £ 1,0 = \$ 4,87, tetapi setelah devaluasi itu £ 1,0 = \$ 8,24. Dengan mengurangi harga ekspor Amerika Serikat dan meningkatkan harga impor, pemerintah berusaha untuk menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat dengan meningkatkan output (pemerintah AS pada dasarnya menggunakan kurs sebagai instrumen kebijakan perdagangan, sesuatu yang sekarang dituduhkan pada Cina). Namun sejumlah negara lain mengadopsi taktik yang sama, dan dalam siklus devaluasi

kompetitif yang segera muncul, tidak ada negara bisa menang.

Hasilnya berupa hancurnya kepercayaan terhadap sistem yang ada. Bagi negara-negara yang mendevaluasi mata uangnya sesuka hati, publik tidak lagi yakin berapa banyak emas yang dapat dibeli dengan mata

uang mereka. Alih alih memegang mata uang negara lain, orang sering mencoba untuk mengubahnya menjadi emas segera, supaya negara mendevaluasi mata uangnya dalam periode intervensi. Hal ini menempatkan tekanan pada cadangan emas di berbagai negara, memaksa mereka untuk menangguk konvertibilitas emas. Menjelang awal Perang Dunia II yaitu pada 1939, standar emas sudah tidak berlaku lagi.

3. Standar Barang bukan Emas (Zaman Bretton Woods)

Dengan adanya Perang Dunia I pada 1919-1923 serta depresi dunia (1931-1934), negara-negara Eropa dilanda inflasi dan ketidakstabilan politik. Sistem moneter internasional menjadi kacau. Kekacauan ini menimbulkan poundsterling yang dikaitkan dengan emas kurang dipercayai oleh masyarakat internasional. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa keadaan ini menjadikan poundsterling menjadi lemah posisinya, apalagi adanya keharusan bagi negara Inggris untuk memberi bantuan ke negara Jerman. Akhirnya pada 1931, Inggris menanggalkan standar emas dan nilai poundsterling menjadi jatuh lalu diikuti pula oleh jatuhnya dollar Amerika Serikat. Dalam keadaan kacau tersebut negara-negara Eropa ingin mempertahankan kurs yang tetap, namun usaha ini sia-sia. Untuk mengatasi kekacauan itu, negara-negara tersebut mengubah sistem kurs dari kurs tetap ke sistem kurs fleksibel (nilai tukar yang mengambang).

Pada 1 sampai 22 Juli 1944 diadakan pertemuan *International Monetary and Financial Conference* di Bretton Woods, New Hampshire

Amerika Serikat, suatu konferensi moneter internasional yang dihadiri oleh 44 negara, kemudian dikenal dengan *Bretton Woods Conference*. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan dan pengawasan sistem moneter. Dua tahun setelah konferensi tersebut, maka secara resmi didirikan dua lembaga, yaitu: (1) International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), yang dikenal dengan Bank Dunia (World Bank). (2) International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional yang berdiri pada 1947.

Bank Dunia (World Bank) pada mulanya bertujuan membantu membangun kembali negara-negara Eropa yang rusak akibat peperangan, kemudian berfungsi juga sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi negara-negara anggota, IMF berfungsi:

- a. Meletakkan dasar yang kuat untuk pengaturan pembayaran internasional.
- b. Sebagai tempat konsultasi, serta kerja sama di bidang pembayaran internasional
- c. Membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional, baik dengan bantuan jangka pendek, maupun mempertahankan dan menetapkan laju tukar.
- d. Menciptakan dan mendistribusikan cadangan internasional dalam bentuk *special drawing rights* (SDR).

Pada awalnya kurs valuta asing yang dipakai IMF adalah kurs tetap (*fixed exchange rate*), kemudian sistem itu berubah menjadi *adjusttable peg*, yaitu suatu mata uang yang nilainya ditetapkan dalam perbandingan dengan mata uang negara lainnya. Perbandingan ini hanya boleh diubah jika negara itu mengalami ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran, setelah berkonsultasi dengan IMF.

Selama 1944-1973, dollar Amerika Serikat merupakan mata uang yang sangat penting di dalam lalu lintas pembayaran internasional,

karena mata uang ini merupakan satu-satunya sumber yang tersedia sehabis Perang Dunia II, sehingga dollar banyak diminta dan diminati. Konsekuensinya emas menjadi tergeser oleh dollar, sebab di samping mempunyai daya beli yang kuat, juga cadangan dalam bentuk dollar akan menghasilkan bunga. Setiap negara anggota menetapkan perbandingan mata uangnya terhadap dollar. Untuk mengatur kestabilan nilai tukar, sistem IMF mengharuskan stabilisasi kurs oleh bank-bank sentral negara anggota. Misalnya $\text{£ } 1,0 = \text{US\$ } 2,40$, Bank Sentral London mengizinkan kurs tersebut berfluktuasi antara $\text{US\$ } 2,38 - 2,42$. Jika $\text{£ } 1,0 = \text{US\$ } 2,38$, Bank Sentral London menjual dollar untuk mendapatkan poundsterling dan jika $\text{£ } 1,0 > \text{US\$ } 2,42$, Bank Sentral London membeli dollar dengan poundsterling, sehingga nilai $\text{£ } 1,0 = \text{US\$ } 2,40$ dapat dipertahankan.

Selama keberadaan IMF, beberapa hal yang telah dicapai yaitu:

- a. Berhasil mempertahankan peningkatan yang cepat dari volume perdagangan dan investasi.
- b. Menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional.
- c. Semakin meningkatkan efisiensi (bahkan terjadi penurunan persentase cadangan devisa).
- d. Semakin tangguh dan berhasil melewati masa krisis awal pada 1971, mengatasi kegiatan spekulatif, dan bertahan dalam siklus bisnis yang bergejolak.
- e. Mendukung tumbuhnya kerja sama internasional.
- f. Membangun kapasitas untuk mengakomodasi reformasi maupun perbaikan.

4. Sistem Moneter Setelah Tahun 1973

Semenjak 1973 sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang

yen, dollar Kanada, franc Perancis dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah hal ini bank sentral menjual valuta asing. Demikian juga apabila surplus di dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs demikian di sebut *managed* atau *dirty float*, sebagai lawan dari *clean float*, yaitu bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. Lima negara Eropa, Jerman Barat, Belgia, Luksemburg, Swedia, Belanda, dan Norwegia mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Sistem kurs semacam ini yaitu mengambang bersama-sama, menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular, yang kemudian disebut "*snake like*".

Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dollar Amerika Serikat Berarti bahwa, telah menjadikan mata uangnya yang mengambang. Namun demikian, dollar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran Internasional Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, dan catatan-catatan statistik dari IMF dan PBB masih menggunakan dasar mata uang dollar.

Sistem Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Mata Uang

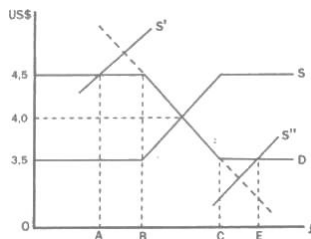
1. Standar Emas

Pada abad XIX (1870-1914), emas dipakai sebagai standar nilai tukar yang berlaku mulai tahun 1870 karena perkembangan yang terjadi dalam industri di Inggris dan makin berkembangnya

perdagangan dunia pada abad ke-19. Standar emas merupakan nilai yang dikaitkan dengan setiap mata uang nasional tiap negara, tetapi tidak berubah sejak 1870 sampai dengan Perang Dunia I. Hal ini karena masa sebelum Perang Dunia I keadaan ekonomi dan politik dunia dalam situasi yang tenang, sehingga memungkinkan beberapa negara dapat memetik pengalaman yang berharga dari keberhasilan sistem standar emas. Bekerjanya sistem standar emas bagi suatu negara terjadi apabila:

- Nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu.
- Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas.
- Pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas.

Untuk menjelaskan sistem standar emas ini dapat diuraikan melalui ilustrasi pada Gambar 13.1 di bawah ini. Misalnya Amerika Serikat menetapkan $US\$ 4,0 = 0,5$ gram emas, sedangkan Inggris $£ 1,0 = 0,5$ gram emas, berarti $£ 1,0 = US\$ 4,0$. Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka nilai tukar ini bersifat tetap. Namun dalam realitanya nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai dengan ongkos angkut emas itu dari suatu negara ke negara lain. Jika ongkos angkut untuk 0,5 gram emas sama dengan $US\$ 0,5$, maka $£ 1,0 = US\$ 4,5$ yang merupakan titik emas ekspor dari Amerika Serikat ke Inggris dan $£ 1,0 = US\$ 3,5$ adalah titik emas impor dari Inggris ke Amerika Serikat, masing-masing merupakan batas tertinggi dan terendah dari nilai tukar.



Gambar .1.
Sistem Nilai Standar Emas

Jika ada penurunan ekspor Amerika Serikat, yang berarti impor lebih besar dari ekspor, penawaran £ bergeser dari S ke S', maka nilai tukar naik ke $\text{£ } 1,0 = \text{US\$ } 4,5$ dan defisit sebesar AB. Defisit ini akan mengakibatkan aliran emas ke luar sebesar defisit tersebut atau dapat ditunjukkan dalam Gambar 13.1 ada sejumlah AB satuan emas yang ke luar dari Amerika Serikat. Sebaliknya jika kurva S bergeser ke S'', artinya ekspor meningkat dan lebih besar dari impor, akan terjadi surplus neraca perdagangan sebesar CE, maka akibatnya emas masuk ke Amerika Serikat.

2. Sistem Nilai Tukar Mengambang (*Flexible Exchange Rate*)

Sifat dari nilai tukar tergantung dengan sifat pasar. Transaksi valuta asing secara bebas di pasar, akan membuat nilai tukar berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas atau disebut *clean /loot* tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kurs, misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah, atau penilaian terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah.

Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola (*managed float*), yang sering disebut juga sebagai *dirty float*, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensi bank sentral, yaitu:

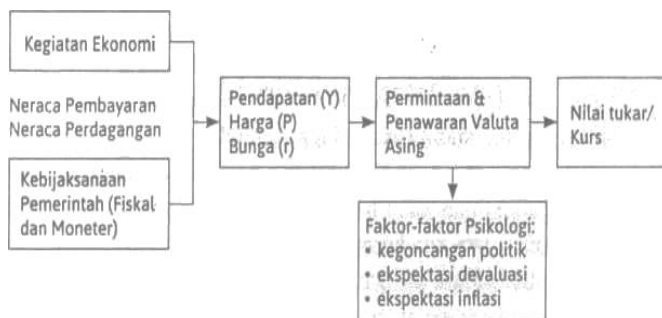
- a. Menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilisasi kurs agar perubahan atau pergerakan kurs tetap teratur.
- b. Menunda kurs (*leaning against the wind*). Melalui cara ini bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau

mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam, yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara.

- c. Kurs tetap secara tidak resmi (*unofficial pegging*). Melalui cara ini bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan (secara resmi) kurs mata uangnya.

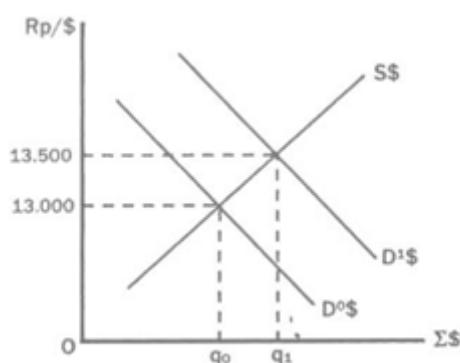
Di dalam pasar bebas, perubahan kurs tergantung dengan beberapa faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Transaksi otonom debit dan kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dan luar negeri, termasuk pendapatan, harga, dan tingkat bunga, untuk kemudian akan memengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar. Semua kegiatan ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah—fiskal dan moneter—yang memengaruhi pendapatan, harga, dan tingkat bunga yang secara tidak langsung akan memengaruhi nilai tukar. Hal ini dapat diperlihatkan dalam skema pada Gambar 13.2.

Dari skema itu dapat dijelaskan, misalnya ada kebijaksanaan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran (G naik), maka mengakibatkan pendapatan naik (Y naik) dan harga naik (P naik). Selanjutnya mendorong kenaikan impor (M naik), dan ini berarti bahwa permintaan valuta asing akan meningkat. Meningkatnya permintaan akan valuta asing dapat berakibat nilai tukar valuta asing naik, sehingga terjadi depresiasi mata uang sendiri. Di samping pengaruh faktor ekonomi, pengaruh faktor psikologi yang berupa kegoncangan politik, harapan akan terjadi devaluasi dan/atau inflasi, akan menimbulkan kepanikan masyarakat di dalam negeri, sehingga tidak mustahil mengakibatkan larinya dana ke luar negeri yang satu sama lain dapat mengakibatkan kurs valuta asing akan naik.



Gambar 2. Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar

Melalui grafik pada kurva permintaan dan penawaran dalam Gambar 3 dapat dijelaskan terjadinya depresiasi (devaluasi) mata uang atau menurunnya nilai mata uang negara tertentu dibandingkan dengan mata uang negara yang lain. Pengeluaran pemerintah yang meningkat, jumlah uang beredar bertambah banyak, dan berubahnya selera masyarakat, semuanya itu akan membuat mengalirnya modal ke luar negeri yang digambarkan oleh bergesernya kurva permintaan valuta asing dari $D^0\$$ ke $D^1\$$. Pergeseran kurva permintaan valuta asing ke atas dengan kurva penawaran dollar ($S\$$) tidak berubah, pada akhirnya akan terjadi depresiasi mata uang tertentu, misalnya mata uang rupiah kita dari Rp 13.000 menjadi Rp 13.500 per dollar Amerika Serikat.



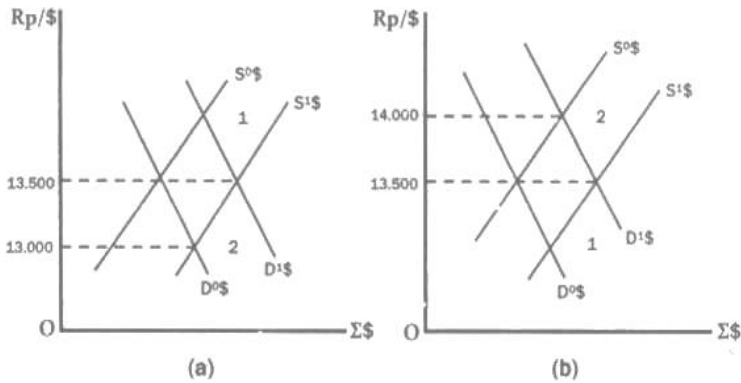
**Gambar 3.
Pergeseran Kurva Permintaan Dollar**

Jika pemerintah melaksanakan kebijakan nilai tukar tetap atau stabil, tetapi untuk swasta bebas, maka perubahan kurs itu masih terjadi dalam batas yang kecil. Lain halnya jika pemerintah menguasai sepenuhnya transaksi valuta asing, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran atau dikenal dengan *exchange control*. Di dalam sistem moneter standar emas, kurs valuta asing relatif tetap atau hanya berubah-ubah dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas.

3. Sistem Nilai Tukar Tetap/Stabil (*Fixed Exchange Rate*)

Nilai tukar yang stabil (*fixed*) dapat timbul secara aktif dan pasif. Aktif yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs (*stabilization funds*) dan pasif berarti suatu negara menggunakan sistem standar emas. Jika ada kecenderungan nilai tukar akan turun, pemerintah membeli valuta asing di pasar. Demikian sebaliknya, bila ada kecenderungan nilai tukar akan naik, maka pemerintah menjual valuta asing, sehingga kestabilan nilai tukar dapat dipertahankan.

Untuk menjelaskan sistem kurs tetap ini dapat diuraikan melalui ilustrasi Gambar 4 di bawah ini. Gambar 4 (a) menunjukkan, karena sesuatu hal, ekspor naik, berarti penawaran dollar bergeser dari $S^{\circ}\$$ ke $S^1\$$. Kalau permintaan dollar tetap pada $D^{\circ}\$$, maka ada kecenderungan nilai tukar turun dari Rp 13.500 menjadi Rp 13.000 per dollar. Untuk mencegah agar nilai tukar rupiah tidak turun, maka pemerintah membeli dollar di pasar bebas. Pembelian dollar di pasar bebas, mengakibatkan permintaan dollar naik dari $D^{\circ}\$$ ke $D^1\$$ sampai pada keseimbangan semula Rp 13.500 per dollar.

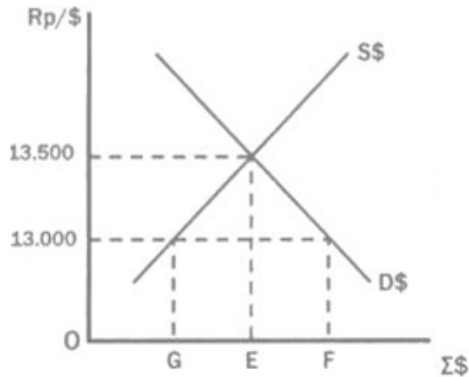


Gambar 4. Xebijaksanaan Stabilisasi Nilai Tukar

Gambar 4 (b), dengan mengumpamakan pendapatan (Y) atau harga (P) naik, akan menyebabkan impor naik, yang berarti permintaan dollar naik dari $D^{\circ}\$$ ke $D^1\$$. Agar nilai dollar tidak naik menjadi Rp 14.000/\$, pemerintah melakukan penjualan dollar di pasar sampai kondisi awal tercapai, yaitu pada saat nilai per dollar sama dengan Rp 13.500.

4. Pengawasan Devisa (*Exchange Control*)

Dalam sistem pengawasan devisa, pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal ke luar negeri dan melindungi pengaruh depresiasi dari negara lain, terutama dalam hal negara tersebut memiliki keterbatasan dalam cadangan valuta asing dibandingkan dengan permintaannya. Dalam sistem pasar bebas, nilai tukar berada dalam keseimbangan. Gambar 5 di bawah ini menunjukkan keseimbangan nilai tukar, yaitu misalnya US\$ 1,0 = Rp 13.500. Umumnya pengawasan devisa uang suatu negara, bila terjadi nilainya terlalu tinggi terhadap harga di pasar bebas (*overvalued*). Pada nilai tukar Rp 13.000/US\$ terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) dollar sebesar GF, maka pemerintah harus menyuplai sejumlah tertentu dolarnya, pada nilai tukar tertentu.



Gambar 5

Sistem Nilai Tukar dalam Pengawasan Devisa

Pemerintah dapat menetapkan nilai tukar mata uang dengan:

- a. Hanya satu jenis saja (*single exchange rate system*), yaitu tidak tergantung dengan tujuan penggunaan devisa.
- b. Lebih dari satu macam nilai tukar (*multiple exchange rate*), tergantung dari tujuan penggunaan devisa, misalnya nilai tukar yang tetap dan bebas yang dilengkapi dengan sistem lisensi impor dan kuota impor.

Pengalokasian devisa oleh pemerintah dapat menggunakan tiga cara, yaitu: (1) alokasi-untuk individu (*individual allocation*), (2) pertukaran kuota (*exchange quota*), dan (3) daftar tunggu (*waiting list*). Pada

umumnya tujuan suatu negara menjatankan pengawasan devisa adalah:

- a. Mencegah terjadinya aliran modal ke luar negeri, dan menekan neraca pembayaran yang tidak seimbang (*disequilibrium*).
- b. Melindungi industri dalam negeri dengan membatasi impor.
- c. Memperoleh pendapatan bagi pemerintah, yaitu dari keseluruhan pembelian dan penjualan valuta asing oleh pemerintah.

- d. Impor bersyarat, yaitu menggunakan devisa untuk impor dengan syarat importir harus membeli juga produk dalam negeri (*tie in import arrangement*).

Kelemahan Sistem Moneter Internasional

1. Inflasi berkepanjangan

Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap (*fixed exchange rate*) dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem standar emas hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Sistem moneter internasional saat ini tidak mengatur interdependensi (saling mengait) antara berbagai mata uang dan juga tidak menstabilkan harga. Alih-alih mengandalkan keseimbangan yang dihasilkan secara otomatis, AS terpaksa harus “menekan” mitra dagangnya yang mengancam layaknya musuh.

2. Stabilisasi mata uang terhadap dollar

Setelah revolusi di Eropa Timur dan hancurnya komunisme, kita tiba-tiba memiliki 10 negara baru yang masuk dalam sistem moneter internasional (pecahan Uni Soviet) seluruhnya dengan mata uang yang baru atau kebutuhan baru terhadap kebijakan mata uangnya. Sistem moneter seperti apa yang seharusnya Michel Camdessus-Managing Director IMF saat itu—rekomendasikan kepada seluruh negeri-negeri baru itu? Jawabannya akan menjadi nyata sebelum tahun 1971: setiap negara itu mesti menstabilkan mata uangnya terhadap dollar AS atau terhadap salah satu mata uang yang stabil yang berhadapan dengan dollar AS yang dikaitkan dengan emas.

3. Perlu kepemimpinan negara yang kuat

Memperbaiki nilai tukar terhadap blok dollar yang meliputi hampir seluruh ekonomi dunia, telah memberi negara-negara transisi baru yang relatif memiliki tingkat harga yang stabil di antara negara-negara Barat. Sekarang ditunjukkan kontribusi amat penting oleh IMF di antara awal pendiriannya pada 1946 dan 1971. Pada awal pendiriannya IMF memberi negara-negara sebuah filosofi manajemen makro ekonomik yang logis berdasarkan nilai tukar tetap atau terkendali (*fixed exchange rate*). Kesepakatan yang luar biasa ini sekarang diserahkan kepada para pemimpin moneter domestik. Untuk meyakinkan, sebuah negara dapat memperbaiki mata uangnya terhadap salah satu mata uang utama seperti dollar AS. Pada praktiknya, kebijakan seperti itu memerlukan aksi dari kepemimpinan yang kuat; rencana stabilisasi (inflasi) melibatkan nilai tukar tetap yang diterapkan di Argentina oleh Domingo Cavallo yang menggambarkan betapa jarang kualitas pemimpin seperti itu. Dalam periode nilai tukar tetap sebelum 1971, kepemimpinan yang kuat tidak diperlukan, sebab ada sebuah sistem di mana mayoritas negara mematuhi dan IMF memiliki seperangkat aspek teknis untuk menerapkannya. Namun setelah 1971, IMF kehilangan sentuhan tersebut ketika beralih dari nilai tukar tetap (terhadap emas) sebelum 1971 menjadi nilai tukar mengambang setelah 1971 dan khususnya setelah 1973, tahun di mana sistem moneter internasional membatalkan nilai tukar tetap beralih ke nilai tukar mengambang.

4. Peralihan fungsi IMF

IMF kemudian bergeser tugasnya sebagai pusat sistem moneter internasional menjadi peran baru sebagai konsultan

makroekonomi khusus dan pengawas utang (bahkan broker utang), fungsi yang sebenarnya bisa diperankan dengan baik oleh konsultan swasta. Ketika tantangan dari negara-negara transisi muncul, IMF tidak memiliki sistem yang saling mengait untuk stabilitas moneter untuk menawarkan sistem yang baik dan hampir tanpa pengecualian sering kali konsep yang ditawarkan serampangan. Kegagalan negara transisi dibuktikan dengan fakta bahwa tidak satupun negara-negara tersebut akhir 1996, mampu melampaui tingkat pendapatan sejak masa transisi bermula, dan hanya dengan satu atau dua pengecualian, inflasi kembali mencapai 2 digit. Perbaikan sejak akhir perang dingin sejauh ini lebih memburuk dibanding perbaikan di akhir sebagian besar Perang Dunia (I dan II) yang amat menghancurkan.

5. Gagalnya sistem moneter internasional

Sistem moneter internasional yang absolut di dunia saat ini tidaklah ada. Setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Kebanyakan orang tidak mengerti bagaimana tidak biasanya (*unusual*) sistem ini. Selama ribuan tahun negara-negara telah mematok mata uang mereka terhadap salah satu logam mulia (emas atau perak) atau terhadap mata uang lain. Tetapi dalam seperempat abad terakhir sejak sistem moneter internasional (Bretton Woods) hancur, tiap negara mengadopsi sistem moneternya sendiri, fenomena yang tidak memiliki contoh sejarah dalam kerja sama antarnegara yang dikenal sebagai sistem moneter internasional.

6. Pengaruh timbal balik neraca pembayaran

Para ekonom mengetahui bahwa ketergantungan di antara sistem moneter internasional didukung oleh fakta bahwa keseimbangan neraca pembayaran (suatu negara) saling berhubungan satu sama lain. Apabila satu negara memiliki neraca perdagangan yang

surplus maka negara-negara lain memiliki neraca perdagangan yang defisit. Jadi suatu negara bergerak menuju surplus atau defisit yang secara otomatis berpengaruh terhadap negara lain. Ini memiliki pengaruh di dalam sistem nilai tukar mata uang. Di dalam sebuah dunia dari n negara dengan n mata uang, ada $n-1$ nilai tukar yang independen. Setiap negara tidak dapat menetapkan nilai tukarnya.

Akan ada banyak nilai tukar tetap di antara negara-negara. Ada satu derajat bebas (*degree of freedom*), yang membiarkan kenaikan terhadap apa yang oleh para ekonom sebut dengan masalah kelebihan (*redundancy problem*). Aturan yaitu tambahan derajat kebebasan untuk memelihara kestabilan harga, atau dalam kasus standar emas adalah memelihara atau menstabilkan harga emas.

7. Ketidakpastian mata uang tunggal dan nilai tukar mengambang

Di atas kertas, pengumpulan data hampir 200 negara dengan mata uang tunggal dan nilai tukar mengambang akan menunjukkan hasil berupa kebingungan yang luar biasa. Dalam praktiknya, bagaimanapun juga, sistem ini tidaklah begitu buruk. Ada hubungan yang penting dalam struktur finansial dunia berkenaan dengan konfigurasi kekuatan dalam ekonomi dunia dan aturan khusus yang dijalankan oleh mata uang negara Amerika Serikat. Ketika suatu negara memiliki *supereconomy*, mata uangnya sering kali memenuhi banyak fungsi dari sebuah mata uang internasional.

8. Negara yang mengalami kepailitan

Pada 1970-an adalah waktu yang baik bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada negara berkembang. Kondisi saat itu menggambarkan seakan-akan negara tidak akan mengalami kepailitan. Kenyataan memperlihatkan *sovereign debt* (utang

pemerintah negara berdaulat) menghantam bisnis internasional. Beberapa negara berkembang ternyata tidak mampu mengembalikan utangnya bahkan bunganya pun tidak terbayar. Krisis *sovereign debt* terjadi di Polandia pada 1981, sedangkan di Meksiko, Brazilia dan Argentina terjadi pada 1982. Penyebab bertambahnya utang negara berkemb- bangyaitu melonjaknya harga minyak. Pada 1973-1974 harga minyak mengalami kenaikan 4 kali lipat dan pada 1979-1980 dinaikkan lagi 2 kali lipat. Kenaikan harga minyak ini mendorong meningkatnya inflasi yang kemudian ditambah lagi dengan terjadinya resesi dunia. Sementara itu, komoditas ekspor nonmigas negara berkembang menurun, sehingga menggoncang perekonomian dan kemampuan untuk membayar utang.

Tahun 1979-1980 harga minyak mulai naik lagi. Akan tetapi kenaikan harga tersebut diikuti dengan kenaikan suku bunga yang berpengaruh pada suku bunga pinjaman baru maupun sisa pinjaman yang pada umumnya digunakan suku bunga variabel. Negara berkembang menanggung biaya bunga sebesar US\$ 2,5 miliar/tahun untuk setiap kenaikan 1 persen suku bunga pinjaman dollar AS. Akibatnya nilai mata uang dollar AS naik. Negara berkembang pada umumnya meminjam uang dalam bentuk dollar AS, sehingga setiap kenaikan dollar Amerika Serikat menambah beban. Beban tersebut menjadi lebih berat karena pembayaran komoditas ekspor diterima dalam berbagai mata uang lain yang digunakan untuk membayar utang dalam dollar Amerika Serikat.

BAB IX

GLOBALISASI EKONOMI

Pengertian Globalisasi dan Globalisasi Ekonomi

Mungkin sampai saat ini anda sudah sering mendengar istilah Globalisasi, bukan? Namun apakah anda sudah paham betul apakah pengertian globalisasi itu sendiri? Dalam kamus *Longman Dictionary of Contemporary English*, globalisasi yang berasal dari kata global memiliki arti “*concerning the whole earth*” yakni segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan dunia internasional atau dengan seluruh alam semesta. Jika anda masih tidak paham tentang makna globalisasi sebenarnya, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi tentang pengertian globalisasi dari para ahli yang mungkin bisa membantu.

Pernyataan pertama tentang *pengertian globalisasi* ini diutarakan oleh Emanuel Ritcher. Ia mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah jaringan kerja global yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya berpecah serta terisolasi menjadi saling memiliki ketergantungan dan mewujudkan persatuan dunia. Di lain sisi, Leonor Briones mengatakan bahwa globalisasi merupakan demokrasi yang terjalin bukan hanya pada bidang perniagaan serta ekonomi, tetapi juga pada keglobalan intuisi demokratis, pembangun sosial, hak asasi manusia, serta pergerakan wanita. Sedangkan John Huckle lebih menganggap globalisasi sebagai sebuah proses dengan kejadian, keputusan, serta kegiatan di salah satu bagian dunia yang

menjelma menjadi sebuah konsekuensi signifikan bagi seluruh masyarakat di daerah yang jauh.

Sementara itu, pengertian globalisasi yang lebih kompleks diutarakan oleh Princenton N. Lyman, mengutarakan arti globalisasi sebagai pertumbuhan yang berlangsung begitu cepat dan memiliki ketergantungan antara negara-negara di dunia dalam hal keuangan dan perdagangan. Apabila ditinjau dari sisi ekonomi, globalisasi berarti proses pengintegrasian ekonomi beberapa bangsa kepada sebuah sistem ekonomi yang lebih global.

Maka dari beberapa pernyataan tentang pengertian globalisasi tersebut diketahui bahwa globalisasi merupakan sebuah proses pengintegrasian manusia dengan semua aspek yang mengikutinya ke dalam sebuah kesatuan masyarakat yang lebih besar dan lebih utuh. Sekedar informasi tambahan juga, Globalisasi sebenarnya juga diketahui sebagai istilah lawas yang sudah bukan merupakan suatu fenomena baru lagi karena prosesnya telah terjadi sejak beberapa abad silam, tepatnya pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Pada zaman sekarang ini orang sering menyebut dengan era atau zaman globalisasi. Istilah globalisasi berkaitan erat dengan globe. Globe adalah tiruan bola bumi. Sehubungan dengan hal tersebut akhirnya muncul istilah globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam globalisasi, peristiwa di satu negara akan mempengaruhi seluruh penjuru dunia. Penyebab munculnya globalisasi adalah kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan teknologi informasi. Kemajuan itu mempermudah hubungan antarmanusia.

Contohnya setiap orang sekarang tidak perlu pergi ke Eropa untuk menyaksikan sepak bola Piala Eropa, Karena dapat

menyaksikan siaran langsung dari televisi di rumah. Demikian juga jika ingin berbicara dengan temanmu di luar negeri, dapat menggunakan telepon tanpa harus jauh-jauh menemuinya. Dahulu orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu lama. Sekarang dapat menggunakan internet yang lebih mudah dan cepat. Globalisasi juga ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Perusahaan tersebut dikenal dengan perusahaan *multinasional*. Contoh perusahaan multinasional adalah *Freeport* dari Amerika Serikat dan *British Petroleum* dari Inggris, yakni perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan. Ada pula *Mc. Donalds* dan *Pizza Hut* yang bergerak dibidang makanan cepat saji. Berkembangnya globalisasi sampai saat ini sangat didukung oleh kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi.

Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas territorial, atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Disini dunia dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah. Sisi perdagangan dan investaris menuju kearah liberalisasi kapitalisme sehingga semua orang bebas untuk berusaha dimana saja dan kapan saja didunia ini. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi telah melahirkan Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Globalisasi

ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.

Tanda-tanda globalisasi menurut Halwani (2001:225) adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dan transformasi yang semakin canggih
2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas
3. Ekonomi negara yang makin terbuka
4. Penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara
5. Metode produksi dan perakitan dan organisasi manajemen yang makin efisien
6. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia

Lebih lanjut Thomas I Friedman dikutip oleh Halwani (2001:225) mengatakan bahwa globalisasi mempunyai 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Dimensi idea atau ideologi yaitu “kapitalisme”. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yaitu falsafah individualisme, demokrasi, dan HAM

2. Dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.
3. Dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi. Dengan teknologi informasi akan terbuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas (*borderless country*)

Sebagai perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Globalisasi produksi

Globalisasi produksi yaitu dimana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

2. Globalisasi pembiayaan

Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh yaitu PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (*build-operate-transfer*) bersama mitrausaha dari manca negara.

3. Globalisasi tenaga kerja.

Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staff profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki

pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka *human movement* akan semakin mudah dan bebas.

4. Globalisasi jaringan informasi

Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, TV, media cetak, dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, celana jeans levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.

5. Globalisasi Perdagangan

Liberalisasi Perdagangan

Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan *non-tarif*. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan *fair*. Depresi tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan proteksi, setiap negara berusaha untuk mengurangi pengaruh yang tidak baik dari perkembangan ekonomi duniadengan mengurangi ketergantungan dari luar negeri melalui tindakan-tindakan yang bersifat protektif. Amerika serikat merupakan salah satu negar yang paling berpengaruh saat itu juga melakukan proteksi dengan menggunakan tarif terhadap importnya melalui Smoot-Howley. Tindakan ini diikuti oleh negara-negara lain sehingga perdagangan bebas internasional tidak terjadi. Sejak dasawarsa 80-an, banyak negara berkembang yang semula menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor, mulai mengubah haluan dan melakukan liberalisasi perdagangan.

Gelombang reformasi ini nampaknya bertolak dari terjadinya krisis utanginternasional, disamping itu mereka juga bercermin pada keberhasilan sejumlah negara berkembang yang sejak awal telah berorientasi ke luar dan berorientasi ekspor kini telah beranjak menjadi negara perekonomian baru. Secara umum reformasi itu meliputi penurunan dan penyederhanaan struktur tarif serta berbagai hambatan impor kuantitatif secara besar-besaran. Langkah ini secara drastis mulai membuka perekonomian mereka terhadap hubungan perdagangan antar negara yang lebih intensif. Hal tersebut dapat dilihat pada besarnya angka ekspor plus impor sebagai rasio terhadap GDP dan tingginya tingkat pertumbuhan perekonomian negara tersebut yang secara sungguh-sungguh melaksanakan liberalisasi.

Pengertian liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan (tarif maupun non tarif) dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Dalam proses membuka keran perdagangan bebas inilah Australia melakukan perubahan struktur (*institutional arrangement*). Struktur kelembagaan perdagangan di Australia terdiri atas Department of Foreign Fairs and Trade yang bertugas untuk mengatur kebijakan perdagangan dalam negeri dan kebijakan kerjasama perdagangan internasional. Lembaga lainnya adalah Productivity Commission yang bertugas untuk memberikan analisis yang netral kepada negara dan dipublikasikan secara massal, Australian Competition and Consumer Commission yang mengatur perlindungan konsumen dan persaingan usaha, Australian Quarantine Inspection yang bertugas dalam hal karantina barang-barang impor serta Australian Customs yang mengatur kepabeanan dan kebijakan anti dumping.

Liberalisasi perdagangan adalah satu hal yang dewasa ini gencar dilakukan oleh berbagai negara. Salah satu negara yang mulai

menata sektor perdagangannya dalam menghadapi perdagangan bebas adalah Australia. Australia mengadakan perombakan besar dalam struktur perdagangan dalam negerinya. Perubahan sektor perdagangan ini tidak terlepas dari goncangnya perekonomian Australia akibat melemahnya harga emas pada dekade 1980an. Pada saat itu, Australia merupakan penghasil emas terbanyak di dunia, ekonomi negeri ini sepenuhnya bergantung pada hasil tambang berupa emas. Pada masa itu Australia merupakan negara dengan GDP tertinggi di seluruh dunia.

Melemahnya harga emas berarti pula GDP dan kesejahteraan Australia akan berkurang, oleh karena itu Australia memulai perkembangan sektor peternakan yang sampai sekarang merupakan komoditi unggulan bagi negara ini. Sejak dari awal perkembangan sektor peternakan ini, Australia menetapkan kebijakan protektif yaitu dengan memberikan dukungan sebesar-besarnya terhadap industri peternakan. Kebijakan ini berlangsung sampai dengan dekade 1990an. Australia, seperti juga Uni Eropa selalu berlindung di bawah kebijakan tarif selama bertahun-tahun, subsidi terhadap peternak pun diberikan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, dengan masuknya Australia ke dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) maka konsekuensi yang harus diterima adalah dihapuskannya kebijakan tarif terhadap barang-barang impor.

Dampak Globalisasi Perdagangan Internasional Bagi Negara Dunia Ketiga

Dengan retorika politik yang anti-politik, menurut Hirts dan Thompson, ekonomi global membiarkan perusahaan-perusahaan dan pasar-pasar mengalokasikan faktor-faktor produksinya sampai ke tingkat tertingginya, perdagangan bebas. Perusahaan-perusahaan transnasional dan pasar modal dunia membebaskan bisnis dari kekuasaan politik tanpa distorsi oleh intervensi negara, dan diganti

dengan “de-militerisasi”. Konklusi dari pandangan ini adalah aktivitas bisnis adalah yang primer dan kekuasaan politik tidak punya peran lain kecuali perlindungan sistem perdagangan bebas dunia. Akibatnya, peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan kemiskinan. Kondisi ini berimplikasi terhadap, pertama, relasi sosial diukur dari pendekatan dan solusi pasar. Kedua, prinsip ekonomi pasar dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi berbagai kebijakan, yang selanjutnya akan melahirkan arogansi kekuatan kapital dan negara berperan sebagai “tukang stempel” bagi mereka.

Menurut Claus Offe, akumulasi modal menjadi prasyarat isi material kelembagaan negara. Dalam konteks perekonomian negara, liberalisasi dapat melahirkan dampak yang bersifat negatif maupun positif, tergantung kemampuan daya saing yang dihasilkan. Tetapi, melihat jeratan hutang dan hambatan non-tarif yang sengaja diciptakan terjadi saat ini, *Letter of Intent* (LoI) yang sangat merugikan-misal, Indonesia harus menghapus subsidi tertentu supaya proses pencairan kredit lancar, dan arogansi WTO yang berpihak kepada kepentingan negara negara maju dengan menelurkan kebijakan yang menguntungkan mereka dan merugikan negara ketiga (misal: penghapusan subsidi pangan terhadap negara dunia ketiga). Ketimpangan ini sebagai akibat sistem pengambilan keputusan yang didasari atas kepemilikan saham dimana negara maju tersebut mempunyai 67% lebih saham didalamnya, maka negara dunia ketiga akan semakin berat dan harus siap dengan kondisi terpuruk sebagai akibat kekejaman sistem yang ada. Selain itu, keputusan akan mengurangi agenda sosial negara, dan diganti dengan agenda pasar yang “kejam” sebagai parameter keberhasilan akan menghantui setiap negara dunia ketiga. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur dan suprastruktur yang belum terkondisikan sedemikian rupa untuk menghadapi hal itu.

Perampokan terhadap kekayaan negara harus siap mereka hadapi, ditandai masuknya perusahaan transnasional dan multinasional yang mempunyai kapital lebih dibanding kekuatan negara untuk melawannya.

Menurut hasil *survey corporate watch* (2000), dua ratus perusahaan teratas menciptakan ekonomi global apartheid, bukan perkampungan ekonomi global, dan penjualan 200 perusahaan teratas lebih besar daripada ekonomi kolektif seluruh negara minus sembilan negara terbesar, maka ancaman terhadap kedaulatan negara akan menjadi kenyataan apabila negara hanya sebagai “penonton” saja. Para MNC dan TNC tersebut dapat hidup nyaman karena mereka berlandung dibalik keputusan WTO yang mempunyai kekuatan mengikat dan lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh PBB untuk memaksakan suatu resolusi. Negara-negara maju juga mempunyai kepentingan dibaliknya, yaitu agenda penaklukan kembali pasar dalam negeri negara-negara dunia ketiga merupakan tujuan mendasar dibalik tekanan kekuatan negara-negara imperialis terhadap “pasar bebas”.

Penghapusan tarif impor terhadap seluruh anggota WTO memaksa penghapusan satu-satunya bentuk proteksi yang tersisa oleh negara-negara dunia ketiga terhadap penetrasi pasar dalam negeri mereka oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Tetapi negara-negara imperialis dapat membatasi penetrasi terhadap pasar dalam negeri mereka terhadap ekspor dari negara-negara dunia ketiga melalui penerapan serangkaian hambatan-hambatan non-tarif yang kokoh. Dan agenda pemberdayaan ekonomi rakyat akan semakin terpuruk akibat desakan kuat dari komoditas-komoditas asing yang sudah jelas telah mengekspansi secara simultan, dan benturan antara pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pasar bebas pun tidak dapat terelakkan. dampak positif yang dapat diambil dari liberalisasi perdagangan versi WTO ini tidak mempunyai peran signifikan

dalam usaha peningkatan sumber daya yang ada maupun produk yang akan dihasilkan adanya akibat “benteng besi” yang dipasang oleh negara maju, yaitu hambatan non-tarif. Selain itu, hanya akan dapat dinikmati oleh segelintir kelompok-kelompok tertentu saja yang mempunyai kekuatan kapital lebih, dan sebagian besar lainnya dirugikan karena mereka dijadikan tidak produktif dan hanya dijadikan sebagai konsumen yang baik. Oleh karena itu, negara dunia ketiga harus bahu-membahu dalam menciptakan tata dunia yang adil dengan menggalang seluruh kekuatan yang tersedia, baik dalam bentuk kebijakan maupun koalisi untuk penyusunan skenario ekonomi dunia yang adil agar eksploitasi tidak terjadi kembali.

Bagi seluruh anggota WTO, suka atau tidak suka mereka harus masuk dalam liberalisasi perdagangan yang membebaskan masuknya komoditas asing tanpa intervensi negara. Dilihat dari kondisi negara dunia ketiga saat ini yang tersistematis dieksploitasi, maka tantangan terhadap liberalisasi ini menjadi sangat berat. Tantangan ini dapat dianalogikan dengan beberapa ilustrasi Hadi Soesastro (LIPI, 1999). Ilustrasi mengenai kondisi yang dihadapi oleh Indonesia terhadap globalisasi, yaitu efisiensi paling optimum sehingga akan menciptakan daya saing yang cukup tinggi di pasar global supaya dapat bersaing dalam perekonomian yang kompetitif. Optimalisasi harus direalisasikan, karena negara dunia ketiga dalam produksi dan pemasaran harus berlandaskan pada kemampuan menciptakan barang yang laku dan berdaya saing tinggi diseluruh dunia dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai basis pengembangan.

Ada beberapa keuntungan liberalisasi perdagangan internasional bagi negara-negara berkembang berdasarkan teori pertumbuhan endogen, antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan akan memungkinkan negara berkembang menyerap teknologi negara maju dalam kecepatan yang lebih tinggi, dengan kata lain dalam kondisi seperti itu alih teknologi akan berlangsung lebih lancar.
2. Melalui hubungan dagang yang lebih terbuka, manfaat riset dan pengembangan yang biasanya hanya dilakukan di negara maju (karena biayanya mahal) akan mengalir lancar ke negara berkembang.
3. Volume perdagangan yang lebih tinggi akan memacu skala ekonomis dalam produksisehingga meningkatkan margin laba bagi para pengusaha di negara berkembang serta menciptakan insentif tambahan dalam melakukan investasi.
4. Penghapusan hambatan perdagangan akan mengurangi distorsi harga yang menjurus pada pendayagunaan segenap faktor produksi secara lebih efisien di semua sektor ekonomi di negara yang bersangkutan.
5. Merangsang spesialisasi lebih lanjut dan akan memacu terselenggaranya kegiatan-kegiatan produksi yang lebih efisien khususnya dalam sektor produksi antara yang menjadi input bagi sektor lain.

Pengaruh Globalisasi terhadap Perekonomian Indonesia

Sebelum membahas tentang pengaruh globalisasi pada perekonomian Indonesia, mesti kita harus paham apa yang dimaksud dengan globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara. Sedangkan Globalisasi Perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial

negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. contoh nyata dari pengaruh globalisasi ini adalah adanya pasar bebas. Yaitu dengan tumbuhnya produk-produk luar negeri yang membuat produk Indonesia kalah saing dipasaran. Ini akibat dari orang-orang Indonesia yang berpikir bahwa produk-produk luar negeri lebih berkualitas baik daripada produk dalam negeri. Tanpa adanya pengembangan produk, sudah pasti produk mereka tidak akan bisa laku di pasaran. Terlebih sejak CAFTA (*China Asia Free Trade Assosiation*) diberlakukan, barang-barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia.

Bagi beberapa pelaku industri, terutama yang selama ini mengandalkan bahan baku import dari China, malah menjadi pihak yang diuntungkan atas masuknya Indonesia ke dalam pasar bebas Asia. Mereka bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang jauh lebih murah karena dilakukannya perjanjian penghapusan tarif import sehingga bisa menekan banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Dengan mendapatkan bahan baku yang murah, maka secara otomatis kegiatan industri bisa semakin berkembang. Itu merupakan contoh positif dari pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Dampak positif globalisasi terhadap perekonomian Indonesia antara lain:

1. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, dan dibutuhkan oleh pasar dunia.
2. Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasinya bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia maka akan membuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia.
3. Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia
4. Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.

Dampak negatif globalisasi bagi kegiatan ekonomi di Indonesia terutama bersumber dari ketidaksiapan ekonomi Indonesia dalam persaingan yang semakin bebas. Berikut adalah dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian adalah :

1. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian kita kalah jauh dari Thailand.
2. Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Misalnya, ancaman produk mainan Cina yang lebih murah bagi industri mainan di tanah air.
3. Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa

tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi.

4. Ancaman masuknya tenaga kerja asing (ekspatriat) di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit.

Maka dari itu sebaiknya kita sebagai warga Indonesia yang mencintai Indonesia wajib hukumnya untuk mendukung Indonesia agar bisa sejahtera. Misalnya dengan membeli produk dalam negeri karena pasar kita yang sudah tersaingi oleh pasar luar negeri di era globalisasi ini. Globalisasi membawa pengaruh positif terhadap Indonesia, tetapi tidak kalah juga dengan contoh yang telah disebutkan diatas dampak negatifnya. Dalam hal Globalisasi ini, peran pemerintah dalam suatu negara sangat diperlukan, mengingat segala aspek yang dilakukan adalah demi tercapainya suatu keadaan negara yang lebih baik. Pemerintah perlu menyikapi kehadiran globalisasi disini secara intensif dan berkelanjutan (berkala). Karena dampak/pengaruh negatif dari globalisasi ini jika dibiarkan secara terus menerus maka sama saja akan memutarbalikkan keadaan bahkan membuat keadaan (kehidupan masyarakat) Indonesia semakin terpuruk. Kesenjangan dan ketimpangan akan terjadi dan akan terus terjadi, baik antar wilayah, maupun kedudukan sosial di Indonesia.

BAB X

PERANAN EKONOMI LUAR NEGERI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Hubungan antar negara, terutama dalam bidang perekonomian merupakan suatu keniscayaan, karena dengan interaksi seperti itu akan menjadikan masing-masing negara semakin berkembang. Dalam konteks ini, ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari ekonomi global, sehingga akan menjadi wajar bila kondisi ekonomi dunia membaik, Indonesia juga berpeluang meningkatkan ekonominya. Salah satu dari aktivitasnya adalah aktif menggerakkan ekonomi yang berorientasi pasar internasional, untuk kemudian bisa menjadi sumber-sumber devisa negara.

Ditinjau dari perspektif ekonomi internasional, Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang bermasalah akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada. Berbagai cara dilakukan, dimulai dari renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh.

Selama dua dekade terakhir Indonesia membangkitkan kembali ekonominya dengan ditopang oleh kegiatan industri dan

perdagangan berbasis ekspor, sehingga menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu *the East Asia Miracle* pada 1990-an. Atas dasar itu, maka Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan keamanan yang kemudian menjadikan fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam.

Secara konseptual kerja sama bidang ekonomi antarnegara sangat diperlukan, karena tidak saja akan pemeratakan dan menyeimbangkan kondisi perekonomian di negara tersebut. Lebih dari itu dapat memberi manfaat dalam meningkatkan pendapatan negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, memperluas ketersediaan lapangan kerja, mempercepat pembangunan nasional, dan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir.

Uraian selanjutnya dalam bab ini akan diketengahkan tentang: (1) gambaran devisa dengan segala variannya, (2) perkembangan ekspor dan impor baik migas maupun nonmigas, dan (3) impor dan substitusi impor.

DEVISA

Devisa adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang berguna sebagai alat pembayaran internasional dan bersifat *convertible* (mudah dipertukarkan). Bentuk devisa misalnya seperti semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral atau misalnya di Indonesia yaitu Bank Indonesia, emas, wesel asing, dan lain-lain. Pengertian devisa paling tidak mencakup dua hal, yaitu: (a) saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia, (b) valuta asing lainnya—tidak termasuk uang logam—yang mempunyai catatan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang

bertanggung jawab atas pengaturan administrasi sistem perbankan di Indonesia dan juga yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas devisa. Semua mata uang negara-negara Barat dan Asia bebas dipertukarkan di Indonesia (*free convertible*) dan IMF telah menyatakan uang rupiah sebagai mata uang yang sepenuhnya *convertible* yaitu dapat dipertukarkan dengan mata uang negara lain (asing). Transfer valuta asing ke luar negeri atau sebaliknya transfer dari luar ke dalam negeri sepenuhnya memiliki kebebasan.

Negara kita dalam tata ekonominya masih sangat tergantung dari luar negeri dan sangat membutuhkan valuta asing. Dengan perkataan lain untuk melanjutkan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi kita tetap membutuhkan alat-alat pembayaran luar negeri atau mata uang asing (*foreign exchange/foreign currency*) yang terus meningkat tahun demi tahun. Valuta asing itu diperlukan untuk:

1. Sumber pendapatan negara, yang kemudian digunakan dalam membiayai pembangunan di berbagai bidang.
2. Mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri dan sektor produksi lainnya, peralatan dan perlengkapan (barang modal, perlengkapan pertahanan keamanan, dan sebagainya).
3. Melunasi jasa pihak asing, seperti jasa perbankan, asuransi pelayaran, penerbangan, perekayasaan, wisatawan Indonesia, dan sektor jasa lainnya.
4. Melunasi utang luar negeri, atau sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri khusus bunganya.
5. Pembayaran jasa dari perusahaan asing seperti jasa angkutan, jasa perbankan, dan perekayasaan (*consulting & engineering*).
6. Membiayai pengiriman tim kesenian dan olahraga.
7. Membiaya kantor perwakilan, kedutaan (korps diplomatik di luar negeri), konsultan, termasuk biaya untuk mahasiswa kita di luar negeri juga memerlukan devisa.

8. Memberikan sumbangan ke negara-negara lain yang mengalami musibah, dan lain-lain.

Devisa yang dimiliki oleh suatu negara, pada umumnya diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, sebagai berikut:

1. Kegiatan ekspor. Hasil penjualan ekspor barang dan jasa, seperti hasil ekspor karet, kopi, minyak, timah, tekstil, kayu lapis, ikan, udang, anyaman rotan, dan topi pandan. Begitu pula sektor jasa, seperti uang tambang (*freight*), angkutan, provisi dan komisi jasa perbankan, premi asuransi, hasil perhotelan, dan pariwisata. Semakin banyak ekspor barang atau jasa maka semakin besar pula pemasukan devisa bagi negara.
2. Pinjaman luar negeri (bantuan luar negeri). Pinjaman yang diperoleh dari negara asing, badan internasional, dan swasta asing. Contohnya seperti dahulu pinjaman dari IGGI (Intergovernmental Group on Indonesia) dan sekarang dari CGI (Consultative Group for Indonesia), kredit dari World Bank dan Asia Development Bank, dan *suppliers credit* dari swasta.
3. Hadiah atau *grant*. Merupakan sumber devisa bagi suatu negara yang memiliki sifat tidak mengikat. Hibah atau hadiah dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Contohnya bantuan dari badan-badan PBB seperti UNDP, UNESCO, dan pemerintah asing seperti negara Saudi Arabia, Jepang, dan Amerika Serikat.
4. Laba dari penanaman modal di luar negeri, seperti laba yang ditransfer dari perusahaan milik pemerintah dan WNI yang berdomisili di luar negeri, termasuk transfer dari WNI yang bekerja di luar negeri, seperti di negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah (TKI dan TKW).
5. Kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa yang diperoleh dari kunjungan turis mancanegara. Semakin banyak turis yang

berkunjung ke negara tersebut maka semakin banyak pula devisa akan mengalir ke negara tersebut. Hasil dari kegiatan pariwisata internasional, seperti angkutan, sewa hotel, penjualan souvenir, dan uang pandu wisata.

6. Perdagangan jasa. Negara yang bergerak dan mengandalkan perdagangan jasa merupakan negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Contoh yang dilakukan Singapura dengan mengandalkan jasa perdagangan sebagai sumber utama devisa.
7. Warga negara yang bekerja di luar negeri. Adalah dana yang berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri, misalnya TKW atau TKI. Pekerja tersebut memberikan peran yang besar untuk memperoleh devisa.

Jumlah perkembangan devisa tersebut dapat kita simak tahun demi tahun dari neraca pembayaran internasional kita dan sebagai gambarannya dapat dilihat kembali hal ini pada Bab 6. Total valuta asing (valas) yang dimiliki pemerintah dan swasta dari suatu negara dan pada umumnya disebut sebagai “cadangan devisa negara”. Cadangan devisa adalah sejumlah valuta asing yang dicadangkan bank sentral untuk keperluan pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing. Cadangan devisa merupakan salah satu indikator moneter yang sangat penting untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Di samping itu, cadangan devisa dalam jumlah cukup merupakan salah satu jaminan terhadap tercapainya stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara. Sebagai gambaran cadangan devisa Indonesia selama 14 tahun terakhir menunjukkan tren yang menarik, meski ada penurunan pada 2018 sebesar 7,33% terutama dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain menurunnya ekspor, pembayaran utang luar negeri pemerintah, stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, dan lain-lain (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Posisi Cadangan Devisa (juta USS), 2005-2018

Tahun	Cadangan Valuta Asing ¹⁾	RPF	SDRs	Emas Mon-eter	Tagihan Lainnya	Jumlah Cadangan Devisa
2005	32.774	208	7	1.583	151	34.724
2006	40.696	219	18	1.483	168	42.586
2007	54.556	228	9	1.946	182	56.920
2008	49.164	225	34	2.041	175	51.639
2009	60.369	227	2.753	2.552	203	66.105
2010	89.751	224	2.714	3.299	219	96.207
2011	103.380	223	2.696	3.593	231	110.123
2012	105.343	224	2.715	3.935	564	112.781
2013	92.872	224	2.712	3.023	555	99.387
2014	105.504	211	2.551	3.027	569	111.862
2015	100.072	202	2.442	2.661	554	105.931
2016	110.341	1.056	1.499	2.876	590	116.362
2017	123.565	1.119	1.588	3.346	579	130.197
2018	114.204	1.096	1.553	3.230	571	120.654

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2018

Catatan:

- 1) Cadangan Valuta Asing = Surat Berharga + Uang Kertas Asing (UKA) dan Simpanan
- 2) RPF = *Reserve Position in the Fund*
- 3) SDRs = *Special Drawing Rights*.

Dalam perkembangan perekonomian nasional dikenal dua terminologi cadangan devisa, yaitu:

1. *Official foreign exchange reserve* ialah cadangan devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan ditatausahakan oleh bank sentral, dan
2. *Country foreign exchange reserve* yaitu mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan, perseorangan, lembaga terutama lembaga

keuangan nasional yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional.

Selanjutnya cadangan devisa dapat dibagi dalam berbagai macam menurut sumber dan wujudnya. Devisa **menurut sumber** dibagi menjadi dua, yaitu: (a) devisa kredit yaitu devisa yang berasal dari kredit (pinjaman) luar negeri, dan (b) devisa umum yaitu devisa yang berasal dari sumber lain (selain kredit) seperti ekspor, penyelenggaraan jasa dan penerimaan bunga modal. Menurut **wujudnya**, devisa dibagi dua jenis yaitu: (a) devisa kartal yaitu devisa dalam wujud uang logam dan uang kertas, dan (b) devisa giral adalah devisa yang berwujud surat-surat berharga, misalnya wesel, cek, cek perjalanan (*travellers cheque*), IMO (*international money order*), dan lain-lain. Jika berkeinginan, devisa giral dapat diubah ke devisa kartal.

EKSPOR MIGAS DAN NONMIGAS

Ekonomi luar negeri Indonesia memegang peranan sangat penting oleh karena dari kegiatan itu dapat diperoleh devisa untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Perolehan devisa yang paling dominan adalah bersumber dari hasil ekspor barang dan jasa, dalam hal ini dikenal dengan istilah populer yang terdiri dari dua kelompok yaitu minyak dan gas bumi (*migas*) dan bukan minyak dan gas bumi (*nonmigas*). Hasil analisis selama periode 1996-2018 atau 23 tahun terakhir di Indonesia menunjukkan, bahwa nilai ekspor barang meningkat dengan laju yang tinggi selama dalam kurun waktu 1996-2011, yaitu sekitar 19,28% per tahun dan sesudah itu berfluktuasi hingga tahun 2018 (lihat Tabel 2).

Tabel 2.
Nilai Ekspor¹⁾ - Impor²⁾ Nonmigas dan Migas Indonesia
Periode 1996-2018 (Juta US\$)

Tahun	Nonmigas		Migas		Jumlah	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1996	38.093,0	39.333,0	11.721,8	3.595,5	49.814,8	42.928,5
1997	41.821,1	37.755,7	11.622,5	3.924,1	53.443,6	41.679,8
1998	40.975,5	24.683,2	7.872,1	2.653,7	48.847,6	27.336,9
1999	3.873,2	20.322,2	9.792,2	3.681,1	48.665,4	24.003,3
2000	47.757,4	27.495,3	14.366,6	6.019,5	62.124,0	33.514,8
2001	43.684,6	2.490,3	12.636,3	5.471,8	56.320,9	30.962,1
2002	45.046,1	24.763,1	12.112,7	6.525,8	57.158,8	31.288,9
2003	47.406,8	24.939,8	13.651,4	7.610,9	61.058,2	32.550,7
2004	55.939,3	34.792,5	15.645,3	11.732,0	71.584,6	46.524,5
2005	66.428,4	40.243,2	19.231,6	17.457,7	85.660,0	57.700,9
2006	79.589,1	42.102,6	21.209,5	18.962,9	100.798,6	61.065,5
2007	92.012,3	52.540,6	22.088,6	21.932,8	114.100,9	74.473,4
2008	107.894,2	98.644,4	29.126,3	30.552,9	137.020,4	129.197,3
2009	97.491,7	77.848,5	19.018,3	18.980,7	116.510,0	96.829,2
2010	129.739,5	108.250,6	28.039,6	27.412,7	157.779,1	135.663,3
2011	162.019,6	136.734,1	41.477,0	40.701,5	203.496,6	177.435,6
2012	153.043,0	149.125,3	36.977,3	42.564,2	190.020,3	191.689,5
2013	149.918,8	141.362,3	32.633,0	45.266,4	182.551,8	186.628,7
2014	145.961,2	134.718,9	30.018,8	43.459,9	175.980,0	178.178,8
2015	131.791,9	118.081,6	18.574,4	24.613,2	150.366,3	142.694,8
2016	132.080,8	116.913,0	13.105,5	18.739,8	14.168,2	135.652,8
2017	153.083,7	132.669,5	15.646,3	24.223,5	168.730,0	156.893,0
2018	162.840,7	158.842,2	17.171,7	29.868,4	180.012,7	188.711,2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, 2018.

Catalan: 1) Nilai ekspor adalah nilai free on board (FOB)

2) Nilai impor adalah nilai cost, *insurance and freight* (CIF). Data tahun 1995-2007 menggunakan sistem perdagangan khusus (di luar Kawasan Berikat).

Sejak 2012, pertumbuhan ekspor negatif disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang lemah dan anjloknya permintaan dan harga komoditas. Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia terdiri dari komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit. Kinerja ekspor baru membaik pada 2017 dan 2018 serta pertumbuhan ekspor secara riil mencapai lebih kurang 9%, seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, sehingga volume perdagangan dunia mengalami peningkatan dari 2,5% pada 2016 menjadi 4,5% pada 2017. Bila dilihat dari nilainya, ekspor Indonesia mengalami penurunan secara terus-menerus mulai selama lima tahun dari 2012 hingga 2016, dari US\$ 190,02 miliar pada 2011 menjadi US\$145,17 miliar pada 2016, dan baru membaik kembali pada 2017 menjadi US\$168,73 miliar dengan pertumbuhan 16%. Demikian juga pada 2018 naik lagi menjadi US\$ 180,013 miliar atau sebesar 6,69%.

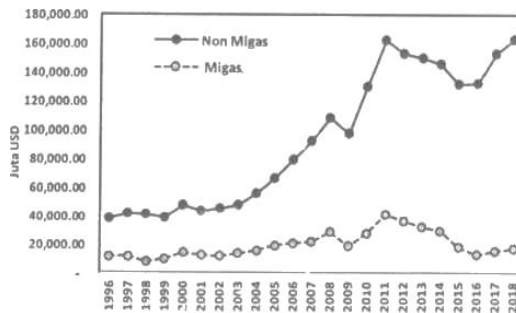
Di luar faktor membaiknya permintaan eksternal, meningkatnya harga komoditas seperti batu bara, kelapa sawit dan migas, ini mendorong pertumbuhan nilai ekspor. Namun, perlu dicatat bahwa membaiknya kinerja ekspor dialami juga oleh banyak negara lain pesaing Indonesia. Pada 2017, nilai ekspor Vietnam melampaui nilai ekspor Indonesia dan mencapai US\$214 miliar atau mengalami pertumbuhan 21%. Padahal tahun 2011 pada saat ekspor Indonesia US\$200 miliar, ekspor Vietnam masih setengah dari Indonesia.

Dari aspek eksternal, melemahnya kurs bisa meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Namun, pengaruh ekspor akan berkurang karena produk nonmigas Indonesia di luar komoditas migas masih tinggi ketergantungannya kepada bahan baku impor. Dalam jangka pendek, faktor permintaan pasar dunia dan harga komoditas akan lebih memengaruhi kinerja ekspor, sedangkan faktor memperbaiki daya saing nonmigas Indonesia menjadi isu penting di jangka pendek dan menengah. Menurut perkiraan terakhir *IMF World Economic Outlook*, pertumbuhan dunia akan membaik pada 2018 dan pada 2019 menjadi 3,9% terutama dengan membaiknya pertumbuhan

di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Negara sedang berkembang di Asia diperkirakan akan tumbuh tertinggi dari semua kawasan di dunia dengan catatan 6,6% pada tahun 2018 dan 6,4% pada 2019.

Untuk harga komoditas migas mengalami kenaikan paling pesat dengan harga minyak saat ini sudah mendekati US\$ 80 per barrel dibandingkan dengan titik terendah pada 2015 sebesar US\$ 40 per barrel. Bagi Indonesia, kondisi itu lebih menyebabkan peningkatan defisit perdagangan migas walaupun ekspor minyak bumi kita meningkat karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak bumi (Gambar 1).

Ekspor Non Migas dan Migas Indonesia 1996 - 2018



Ekspor dan Impor Migas Indonesia 1996 - 2018



Total Ekspor dan Impor Indonesia 1996 - 2018



Gambar 1

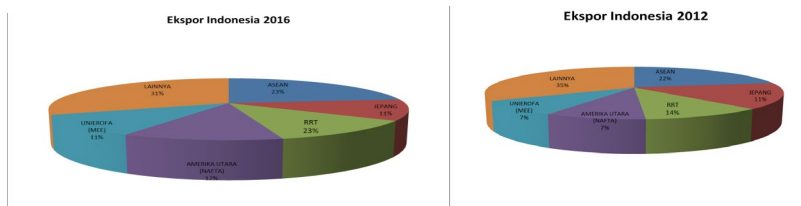
Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia Periode Tahun 1996 - 2018

Terkait dengan pasar eksternal tentu diperlukan strategi antisipasi pertumbuhan perekonomian dunia dan perluasan pasar di tengah ketidakpastian iklim perdagangan dunia. Pertumbuhan volume perdagangan dunia membaik secara signifikan pada 2017 mencapai 4,9% dibandingkan dengan 2,3% pada 2016 (lebih rendah lagi pada periode 2012-2015), dan diperkirakan tetap baik dengan pertumbuhan 5,1% pada 2018 dan 4,7% pada 2019.

Untuk dapat meningkatkan daya saing dan diversifikasi, maka Indonesia perlu fokus kepada perbaikan ketrampilan dan kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Langkahnya dengan memperkuat struktur dan efisiensi dari sektor industri, meningkatkan inovasi dan produktivitas di semua sektor, dan terbuka untuk penanaman modal dan keperluan talenta dari luar negeri untuk membangun sentra inovatif dan baru di Indonesia.

Mengenai arah perdagangan luar negeri Indonesia terutama

tentang ekspor menurut negara tujuan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran. Ambil contoh negara tujuan ekspor untuk tahun 2012 dan 2016 (Gambar 2) telah terjadi pergeseran volume ekspor untuk negara-negara tujuan seperti ASEAN, Jepang, RRT, Amerika Utara (NAFTA), Uni Eropa (MEE), dan negara-negara lainnya. Terlihat bahwa ekspor ke kelompok negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan peranan yang mulai dominan dan lambat laun volumenya meningkat dari 22% pada 2012 menjadi 23% pada 2016. Bagi kelompok RRT, MEE, dan Amerika Utara (NAFTA) menunjukkan kecenderungan meningkat. Sebaliknya ekspor kita untuk tujuan ke Jepang dan kelompok negara-negara lainnya cenderung menurun. Tujuan ekspor ke Jepang sebesar 16% pada 2012 turun drastis menjadi 11% pada 2016. Sementara ekspor ke negara lainnya dari 33% pada 2012 turun menjadi 31% pada 2016.



Gambar 2. Ekspor Indonesia Menurut Wilayah Tujuan Tahun 2012 dan 2016

IMPOR DAN SUBSTITUSI IMPOR

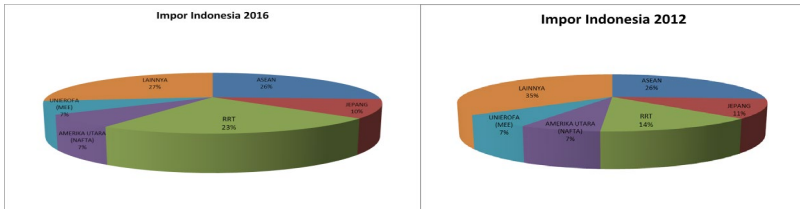
1. Impor

Perkembangan impor nonmigas (Tabel 2 dan Gambar 1) menunjukkan kecenderungan menurun dan tahun 1995 hingga 2003, tetapi sejak 2004 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan yang makin tajam. Bahkan mulai tahun 2012 hingga 2018 telah terjadi defisit neraca perdagangan yang ditunjukkan oleh nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa

perekonomian Indonesia masih sangat tergantung dengan produk luar negeri dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Dalam hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menggiatkan program substitusi impor belum berhasil sesuai harapan. Dengan kata lain bahwa, industri manufaktur domestik belum berkembang dengan pesat dan produk- produk industri manufaktur masih menggunakan teknologi yang belum berkembang (*low-tech*). Impor nonmigas kita, juga masih didominasi bahan baku, bahan penolong, dan barang-barang modal yang nilai tambahnya lebih tinggi dari produk-produk ekspor kita.

Impor migas juga mengalami hal yang sama seperti impor nonmigas. Mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan yang semakin membesar. Pada 1995 nilai impor migas sebesar US\$ 2.291,8 juta dan pada 2014 naik tajam menjadi US\$ 434.59,9 juta atau sebesar 1896,32%, suatu angka yang sangat fantastis. Tentu saja ini dapat dipahami bahwa, dari sisi penawaran (*supply*), rata-rata produksi tak sampai menyentuh 800 ribu barel per hari, hanya 770 ribu per hari yang sulit ditingkatkan secara signifikan dan juga harganya pun sangat cenderung fluktuatif. Kemudian dari sisi permintaan (*demand*), produksi kita hanya kira-kira memenuhi sepertiga dari kebutuhan konsumsi, sehingga membuat kita makin tergantung dengan impor.

Dalam hal impor, kelihatannya bahwa peranan China lebih menonjol dalam perekonomian kita. Pada 2012 ada 14% total impor kita berasal dari China. Angka meningkat secara signifikan pada 2016 menjadi 23%, sedangkan peranan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada (Kelompok Amerika Utara), Jepang, dan Uni Eropa tidak banyak mengalami perubahan. Peranan ASEAN hanya sedikit mengalami kenaikan, pada 2012 impor kita sebesar 24% berasal dari negara-negara ASEAN dan naik dua persen menjadi 26% pada 2016 (Gambar 3).



Gambar 3. Impor Indonesia Menurut Wilayah Asal Tahun 2012 dan 2016

2. Substitusi Impor

Sebelum proyek industri didirikan, sebagian besar devisa kita terpaksa dipakai untuk mengimpor barang konsumsi seperti tekstil, terigu, barang kelontong, benangtenun, dan lain-lain. Salah satu upaya untuk mengubah struktur ekonomi yang masih pincang—karena sektor pertanian yang bersifat ekstraktif masih sangat dominan—adalah melakukan industrialisasi. Perkembangan ekonomi nasional dapat dipacu lebih cepat kalau ditopang oleh sektor industri yang kuat dan sektor pertanian yang tangguh.

Dengan dimulainya industrialisasi di negara kita, maka dengan sendirinya dibutuhkan devisa yang cukup besar untuk mengimpor perlengkapan proyek-proyek industri manufaktur dalam beraneka jenis sesuai dengan jenis produk yang dibuat. Oleh karena jenis industri generasi pertama yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis industri substitusi impor, yaitu barang-barang konsumsi yang tadinya diimpor, kemudian diusahakan untuk diproduksi di dalam negeri. Kebijakan substitusi impor (*import substitution*) adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri.

Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dan kebijakan substitusi impor, antara lain: **pertama**, mengurangi ketergantungan pada impor. Ini terutama barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk antara. **Kedua**, memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan industri adalah substitusi impor (SI), di mana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Industri-industri yang dibangun berdasarkan kebijakan SI pada tahap awal umumnya adalah yang bersifat padat karya dan/atau berteknologi rendah. Sebab industri tersebut relatif sesuai dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara sedang berkembang (NSB). Selain itu industri-industri tersebut dapat menghasilkan keunggulan komparatif.

Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian tenaga kerja yang melimpah disektor pertanian akan diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi kuantitas output sektor pertanian. **Keempat**, menghemat devisa. Penghematan akan devisa berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran umumnya dilihat dan surplus neraca perdagangan atau menurunnya defisit neraca perdagangan, karena impor makin mengecil. Atau dapat juga dilihat dalam neraca modal, yang menunjukkan modal masuk lebih besar daripada modal ke luar. Perbaikan neraca pembayaran ini akan memberikan efek multiplikasi perekonomian domestik, sekaligus memperbaiki posisi perekonomian dunia.

Di samping adanya manfaat positif dari SI, juga terdapat sisi negatifnya, antara lain:

- a. Menguntungkan perusahaan asing. Perusahaan asing yang menanamkan modal di sektor industri substitusi impor akan memperoleh keuntungan, karena memperoleh proteksi di balik beban tarif, fasilitas keringanan pajak, dan insentif penanaman modal.

- b. Pasar domestik cepat jenuh. Kelemahan kebijakan SI bukanlah pada aspek penawaran, melainkan aspek permintaan. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk NSB menyebabkan permintaan domestik akan produk-produk industri amat kecil Artinya, skala pasar domestik relatif kecil, sehingga cepat jenuh.
- c. Memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan/atau oligopoli. Kecilnya skala pasar domestik menyebabkan para investor meminta jaminan kepastian pasar agar skala jual produksi mereka mencapai tingkat efisiensi ekonomis, bahkan dapat memberikan keuntungan supernormal (*supernormal profit*). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para investor menuntut hak monopoli (legal) atau pembatasan jumlah produsen berdasarkan ketentuan hukum. Tidak mengherankan bila struktur industri di NSB umumnya monopoli atau oligopoli yang berdasarkan kekuatan hukum.

d. Ketergantungan yang makin besar terhadap impor. Akan menjadi persoalan besar dalam kebijakan SI adalah tidak tersedianya justru mengakibatkan ketergantungan baru terhadap impor. Impor barang modal dan bahan baku justru meningkat jika target pertumbuhan output industri atau ekonomi ditingkatkan.

Industrialisasi substitusi impor (ISI) adalah suatu kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. ISI didasarkan pada anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan produk industri dalam negerinya. Istilah ini lebih mengacu kepada kebijakan ekonomi pembangunan abad ke-20, namun sudah diusulkan pada abad ke-18 oleh ekonom Friedrich List dan Alexander Hamilton. Kebijakan ISI diterapkan oleh negara-negara di belahan Bumi Selatan dengan tujuan merintis pembangunan dan kemandirian melalui pembentukan pasar dalam negeri.

Jenis industri yang berkembang kebanyakan industri yang menghasilkan barang konsumsi primer seperti tekstil, pakaian jadi, terigu, makanan kaleng, obat-obatan, dan barang-barang konsumsi lain. Di samping itu ikut pula dikembangkan industri yang dapat menunjang peningkatan produksi domestik. Dalam sektor ini yang paling menonjol adalah industri petrokimia, khususnya pupuk yang berhasil sangat menyakinkan untuk dapat meningkatkan produksi terutama tanaman pangan seperti padi dan palawija. Demikian pula di bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan yang akhir-akhir ini lebih banyak lagi jenis komoditas yang dapat dipacu untuk tujuan ekspor. Kekuatan saling mendorong antar-subsektor tersebut sangat menggembirakan bagi dunia usaha maupun masyarakat.

Pembangunan industri-industri tersebut dibutuhkan devisa yang sangat besar untuk mengimpor barang-barang modal (mesin-mesin dan peralatan), bahan baku, suku cadang, dan bahan penolong lainnya. Mungkin untuk masa-masa mendatang pemerintah perlu mengurangi penggunaan devisa untuk bahan baku dengan cara mendorong industri yang berorientasi pada bahan baku dalam negeri dan mengurangi devisa untuk impor barang modal seperti mesin dengan mendorong tumbuhnya industri permesinan di dalam negeri sebagai substitusi impor.

ISI beroperasi dengan mendukung negara memimpin pembangunan ekonomi lewat nasionalisasi, subsidi industri penting (termasuk pertanian, pembangkit listrik, dan lain-lain), kenaikan pajak, dan kebijakan perdagangan yang sangat proteksionis. ISI perlahan ditinggalkan oleh negara-negara berkembang pada 1980-an dan 1990-an sebagai bagian dari program penyesuaian struktural IMF dan Bank Dunia. Kedua institusi tersebut mengupayakan liberalisasi pasar global di belahan bumi Selatan. Berdasarkan fakta selama ini, apa pun penyebabnya, Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari impor pangan. Ada lima fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa:

- a. Meninggalkan impor beras, justru beralih ke mie instan. Pemerintah sudah menyadari ketergantungan konsumsi beras tidak ideal bagi ketahanan pangan nasional. Masalahnya, upaya diversifikasi malah mendorong masyarakat beralih pada komoditas yang masih impor. Setelah meninggalkan nasi, konsumsi itu justru beralih kepada roti dan mi instan yang berbahan baku mayoritas impor.
- b. Perang dagang negara dunia. Indonesia harus mewaspadai perang dagang antara Rusia-Amerika Serikat untuk komoditas gandum. Tantangan ke depan, pemerintah harus lihai memanfaatkan setiap peluang untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen. Ketahanan pangan di masa depan itu sangat tergantung dengan tingkat kebutuhan dan kualitas yang diharapkan konsumen.
- c. Lima belas tahun mendatang pasokan dalam negeri terhenti. Pengusaha makanan jadi sudah punya studi, intinya 15 tahun mendatang peranan pasokan dalam negeri akan semakin terbatas. Berdasarkan studi yang dilakukan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, China, India sudah nampak pergeseran kebutuhan pangan dari karbohidrat menjadi protein. Apa yang terjadi di kancah global, akan berdampak pada kondisi negara kita. Hal ini tampaknya kita tidak bisa lagi merencanakan pertumbuhan pertanian yang normatif.
- d. Jika ingin harga pangan murah, maka harus impor. Pemerintah menganggap tidak masalah untuk impor pangan, untuk mempertahankan stabilitas harga pangan. Meskipun demikian, tidak berarti kita pro-impor, namun setidaknya dalam jangka pendek. Tujuannya adalah dalam jangka panjang tetap melindungi produksi dalam negeri.
- e. Bergabungnya lembaga WTO dan APEC, menyebabkan pemerintah melonggarkan keran impor pangan. Diratifikasinya Undang-Undang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

pada 1995, berdampak pada semakin liberalnya perdagangan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membuka kran liberalisasi melalui keterlibatan di Forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Klausul perdagangan di forum WTO dan APEC melemahkan kemandirian bangsa. Contohnya adalah pelarangan subsidi bagi petani maupun petambak. Kebijakan yang sifatnya protektif seperti pembatasan impor produk hortikultura juga akhirnya kini dikendorkan setelah ada tekanan dari WTO. Di bawah rezim WTO, hampir 10 tahun negara ini tidak boleh lagi memberi subsidi kepada rakyatnya, khususnya udang di pesisir. Demikian pula pelarangan impor hortikultura, awal 2011 membatasi, Maret 2013 Amerika menggugat Indonesia, sesaat setelah itu kebijakan ini direvisi. Tak hanya itu, perjanjian internasional lewat APEC atau bilateral dengan Uni Eropa juga membuat Indonesia memperluas ke- bun sawit. Saat ini 70 persen produksi sawit dalam negeri diekspor. Alhasil lahan pertanian lain tergerus. Tak heran pemerintah harus impor beras, bawang putih, hingga cabe.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman, et.al, 1995. *Strategi Pemerintah dan Swasta Menghadapi AFTA*, Jakarta: PPW-LIPI
- Apridar (2007). *Ekonomi Internasional; Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*: Jakarta, Unimal Press.
- Bakry, Umar Suryadi, 1994. *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. Probisi Mitra Buana
- Barnet, Richard J. dan Ronald E. Muller, 1984. *Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional*, Jakarta: LP3ES
- Boediono. (2001). *Ekonomi Internasional: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 3*, Yogyakarta: BPFE.
- Chacholiades, Miltiades., 1981. *Principles of International Economics*. Mc Graw, Hill Book Company, New York.
- Coady, C. A. J. 1995. *Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing
- Didik J. Rachbini, 2004. *Masalah dan Kecenderungan Kebijakan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LSPEU Indonesia, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol.5, No.1, Januari-Juli 2004
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang*, (Jakarta: LP3ES, 1989.)
- Grubel, H.C., 1977. *International Economics*. Homewood, Illinois.
- Hamdy Hady, 2001. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Buku dua Edisi Revisi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Heinz Lempert, 1994. *Ekonomi Pasar Sosial: Tatahan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman*, Jakarta: PUSPA SWARA

Hendra Halwani, 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*.
Ghalia Indonesia, Jakarta

Jeffrey Edmund Curry, 2001. *Ekonomi Internasional*. PPM, Jakarta.

Kreinin, M.E., 1979. *Internasional Economics : A Policy Approach*.
Harcourt Brace Jovanovich, New York.

Lindert, Peter H., 1982. *International Economics*. Homewood,
Illinois.

Martani Huseini, 2000 *Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional
Indonesia*, Jakarta: Lspeu Indonesia, *Jurnal Reformasi Ekonomi*
Vol.1, No.1, Januari-Maret

Nopirin, 1995. *Ekonomi Internasional*, Edisi ke Tiga, BPFE Yogyakarta.

Sadono Sukirno, 1995. *Pengantar Teori Makro ekonomi*, Edisi Kedua,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salvatore Dominick. (1995). *Ekonomi Internasional: Teori dan Soal-soal*,
(Terjemahan, Rudy Sitompul dan Haris Munandar). Jakarta:
Erlangga.

-----, (1997), *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima, Jilid 1,
(Terjemahan Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.

Soelistyo. (1989). *Ekonomi Internasional: Teori Perdagangan Internasional*.
Yogyakarta: Liberty.

Syamsurijal Tan, 1990. *Esensi Ekonomi Internasional*, Jakarta: Ghalia
Indonesia,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jalursutra>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>

http://id.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli

PROFIL PENULIS

Rita Yunus, SE. M. Si adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Penulis lahir di Buton pada tanggal 07 November 1976. Menyelesaikan Pendidikan dasar hingga Menengah di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Kemudian Strata Satunya (S1) dirampungkan di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. S2 diselesaikan di Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Universitas Diponegoro. Dan saat ini menempuh S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Unhas. Penulis telah mempublikasikan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah, dan saat ini memulai untuk menulis Buku.

Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. lahir di Makassar pada 25 Juni 1963. Ia meraih gelar M.A. (1991) dalam bidang ekonomi di School of Economics, University of the Philippines, Diliman-Quezon City, Manila dan Doktor Ilmu Ekonomi (2004) di Program Pascasarjana Unhas, Makassar. Rahmatia adalah pengajar tetap untuk bidang kuantitatif (matematika, statistik dan ekometrika) dan teori ekonomi baik di FE-Unhas dan pascasarjana Unhas maupun pada berbagai PTN di Indonesia Timur termasuk pascasarjana STIA-LAN Makassar. Beliau pernah menjabat sebagai KPS S2 Ekonomi Perencanaan Pembangunan, Pascasarjana Unhas, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB-Unhas, serta Wakil Dekan III FEB Unhas. Penulis telah menulis diberbagai jurnal ilmiah dan juga telah menghasilkan Buku, salah satunya adalah Rekonsiliasi Manusia Ekonomi: Tuma'ninah vs Self-interest.

Dr. Haerul Anam, SE. M. Si adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Penulis lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada tgl 30 Maret 1962. Menyelesaikan Pendidikan dasar hingga Menengah di Sulawesi Barat. Strata Satunya (S1) dirampungkan di Fakultas Ekonomi Unhas. S2 diselesaikan di Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Sedangkan S3 Penulis selesaikan pada Program Pasca Sarjana Unhas. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya baik di Jurnal Ilmiah maupun di media massa seperti Koran. Selain itu penulis juga telah menghasilkan Buku, di antara BANK SULTENG: Melintasi Waktu, Merajut Dedikasi, terbit tahun 2019. Buku lainnya adalah: RONA PERSPEKTIF AKADEMISI TADULAKO TENTANG COVID 19, terbit Desember 2020. Penulis bertindak sebagai salah seorang penyunting